

BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
5. Undang-Undang *h...*/2

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Presiden 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Perubahan atas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 19);
  9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 622).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi



dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
5. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPKK adalah rencana kebijakan pembangunan kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 4 (empat) tahun.
6. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPK, adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

## BAB II

### RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN

#### Pasal 2

RPKK merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kabupaten pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

### Pasal 3

- (1) RPKK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. BAB I :Pendahuluan
  2. BAB II :Kondisi Umum Kabupaten
  3. BAB III :Profil Kemiskinan Kabupaten
  4. BAB IV :Prioritas Program
  5. BAB V :Lokasi Prioritas
  6. BAB VI :Penutup
- (2) RPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagai bagian dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

RPKK menjadi pedoman bagi SKPK dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

## BAB III PENJABARAN

### Pasal 5

- (1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan 4 (empat) tahun RPKK dan tahun berjalan, maka TKPK perlu menyusun Rencana Aksi Tahunan( RAT).
- (2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
- a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - b. Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan; dan
  - c. Matriks Rencana Aksi Tahunan.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKK.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 20 Juni 2023 M  
2 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI GAYO LUES, 

  
H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 20 Juni 2023 M  
2 Dzulhijjah 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,



H. JATA



# RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES 2023-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN GAYO LUES  
2023



## **SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GAYO LUES**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues telah dapat menyelesaikan Dokumen Blue Print Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues yang disebut dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gayo Lues.

RKPD ini memberikan gambaran tentang kondisi umum kemiskinan di Gayo Lues, kondisi kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. SKPD ini juga menggambarkan tentang arah kebijakan Program kegiatan secara umum maupun penganggaran terhadap Renja SKPK yang terkait untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan untuk dapat menjadi dasar rujukan pada penyusunan perencanaan lebih terencana serta terintegrasi kedalam arah kebijakan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues, sehingga secara bertahap dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ketahun, dan dengan sendirinya Kabupaten Gayo Lues ke depan dapat semakin menekan kemiskinan sehingga mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan memihak pada pemenuhan hak-hak dasar kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin di Kabupaten Gayo Lues.

Dengan tersusunnya Dokumen RPKD ini, perencanaan dan penganggaran lebih terarah ke depannya serta lebih menyentuh langsung kepada masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues.

Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Gayo Lues  
dto.

**H. JATA, SE. MM**

## **SAMBUTAN PJ. BUPATI KABUPATEN GAYO LUES**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya, Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan kealam yang penuh berilmu pengetahuan pada saat sekarang ini.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 401/345/ 2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues telah menyusun Blue Print Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues yang dikenal dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gayo Lues. Kami selaku Ketua Tim TKPK Kabupaten Gayo Lues mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Dokumen RPKD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 - 2026. Kami menyadari bahwa Dokumen ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menjadikannya sebagai sebuah living document yang dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan.

Akhirnya, kami m`berharap agar Dokumen RPKD Kabupaten Gayo Lues 2020-2024 yang telah disusun ini dapat menjadidijadikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, serta berbagai pemangku kepentingan seluruh Stake Holder yang terlibat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues.

Ketua TKPK  
Kabupaten Gayo Lues  
Plt. Sekretaris Daerah

dto.

**H. JATA, SE. MM**



## **DAFTAR ISI**

Sambutan Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues .....	
Sambutan PJ. Bupati Kabupaten Gayo Lues .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Gambar.....	
Daftar Tabel .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.3. Acuan Kebijakan .....	5
1.4. Metode Dan Tahapan Penyusunan RPKD .....	6
<b>BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN GAYO LUES.....</b>	<b>8</b>
2.1. Geografis, Topografi dan Demografi .....	8
2.2. Ekonomi .....	11
2.3. Ketenagakerjaan .....	14
2.4. Pendapatan Perkapita .....	16
2.5. Capaian Penanggulangan Kemiskinan Periode 2017-2022 .....	17
<b>BAB III PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN GAYO LUES.....</b>	<b>19</b>
3.1. Konsep Kemiskinan.....	19
3.2. Kondisi Kemiskinan Daerah.....	29
3.3. Identifikasi Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Gayo Lues .....	34
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM.....</b>	<b>62</b>
4.1. Pengembangan Logika Program ( <i>Theory of Change</i> ).....	62
4.2. Analisis Anggaran.....	72

<b>BAB V LOKASI PRIORITAS.....</b>	<b>85</b>
5.1. Analisis Kuadran Wilayah .....	85
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>105</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Nasional 2020 .....	3
Gambar 1.1.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018-2022 .....	3
Gambar 2.1.	Posisi Relatif Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, 2022.....	14
Gambar 2.2.	Perkembangann Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Gayo Lues, 2018 – 2022.....	15
Gambar 2.3.	Posisi Relatif Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, 2022 .....	15
Gambar 2.4.	PDRB Perkapita ADHB Gayo Lues dan Provinsi Aceh (Ribu Rupiah), 2018– 2022 .....	16
Gambar 2.5.	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh (Ribu Rupiah)	
Gambar 3.1.	Perkembangan IPM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 – 2022.....	29
Gambar 3.2.	Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues, Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	30
Gambar 3.3.	Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues, Prov.Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	31
Gambar 3.4.	Analisis Identifikasi Masalah Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Gayo Lues, Prov.Aceh Tahun 2018 – 2022.....	32
Gambar 3.6.	Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalam Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues, Prov. Aceh Tahun 2018 – 2022.....	33
Gambar 3.7.	Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues, Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	34
Gambar 3.8.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	37
Gambar 3.9.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	38
Gambar 3.10.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	39
Gambar 3.11.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	40
Gambar 3.12.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	41
Gambar 3.13.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	42
Gambar 3.14.	Analisis Identifikasi Masalah Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	42

Gambar 3.15.	Analisis Identifikasi Masalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gayo Lues Lues Prov. Aceh, Tahun 2018 – 2022.....	43
Gambar 3.16.	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018-2022....	44
Gambar 3.17.	Jumlah Sekolah Terakreditasi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022.....	45
Gambar 3.18.	Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018- 2022...	45
Gambar 3.19.	Jumlah Guru SD dan SMP yang bersertifikasi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022.....	46
Gambar 3.20.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Harapan Hidup (Tahun) di Kabupaten Gayo Lues, Prov. Aceh, Tahun 2018- 2022.....	47
Gambar 3.21.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Kematian Ibu Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018- 2022.....	48
Gambar 3.22.	Analisis Identifikasi Masalah Angka Kematian Bayi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 – 2022.....	49
Gambar 3.23.	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 – 2022.....	49
Gambar 3.24.	Analisis Identifikasi Masalah Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak.....	52
Gambar 3.25.	Jumlah KK yang memiliki MCK di Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2022...	52
Gambar 3.26.	Analisis Identifikasi Masalah Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Kabupaten Gayo Lues, Prov.Aceh Tahun 2018 – 2022.....	53
Gambar 3.27.	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2022.....	54
Gambar 3.28.	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gayo Lues, Prov. Aceh Tahun 2018 – 2022.....	55
Gambar 3.29.	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gayo Lues Prov. Aceh Tahun 2018 – 2022.....	56
Gambar 3.30.	Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Gayo Lues Tahun 202.....	56
Gambar 3.31.	Jumlah angkatan yang bekerja berdasarkan pendidikan terakhir di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022.....	57
Gambar 3.32.	Persentase Penduduk Miskin Eskترم Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022.....	59
Gambar 3.33.	Jumlah Penduduk Miskin Eskترم Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022.....	60
Gambar 3.34.	Persentase Penduduk Miskin Eskترم Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2022.....	60
Gambar 3.35.	Jumlah Penduduk Miskin Eskترم Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2022.....	61



Gambar 4.1.	TOC Bidang Pendidikan.....	63
Gambar 4.2.	TOC Bidang Kesehatan.....	65
Gambar 4.3.	TOC Bidang Infrastruktur Dasar.....	68
Gambar 4.4.	TOC Bidang Ketenagakerjaan.....	69
Gambar 4.5.	Perkembangan Ruang Fiskal(%) dan Persentase Penduduk Miskin(%) Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2017-2021.....	73
Gambar 4.6.	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (%) Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2017- 2021.....	74
Gambar 4.7.	Belanja Menurut Fungsi Kesejahteraan.....	75
Gambar 4.8.	Belanja Menurut Fungsi Pendidikan.....	75
Gambar 4.9.	Belanja Menurut Fungsi Kesehatan.....	76
Gambar 4.10.	Belanja Menurut Fungsi Infrastruktur Dasar.....	77
Gambar 4.11.	Perkembangan Alokasi Belanja Sosial (%).....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nama dan Luas Kecamatan Kabupaten Gayo Lues, 2021 .....	8
Tabel 2.2.	Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Gayo lues, 2021 .....	9
Tabel 2.3.	Kemiringan Lahan, Bentuk dan Luas Wilayah Kabupaten Gayo Lues, 2021 .....	9
Tabel 2.4.	Jenis Tanah Kabupaten Gayo Lues Menurut Jenis Tanah.....	10
Tabel 2.5.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues, 2022.....	10
Tabel 2.6.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Kabupaten Gayo Lues, 2022.....	11
Tabel 2.7.	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Gayo Lues (Persen), 2018-2022.....	12
Tabel 2.8.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gayo Lues (persen), 2018 – 2022.....	13
Tabel 2.9.	Capaian Indikator Makro Pembangunan Gayo Lues Tahun 2017-2021.....	17
Tabel 3.1	Jumlah Sarana Kesehatan di Gayo Lues Tahun 2019-2021.....	50
Tabel 3.2	Jumlah Tenaga Kesehatan di Gayo Lues Tahun 2022.....	51
Tabel 4.1.	Informasi 40% Penduduk dengan tingkat kesejahteraan berdasarkan pekerjaan individu Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023.....	70
Tabel 4.2.	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues 2017-2021.....	81
Tabel 5.1.	Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan selalu menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku pembangunan dan pengambil kebijakan. Didalam poin-poin SDG's (*Sustainable Development Goals*) masalah kemiskinan (*no poverty*) menempati urutan pertama dan menjadi isu global untuk segera ditindaklanjuti. Dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun dengan prinsip pembangunan *no one left behind* atau penanganan kemiskinan harus memberikan manfaat untuk semua dan melibatkan semua kepentingan.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara lebih konkrit amanat penanggulangan kemiskinan tersebut tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat, yaitu: Pasal 27 ayat 2; Pasal 28 huruf A; pasal 28 huruf B ayat 2; Pasal 28 huruf C ayat 1 dan 2; Pasal 28 huruf D ayat 2; Pasal 28 huruf H ayat 1 dan 3; Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4; serta pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4.

Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, maka arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang maupun yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 adalah meningkatkan perluasan perlindungan sosial, meningkat ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar, mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan pengembangan, penghidupan berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin. Hal ini sejalan pula dengan komitmen Indonesia dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*).

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, sering menghadapi pilihan dilematis antara percepatan pertumbuhan dan kemiskinan. Pengurangan angka kemiskinan sepatutnya ditempatkan sebagai pusat perhatian (*center of objective*), tujuan dan cita-cita dalam pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih memusatkan perhatian kepada kelompok miskin dan kelompok rentan kemiskinan.

Strategi pembangunan tersebut harus didesain baik pada tingkat nasional maupun pada tingkatan pemerintahan di bawahnya, dalam jangka waktu yang ditargetkan dan diimplementasikan dengan baik. Dalam berbagai pengalaman pengentasan kemiskinan dunia, fakta dan bukti empiris menunjukkan bahwa paradigma pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan terlihat tidak cukup akurat dan bertenaga untuk mengentaskan kemiskinan.

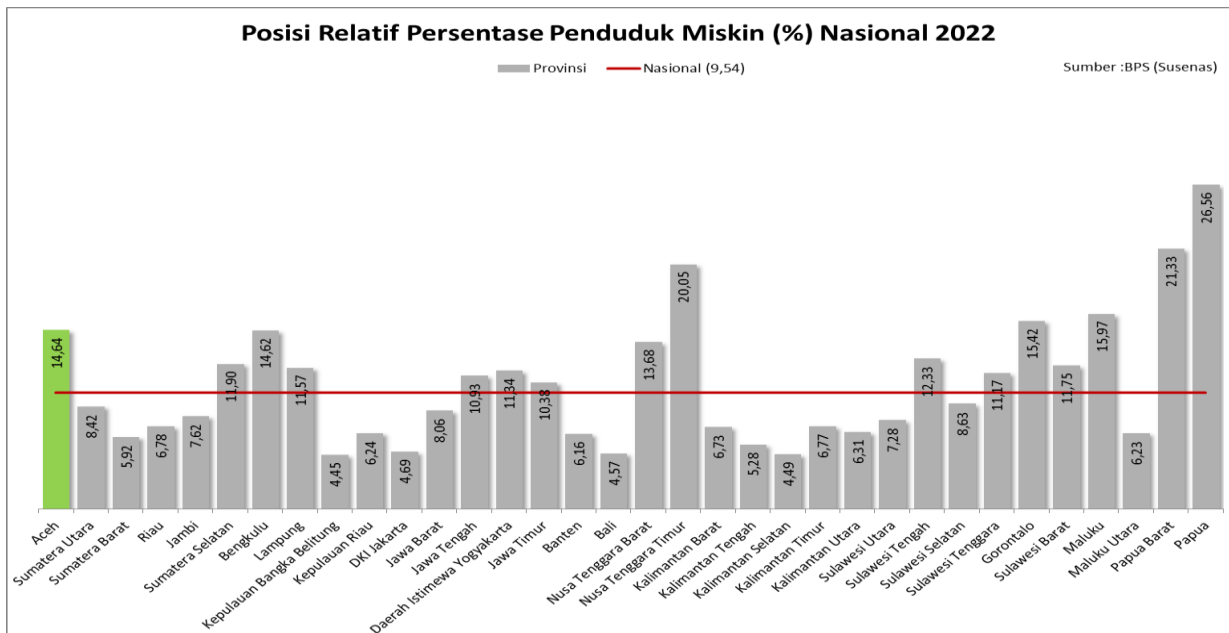


Kondisi obyektif di atas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan bersama-sama serta mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Kemiskinan terjadi bukan semata-mata karena kurangnya pendapatan, tetapi karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi. Secara nasional permasalahan yang masih dihadapi adalah belum efektifnya dan optimalnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terkait ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi, waktu dan koordinasi antar program, masih adanya marjinalisasi pada penerima program, pelayanan dasar di daerah terisolir masih belum aktif, peran dan kapasitas TKPD belum optimal, belum optimalnya dukungan dari kebijakan makro dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengakses pelayanan dasar.

Namun, masih ada pihak yang salah memahami kemiskinan dengan pengertian yang paling sederhana yakni hanya sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan serta tidak terpenuhinya kebutuhan materi sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan Kabupaten Gayo Lues merupakan masalah yang sangat kompleks terutama dari faktor penyebabnya baik menyangkut kesejahteraan maupun pola pikir (*mindset*), aksesibilitas terhadap fasilitas publik, serta dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan itu sendiri. Terdapat begitu beragamnya dimensi yang menyangkut masalah kemiskinan yang dibarengi dengan beragamnya potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin yang menumbuhkan adanya kerumitan, dimana setiap faktor saling terkait dan mempengaruhi sehingga untuk menyelesaikannya perlu dilaksanakan sebuah program yang komprehensif dan berkelanjutan.

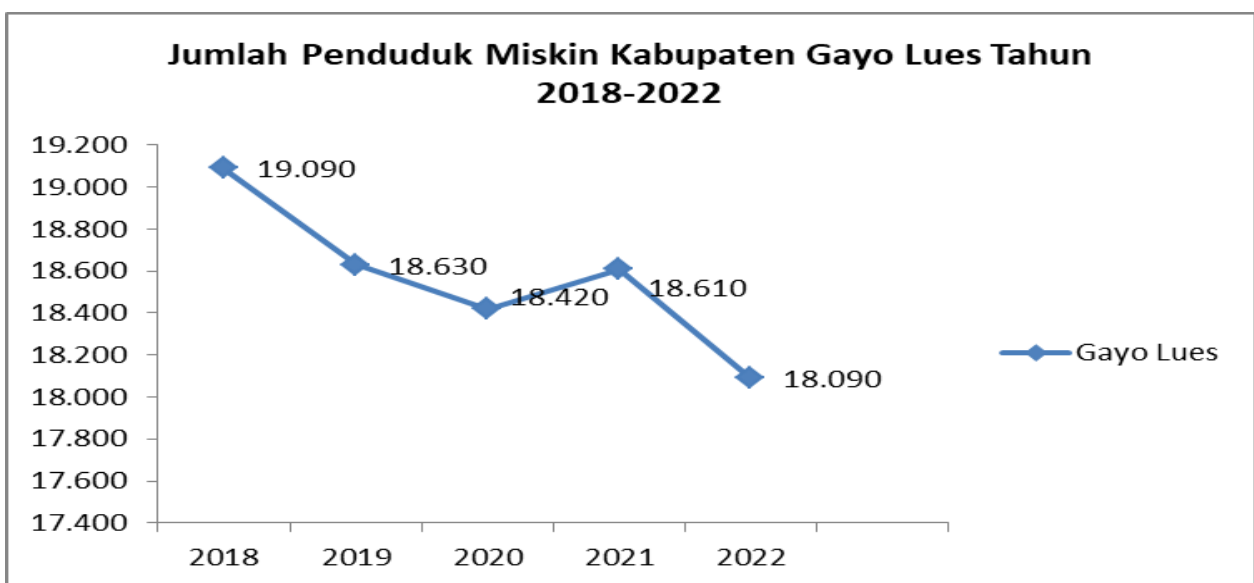
Berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) RI Tahun 2022 menunjukkan Aceh peringkat 4 di Sumatera dan Nasional peringkat 10 jumlah terbanyak penduduk miskin. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 806820 orang (14,64 persen), berkurang sebanyak 27.420 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2021 yang jumlahnya 834.240 jiwa (15,33 persen).

Gambar 1.1.



Kondisi yang sama terjadi pada Kabupaten Gayo Lues yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022. Penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Gayo Lues sebesar 520 jiwa.

Gambar 1.2.



Sumber: BPS

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010, penyusunan RPKD di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang pengkoordinasian penyusunannya menjadi tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dokumen RPKD melalui proses konsultasi dan uji publik dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk menghasilkan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Gayo Lues yang berkualitas dan dapat mempertajam kualitas dokumen perencanaan pembangunan regular daerah, dapat dilakukan melalui pendekatan

penguatan dan intervensi terhadap proses/tahapan penyusunan dokumen, serta penguatan substansi dan integrasi dokumen.

Pemerintah beritikad mencari formulasi yang tepat untuk membangun Gayo Lues, agar masalah kemiskinan di Gayo Lues bisa dituntaskan, dibutuhkan kerja keras dari semua komponen, terutama pada level pengambil kebijakan. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini memiliki kelemahan maupun keberhasilan. Untuk kedepannya pemerintah berupaya menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik dari sisi paradigma, anggaran, maupun instrumen program penanggulangan kemiskinan. Untuk itu dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Gayo Lues, maka disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh Tahun 2023-2026

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1. Maksud**

Maksud dari Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gayo Lues adalah:

- a. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja di daerah.
- b. Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja pelaksana dalam menyusun perencanaan kerja yang pro poor yang mempercepat penanggulangan kemiskinan.
- c. Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.
- d. Mengkoordinasikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di tiap satuan kerja.

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gayo Lues Adalah:

- a. Memformulasikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan sehingga menghasilkan prioritas penanggulangan kemiskinan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- b. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha, Lembaga Internasional, dan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues;

- c. Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota serta pihak lainnya di Gayo Lues;
- d. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gayo Lues dan pencapaian tujuan pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG's) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan;
- f. Mewujudkan dokumen perencanaan sebagai payung kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah, didayagunakan untuk menyusun langkah (rencana aksi) yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinasi yang lebih mantap, komprehensif, sinergis, akseleratif dan berkelanjutan.

### **1.3. ACUAN KEBIJAKAN**

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan perundangan ini merupakan penjabaran pengakuan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana khusus Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;
15. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.

#### **1.4. METODE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPKD**

Adapun sistematika dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Gayo Lues ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020

tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Bagian I: Pendahuluan**

Bagian ini berisi latar belakang kemiskinan, landasan kebijakan mengenai peranan TKPK dan penyusunan dokumen RPKD, tujuan dan manfaat RPKD, serta sistematika penulisan dokumen RPKD itu sendiri.

#### **Bagian II: Kondisi Umum Kabupaten Gayo Lues**

Pada bagian ini membahas kondisi umum Gayo Lues yang terdiri dari kondisi Geografi dan Demografi Wilayah, Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.

#### **Bagian III: Profil Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues**

Pada bagian ini membahas kondisi kemiskinan Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari Konsep Kemiskinan dan Kondisi Umum Kemiskinan Gayo Lues.

#### **Bagian IV: Prioritas Program**

Pada bagian ini membahas prioritas intervensi kebijakan yang dilakukan dengan menganalisis determinan kemiskinan (masalah pokok kemiskinan) dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan. Determinan kemiskinan secara umum terkait dengan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar yang lain.

#### **Bagian V: Lokasi Prioritas**

Pada bagian ini membahas tentang penentuan lokasi prioritas yang merupakan hasil analisis prioritas intervensi dan analisis keterkaitan

#### **Bagian VI: Penutup**

Pada bagian ini berisi harapan yang akan dicapai dengan penyusunan RPKD terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

## BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN GAYO LUES

### 2.1. GEOGRAFIS, TOPOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1. Geografis

Kabupaten Gayo Lues terletak pada posisi garis lintang 03° 40'26" - 04° 16'55" LU dan garis bujur 96° 43' 24" - 97° 55' 24" BT, dengan ibu kota Blangkejeren memiliki luas wilayah 5.549,91 Km<sup>2</sup> atau 10% dari luas Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Timur; sebelah Timur berbatasan dengan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Letak geografis ini menjadikan Kabupaten Gayo Lues memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan politik yang erat dengan kabupaten lain di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim, 148 desa (Tabel 2.1.)

Tabel 2.1.  
Nama dan Luas Kecamatan Kabupaten Gayo Lues, 2021

No	Kecamatan	Jumlah		Luas	
		Mukim	Desa	Km <sup>2</sup>	%
1.	Kuta Panjang	2	12	269,53	4,86
2.	Blangjerango	2	10	382,42	6,89
3.	Blangkejeren	3	22	166,06	2,99
4.	Putri Betung	2	13	996,85	17,96
5.	Dabun Gelang	2	11	444,71	8,01
6.	Blang Pegayon	2	12	272,18	4,9
7.	Pining	2	9	1.350,09	24,33
8.	Rikit Gaib	2	13	264,08	4,76
9.	Pantan Cuaca	2	11	295,06	5,32
10.	Terangun	4	25	671,8	12,1
11.	Tripe Jaya	2	10	437,13	7,88
	Gayo Lues	25	148	5.549,91	100

Sumber: Profil Statistik Sektorial 2022 Kabupaten Gayo Lues

#### 2.1.2. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Gayo Lues terklasifikasi dalam tiga kawasan meliputi 36,67 persen merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL); 33,94 persen merupakan kawasan Hutan Lindung; dan sisa wilayahnya merupakan kawasan Budidaya, Pemukiman, dan Hutan Produksi yang mencapai 29,39 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa luas Kabupaten Gayo Lues sebagian besar tertutupi oleh Taman Nasional dan Hutan Lindung yang mencapai 70,61 persen.

Kabupaten Gayo Lues terletak pada ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut.

Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000-1.500 dpl yaitu seluas 175.944,16 hektar atau 31,70 persen disusul ketinggian 1.500-2.000 dpl yaitu seluas 135.293,80 hektar atau 24,38 persen. Sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian > 3.000 yaitu 3.387,44 Hektar atau sekitar 0,61 persen. Lebih jelasnya mengenai ketinggian tempat dapat dilihat Tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Gayo Lues, 2021

No	Ketinggian Tempat (mdpl)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1.	100-500	22.661,56	4,08
2.	500-1000	115.955,36	20,89
3.	1000-1500	175.944,16	31,70
4.	1500-2000	135.293,80	24,38
5.	2000-2500	75.571,01	13,62
6.	2500-3000	26.177,73	4,72
7.	>3000	3.387,44	0,61
Jumlah/Total		554.991,06	100,00

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2022

Dilihat dari kelerengan Kabupaten Gayo Lues mempunyai bentuk wilayah yang beragam mulai dari datar (kemiringan 0-3%) sampai bergunung (kemiringan diatas 40%). Sebagian wilayah kabupaten ini mempunyai kemiringan yang ekstrem dengan bentuk wilayah bergunung (kemiringan diatas 40%) yaitu dengan luas 243.788,07 hektar atau 43,93 persen, dan hanya mempunyai luas wilayah yang relatif kecil dengan kemiringan lereng 0-3 persen (datar) yaitu 967,42 hektar atau 0,17 persen.

Tabel 2.3.  
Kemiringan Lahan, Bentuk dan Luas Wilayah Kabupaten Gayo Lues, 2021

Kemiringan Lereng (%)	Bentuk wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
00-03	Datar	967,42	0,17
03-08	Landai	42.019,39	7,57
08-15	Berombak	45.591,20	8,21
15-25	Bergelombang	128.601,43	23,17
25-40	Berbukit	94.024,51	16,94
>40	Bergunung	243.788,07	43,93
Jumlah		554.991,06	100,00

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2022

Wilayah Kabupaten Gayo Lues tersusun dari berbagai jenis formasi batuan. Susunan batuan di sebelah tengah dan utara terdiri dari Farmasi Batu Gamping. Sedangkan susunan Batu Granit letaknya menyebar. Susunan yang mendominasi adalah Formasi Rampong. Pada bagian selatan tersusun oleh Formasi Alas, dan Formasi Leuser. Adapun, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari tanah alluvial hidromof, hidromof kelabu, podsolik merah kuning, latosol dan podsolik coklat. Di lahan-lahan yang dijadikan persawahan didominasi oleh

jenis tanah alluvial hidromof dan hidromof kelabu, sedangkan pada daerah pegunungan jenis tanah pada umumnya adalah latosol, podsolik merah kuning dan kambisol. Jenis tanah podsolik merah kuning adalah jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Gayo Lues yaitu mencapai 4 033,65 Km<sup>2</sup> atau 72,68 persen dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan hidromof kelabu adalah yang terkecil luasannya yaitu 72,74 Km<sup>2</sup> atau 1,31 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Jenis Tanah Kabupaten Gayo Lues Menurut Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Alluvial Hidromof	84,65	1,53
2.	Hidromof Kelabu	72,74	1,31
3.	Kambisol	857,03	15,44
4.	Latosol	133,33	2,40
5.	Podsolik Merah Kuning	4.033,65	72,68
6.	Podsolik Coklat	368,51	6,64
<b>Jumlah</b>		<b>5.549,91</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2022

### 2.1.3. Demografi

Penduduk Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beberapa suku antara lain, suku Gayo, Alas, Jawa, Minang, Batak dan suku lainnya dalam jumlah kecil. Jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 sebanyak 103.131 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Blangkejeren yang merupakan Ibukota Kabupaten Gayo Lues sebanyak 32.423 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pantan Cuaca sebanyak 4.490 jiwa.

Pada tahun 2022 kepadatan penduduk tercatat sebesar 18,58 jiwa/Km<sup>2</sup>. Penduduk Kabupaten Gayo Lues tersebar pada 11 kecamatan dengan angka kepadatan penduduk bervariasi. Kecamatan Blangkejeren mempunyai angka kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebanyak 195,25 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pining yaitu 3,88 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan tersebut merupakan kepadatan kotor atau jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kepadatan seharusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas permukiman. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues, 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk 000 (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Kuta Panjang	9,741	36,14
Blang Jerango	7,500	19,61
Blangkejeren	32,423	195,25
Putri Betung	9,657	9,69
Dabun Gelang	7,051	15,86
Blang Pegayon	6,641	24,40
Pining	5,239	3,88
Rikit Gaib	4,650	17,61



Kecamatan	Jumlah Penduduk 000 (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Pantan Cuaca	4,490	15,22
Terangun	9,816	14,61
Tripe Jaya	5,923	13,55
<b>Jumlah</b>	<b>103,131</b>	<b>18,58</b>

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2023

Struktur umur penduduk Kabupaten Gayo Lues masih berbentuk piramida yang menggambarkan jumlah penduduk yang berumur lebih kecil lebih banyak dibandingkan yang berumur lebih tua. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Gayo Lues terdiri dari Balita (0-4 tahun) 10.213 jiwa, anak-anak (5-14 Tahun) sebanyak 19.183 jiwa dan Pemuda (15-24) sebanyak 18.962 jiwa, dewasa (25-39 tahun) sebanyak 26.588 jiwa, tua (40-64 tahun) sebanyak 24.009 jiwa dan penduduk lanjut usia (65 tahun keatas) mencapai 4.135 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Di Kabupaten Gayo Lues, 2022

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
0-4	5.224	4.989	10.213
5-9	5.092	4.958	10.050
10-14	4.596	4.537	9.133
15-19	4.696	4.468	9.164
20-24	4.934	4.860	9.798
25-29	4.687	4.770	9.457
30-34	4.544	4.378	8.922
35-39	4.237	3.972	8.209
40-44	3.548	3.541	7.089
45-49	3.048	2.821	5.869
50-54	2.392	2.412	4.804
55-59	1.695	1.810	3.505
60-64	1.315	1.427	2.742
65-69	796	851	1.620
70-74	531	657	1.188
75+	545	827	1.372
<b>Jumlah</b>	<b>51.853</b>	<b>51.278</b>	<b>103.131</b>

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2023

## 2.2. EKONOMI

### 2.2.1. Pertumbuhan Dan Struktur Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Gayo Lues tahun 2022 mencapai 3,51 persen mengalami kenaikan dari tahun tahun 2021 dengan capaian sebesar 2,32 persen. Kondisi terendah laju pertumbuhan PDRB terjadi pada tahun 2019 yang hanya berkisar pada 0,88 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh kategori Jasa Lainnya sebesar 11,83 persen. Secara keseluruhan kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang mencatat penurunan (pertumbuhan negatif). Penurunan pertumbuhan ekonomi kategori Jasa Keuangan dan Asuransi salah satu penyebabnya diduga adalah penarikan pengelolaan dana otonomi khusus 100% Kembali ke Pemerintah Provinsi dan disebabkan oleh pemulihan pasca Pandemi Covid 19.

Tabel 2.7.

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gayo Lues (Persen), 2018 – 2022

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-4,32	-0,95	3,92	0,37	4,19
B. Pertambangan dan Pengalihan	-15,32	-0,71	0,91	0,10	0,19
C. Industri Pengolahan	7,47	-3,79	-1,70	3,42	4,01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,40	6,93	4,50	1,94	3,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,31	14,27	1,69	2,04	8,13
F. Konstruksi	5,03	0,58	0,54	1,38	0,43
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,89	4,87	-0,99	2,55	3,87
H. transportasi dan Pergudangan	2,00	-0,06	-21,41	18,24	4,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,53	27,05	-8,13	0,03	8,11
J. Informasi dan Komunikasi	2,70	7,16	13,76	9,62	8,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	13,01	0,52	-5,37	-5,56
L. Real Estate	6,09	7,40	0,11	0,28	1,41
M, N. Jasa Perusahaan	6,61	8,86	-8,76	1,66	2,17
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,13	0,39	-2,81	4,66	-0,02
P. Jasa Pendidikan	7,79	10,49	1,80	1,65	2,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	8,88	5,73	9,15	9,98
R, S, T, U. Jasa Lainnya	5,13	8,67	0,36	2,58	11,83
<b>PDRB</b>	<b>1,28</b>	<b>1,26</b>	<b>0,88</b>	<b>2,32</b>	<b>3,51</b>

Sumber: <https://gayolueskab.bps.go.id/>

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Gayo Lues belum bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kondisi ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues. Sumbangan terbesar dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 40,90 persen. Kategori

lainnya yang berada di atas 5 persen adalah Industri Pengolahan (11,02%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (10,55%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,33%) dan Konstruksi (9,45%). Sementara peranan kategori-kategori lainnya masih dibawah 5 persen.

Tabel 2.8.  
Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gayo Lues (Persen), 2018 – 2022

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39,09	38,25	39,42	39,73	40,90
B. Pertambangan dan Penggalian	1,30	1,29	1,29	1,24	1,25
C. Industri Pengolahan	12,14	10,75	10,64	10,79	11,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F. Konstruksi	9,98	10,03	10,04	9,87	9,45
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,99	11,33	10,99	10,55	10,33
H. transportasi dan Pergudangan	2,09	2,04	1,56	1,81	1,93
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,97	1,30	1,17	1,15	1,19
J. Informasi dan Komunikasi	1,10	1,16	1,31	1,36	1,38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,31	1,26	1,14	1,04
L. Real Estate	3,09	3,34	3,31	3,16	3,01
M, N. Jasa Perusahaan	0,17	0,18	0,16	0,16	0,16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	11,33	11,50	11,27	11,37	10,55
P. Jasa Pendidikan	2,60	3,04	3,00	2,92	2,84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,51	3,93	4,04	4,21	4,42
R, S, T, U. Jasa Lainnya	0,39	0,42	0,42	0,40	0,42
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://gayolueskab.bps.go.id/>

Melihat distribusi ini dapat ditarik asumsi bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Gayo Lues didominasi pada kategori pertanian, perdagangan, industri (terutama minyak serehwangi dan nilam), dan administrasi pemerintahan (aparatur negara). Masih banyaknya kategori yang memiliki peranan dibawah 2 persen menggambarkan bahwa kategori-kategori lapangan usaha tersebut masih sedikit yang menekuni dan penduduk Kabupaten Gayo Lues pun belum banyak

yang benar-benar menikmati jasa/layanan dan atau barang yang dihasilkan dari kategori-kategori tersebut.

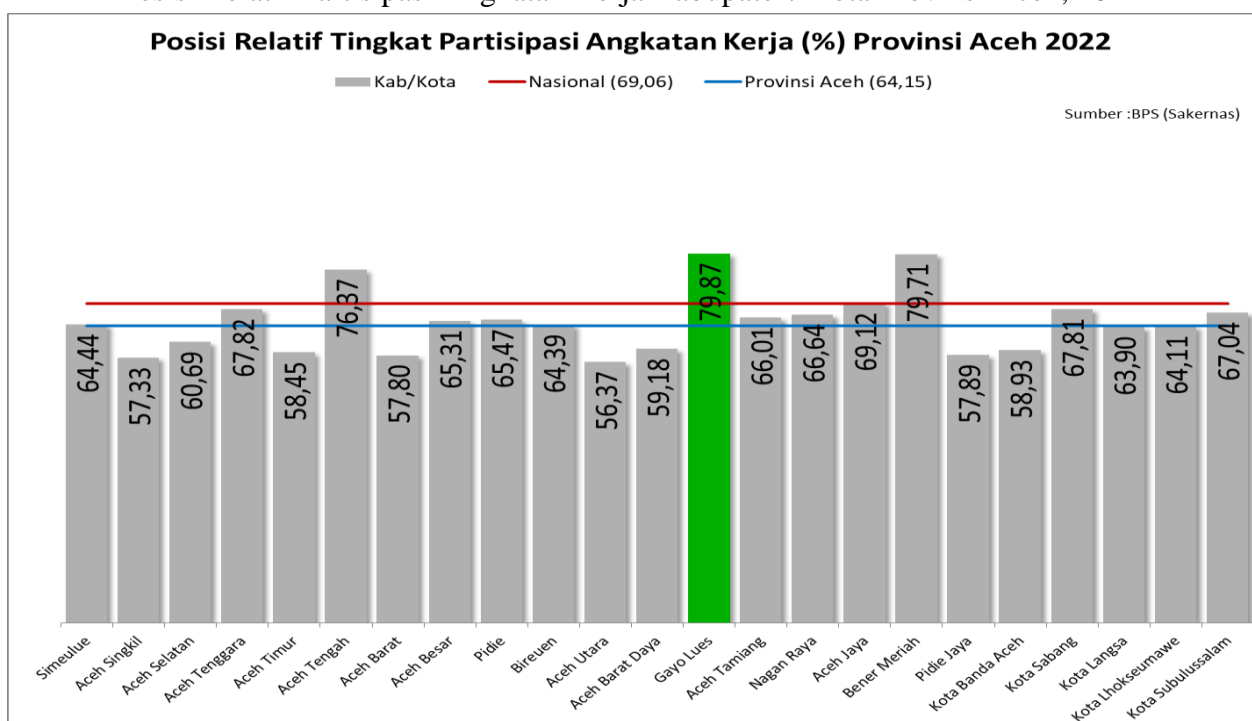
## 2.3. KETENAGAKERJAAN

### 2.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Posisi relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gayo Lues sebesar 79,87 persen pada tahun 2022 berada di atas rata-rata Nasional (69,06%) dan Provinsi Aceh (64,15%), ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Kabupaten Gayo Lues yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu lebih tinggi dari rata-rata Nasional dan Provinsi Aceh.

Gambar 2.1.

Posisi Relatif Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh, 2022



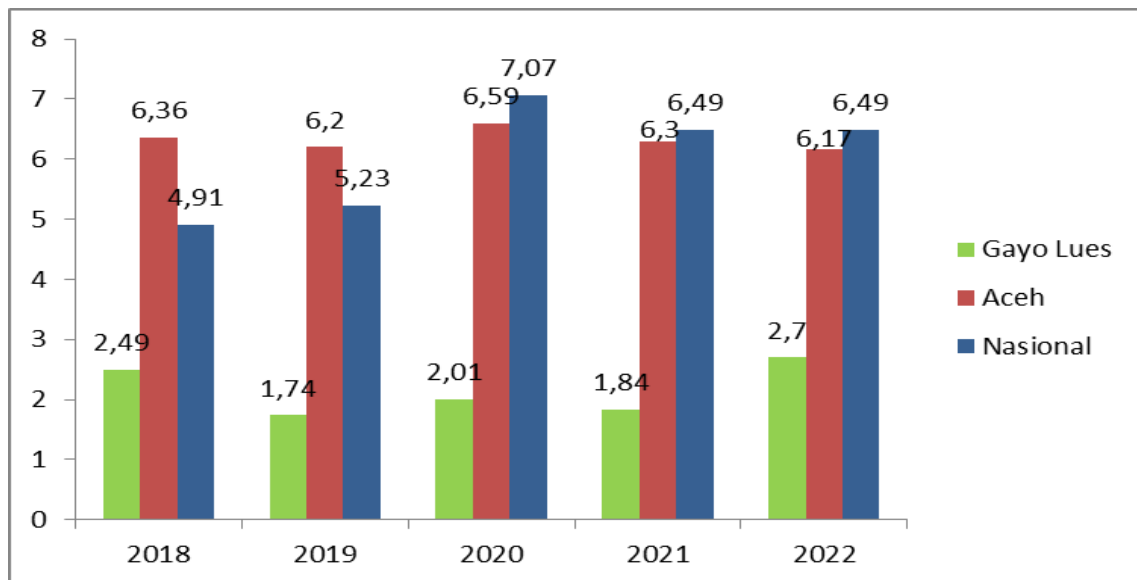
Sumber: Badan Pusat Statistik Gayo Lues dan Aceh

### 2.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka TPT Kabupaten Gayo Lues relatif rendah, karena angkanya di bawah 5 persen. TPT merupakan perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap total angkatan kerja. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gayo Lues 2.52 persen; yang mengalami penurunan dari tingkat pengangguran pada tahun 2019 sebesar 1,74 persen. Namun tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2.01 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 1.84.



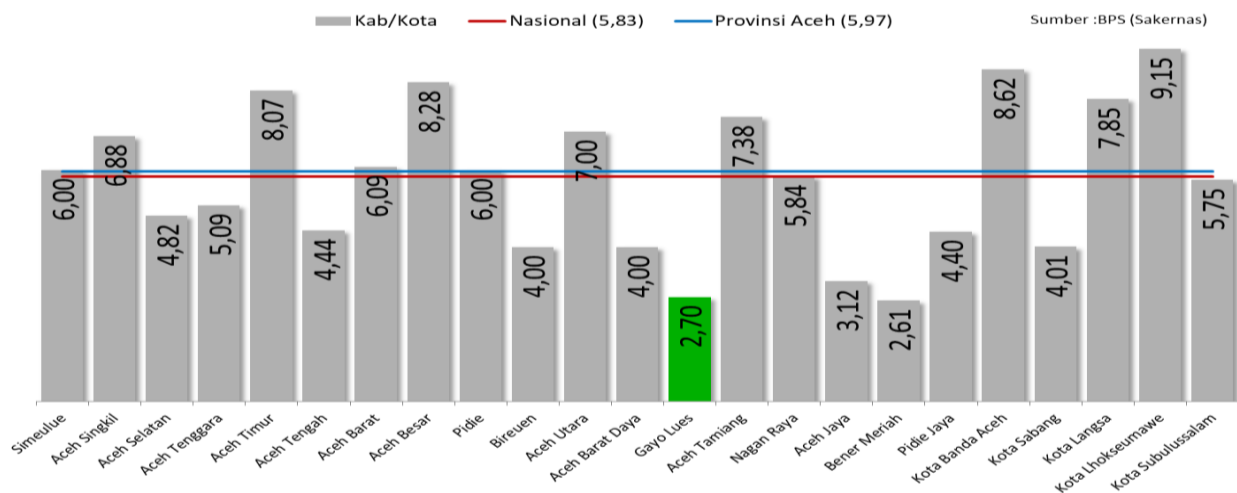
Gambar 2.2.  
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Gayo Lues, 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten/kota se Provinsi Aceh tahun 2022 dapat kita lihat pada grafik berikut:

Gambar 2.3.  
Posisi Relatif Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues

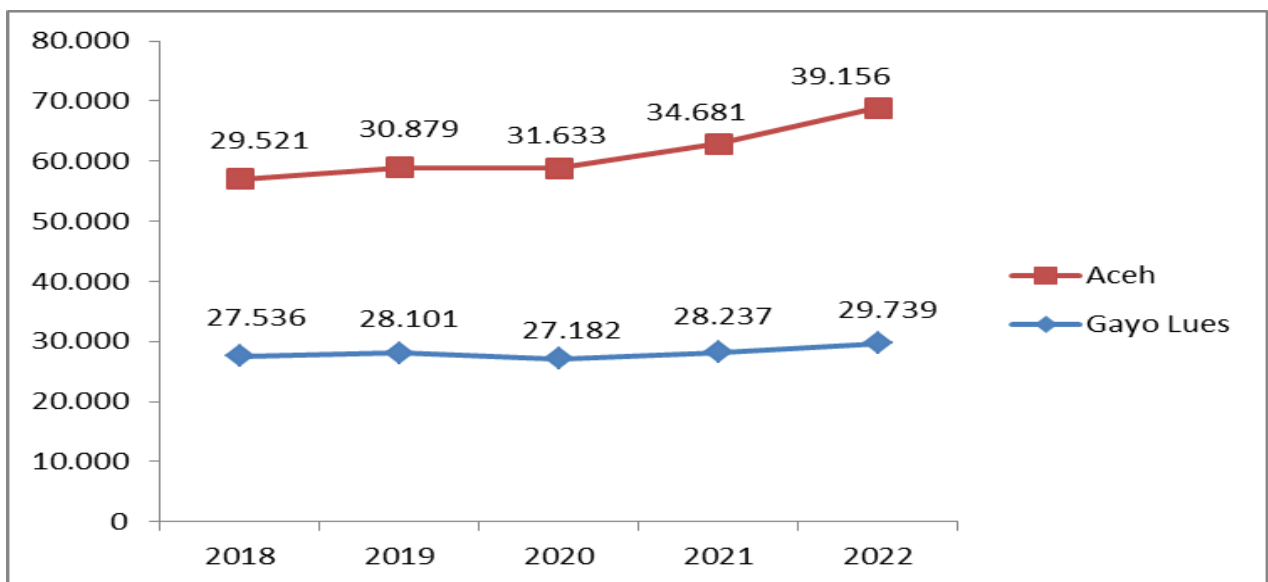
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa TPT Kabupaten Gayo Lues (2,70 %) merupakan salah satu kabupaten/kota yang TPT-nya masih dibawah rata-rata TPT Nasional (5,83%) dan Provinsi Aceh sebesar 5,97 persen. Kabupaten/kota yang mempunyai TPT tertinggi di Provinsi Aceh adalah Kotamadya Lhokseumawe yang angka penganggurannya mencapai 9,15 persen. Sayangnya, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut yang terus meningkat tidak dibarengi oleh perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gayo Lues ini tentu banyak faktor penyebabnya. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di Kabupaten Gayo Lues disebabkan juga oleh

beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah/kabupaten lain ke Kabupaten Gayo Lues untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja sesuai standart dunia kerja dan masih kurangminatnya pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.

#### 2.4. PENDAPATAN PERKAPITA

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang merupakan pembagian pendapatan suatu negara dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut menjadi lebih baik. Perkembangan PDRB Per kapita Gayo Lues dan Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4.  
PDRB Perkapita ADHB Gayo Lues dan Provinsi Aceh (Ribu Rupiah),  
Tahun 2018 - 2022



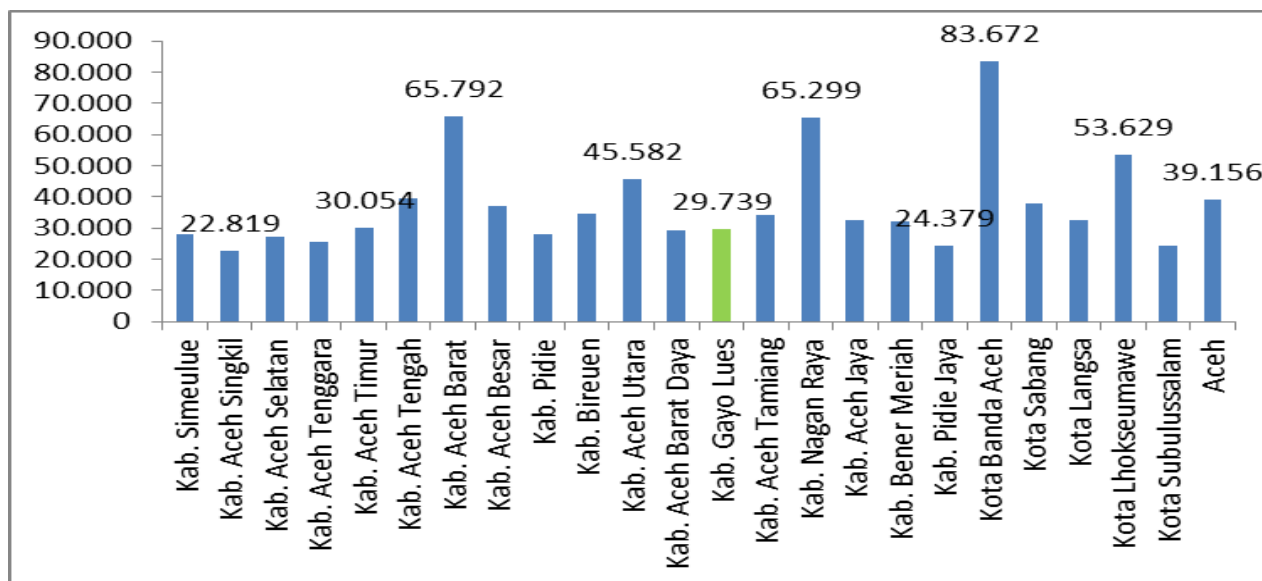
Sumber: BPS

PDRB ADHB perkapita Kabupaten Gayo Lues dan Provinsi Aceh cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2018 - 2022. Terlihat capaian tahun 2022 PDRB ADHB perkapita Gayo Lues sebesar Rp 29.000 ribu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp. 27.536. Hanya saja pada tahun 2020 PDRB ADHB perkapita Kabupaten Gayo Lues mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian Rp. 27.182 ribu. Sedangkan PDRB ADHB Perkapita Provinsi Aceh, jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hal ini terlihat pada Gambar 2.4.

Peningkatan pendapatan per-kapita Aceh dilakukan melalui meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi barang/jasa, menurunkan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kemampuan bidang teknologi dalam memproduksi barang/jasa dan dalam mengolah sendiri sumber daya alam.

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh tahun 2022 tertinggi dicapai oleh Kota Banda Aceh sebesar Rp 83.672 ribu dan diatas pencapaian rata-rata PDRB Perkapita Provinsi Aceh sebesar Rp 39.156 ribu.

Gambar 2.5.  
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh (Ribu Rupiah)  
Tahun 2022



Sumber: BPS

## 2.5. CAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERIODE 2017-2022

Capaian Penanggulangan Kemiskinan Periode 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada periode sebelumnya telah melakukan berbagai intervensi dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pada periode 2017-2022 telah dilaksanakan berbagai macam program pro rakyat yang terdiri dari, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin, pemberian bantuan bagi masyarakat lanjut usia beresiko tinggi, pelayanan Kesehatan masyarakat, pemberian bantuan melalui zakat, infaq dan shadaqah. Kegiatan ini berkontribusi dalam rangka pencapaian indikator makro daerah yang berkontribusi mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues, berikut dijabarkan capaian indikator makro Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022.

Tabel 2.9.  
Capaian Indikator Makro Pembangunan Gayo Lues Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMK 2017 - 2022				
		REALISASI CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	1,28	1,26	0,88	2,32
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	21,97	20,70	19,87	19,32	19,64
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,71	2,52	1,74	2,01	1,84

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMK 2017 - 2022				
		REALISASI CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	(%)					
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,01	65,88	66,87	67,22	67,56
5	Indeks Gini	0,30	0,32	0,29	0,28	0,26



### **BAB III**

## **PROFIL KEMISKINAN**

## **KABUPATEN GAYO LUES**

### **3.1. Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi Pemerintah Indonesia. Dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban menjamin kesejahteraan masyarakatnya melalui pendidikan dan juga pekerjaan yang layak. Permasalahan kemiskinan menjadi perhatian dan tanggung jawab tidak hanya Pemerintah Pusat namun juga peran Pemerintah Daerah sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional) yaitu dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks adalah dalam arti luas, tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Menurut World Bank, definisi kemiskinan adalah: "The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy. creative life and enjoy a decent standard of living freedom. self esteem and the respect of other". Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain. Kemiskinan sebagai suatu problema sosial telah merangsang kegiatan riset sebagai dasar untuk kebijakan pengentasan. Sudah ada berbagai kajian yang ditujukan untuk mengklasifikasikan orang miskin dan menganalisis penyebab kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith bahwa kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

- a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- b. Pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- c. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.
- d. Mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara dunia ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.
- f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Persoalan kemiskinan dapat dipahami lebih jauh dengan memunculkan beberapa kosakata standar dalam kajian kemiskinan Friedmann sebagai berikut:

1. Poverty line, tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial dan dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling murah berdasarkan income yang dua pertiganya digunakan untuk “keranjang pangan”.
2. Absolute and relative poverty, kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum yang tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan kemiskinan relatif sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok nonmiskin berdasarkan income relatif.
3. Deserving poor, kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-orang non-miskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan.
4. Target population. kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai objek. kebijakan serta program pemerintah. berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan. Anak-anak, buruh tani yang tak punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah serta penghuni kampung kumuh.

Apabila kemiskinan dilihat dari penyebab kemiskinan itu sendiri dibedakan menjadi empat meliputi:

1. Kemiskinan Individu, kemiskinan individu adalah yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja dan lain-lain.
2. Kemiskinan Alamiah, kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam; misalnya kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya masing-masing.

3. Kemiskinan Kultural, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, terlalu bergantung pada harta warisan dan lain-lain.
4. Kemiskinan Struktural, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem pemerintahan suatu negara.

Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006). Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. Semenjak itu, setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya terkait pangan dan gizi pada tahun 1978. Seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari.

Agar seseorang dapat hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak akan cukup, oleh karena itu perlu pula dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian serta aneka barang dan jasa lainnya. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan bukan makanan (BPS 2007). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh Ikhsan (1999) bahwa faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (human capital), modal fisik produktif (physical productive capital) status pekerjaan dan karakteristik desa.

Modal sumber daya manusia dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini. indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga dan jumlah anggota keluarga. Secara umum, semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Variabel modal fisik produktif antara lain luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk pertanian. Kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif, rumah tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan

yang lebih baik. Kepemilikan modal fisik dan kemampuan memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Komponen selanjutnya adalah status pekerjaan, di mana status pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola pendapatan rumah tangga. World Bank (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan.

### **3.1.1. Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan tidak hanya menyangkut tentang pendapatan tetapi juga menyangkut tentang aspek kehidupan lainnya. Kemiskinan di berbagai hal ini disebut dengan kemiskinan plural, kemiskinan dipahami dalam berbagai cara dengan pemahaman utamanya yang mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Mencari atau meneliti tentang penyebab miskin tidak mudah, berbagai penelitian dan seminar telah dilakukan dalam upaya meneliti, membahas dan mengevaluasi serta mencarikan langkah-langkah pemecahannya. Berikut ini beberapa pendapat para ahli dan lembaga tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan. Sedangkan menurut Mas'ood (2003) penyebab kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis yakni:

1. Kemiskinan Alamiah, kemiskinan timbul diakibatkan karena adanya kelangkaan sumber daya, kondisi tanah yang tandus, tidak ada pengairan dan kelangkaan prasarana.
2. Kemiskinan Buatan, kemiskinan ini timbul diakibatkan munculnya kelembagaan (seringkali akibat modernisasi atau pembangunan itu sendiri) yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (atau disebut juga dengan kemiskinan struktural).



Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan rendah dan produktivitas yang rendah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Oleh karena itu, mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-faktor yang berada dibalik kemiskinan tersebut.

Todaro (2006) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan. rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita.

Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita. Secara lebih khusus negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand menemukan bahwa kemiskinan dan ketidakmerataan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain produktivitas tenaga kerja yang rendah sebagai akibat rendahnya teknologi, penyediaan tanah dan modal jika dibanding dengan tenaga kerja tidak meratanya distribusi kekayaan terutama tanah.

Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas provinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga.

2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.
3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.
4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.
5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.

Maka dari itu untuk kasus di Indonesia diperkirakan ada empat faktor penyebab kemiskinan, faktor tersebut meliputi rendahnya taraf pendidikan, rendahnya taraf kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian. Sedangkan Asnawi (1994) menyatakan suatu keluarga menjadi miskin disebabkan oleh tiga faktor meliputi faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam dan faktor teknologi. Sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, dependensi ratio, nilai sikap, partisipasi, keterampilan pekerjaan dan semuanya itu tergantung kepada sosial budaya masyarakat itu sendiri. Kalau sosial budaya masyarakatnya masih terbelakang maka mutu sumber daya manusianya juga turut rendah, sebaliknya kalau sosial budaya modern sesuai dengan tuntutan pembangunan maka tinggilah mutu sumber daya manusia tersebut.

Menurut Daulay (2009) bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama yaitu (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata; (2) dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Pendapat Ginanjar (1996) bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (a) rendahnya taraf pendidikan; (b) rendahnya taraf kesehatan; (c) terbatasnya lapangan kerja; (d) kondisi keterisolasian; (e) sumber daya alam yang rendah; (f) teknologi dan unsur penduduknya yang rendah; (g) sumber daya manusia yang rendah; dan (h) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

### **3.1.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Menurut Bradshaw (2005) penyusunan kebijakan anti kemiskinan memerlukan kajian komprehensif terhadap berbagai faktor yang menentukan keberlanjutannya yaitu pelaku, proses, evaluasi dan dasar teori yang relevan. Kebijakan anti kemiskinan yang efektif memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam program-programnya. Terhadap hal ini Dasgupta (2003) menyatakan desain program penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

1. Spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus sesuai dengan institusi lokal
2. Relevan dengan permasalahan
3. Di dasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebab akibat tidak berdiri sendiri
4. Memahami konsekuensi yang tidak diinginkan
5. Berbasis sumber daya lokal

Agar berhasil program pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan strategi yang tepat. Menurut Pramanik dalam Hasan (2010) strategi program penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu (a) strategi tidak langsung yaitu suatu kerangka kebijakan makro untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan dan (b) strategi langsung yaitu suatu kerangka kebijakan mikro berupa penyediaan bantuan yang diperlukan oleh penduduk miskin untuk menjamin perolehan akses kredit perbaikan kondisi kesehatan dan peningkatan pendidikan. Keterpaduan dua strategi ini akan melahirkan kebijakan anti kemiskinan yang efektif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

#### *Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial*

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial. Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

### *Strategi 2: Meningkatkan Akses terhadap Pelayanan Dasar*

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

### *Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin*

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada penduduk miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin yang secara politik, sosial dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat) demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

#### *Strategi 4: Pembangunan Inklusif*

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan, fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar, selanjutnya diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti izin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan, setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional, pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

#### **3.1.3. Kerentanan Ekonomi**

Kerentanan ekonomi merupakan suatu kajian terhadap aspek spesifik yang menjadi kelemahan wilayah dan bisa meningkatkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja wilayah tersebut terutama yang berdampak pada pendapatan per kapitanya. Kerentanan ekonomi



ialah sebuah kondisi perekonomian yang rentan terhadap guncangan luar dan semakin meningkat akibat adanya keterbukaan ekonomi menurut Briguglio et al (2008). Kerentanan ekonomi pada dasarnya memiliki 2 konsep utama, yaitu kerentanan ekonomi mikro dan kerentanan ekonomi makro. Dari sudut pandang ekonomi mikro, kerentanan ekonomi berfokus pada dampak dari guncangan terhadap individu ataupun rumah tangga dimana pendapatan rumah tangga merupakan hal utama yang dapat mempengaruhi. Turunnya tingkat pendapatan rumah tangga menjadikan suatu rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yang lambat laun akan mengarah pada kemiskinan rumah tangga. Sedangkan dari sudut pandang makro, kerentanan ekonomi lebih berfokus pada dampak guncangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kerentanan ekonomi merupakan tingkatan untuk menggambarkan level kerentanan yang terdapat di suatu wilayah. Level ini digunakan untuk mengukur kadar kerentanan yang ada, sehingga nantinya akan memudahkan dalam pemberian rekomendasi sesuai dengan tingkat kerentanan yang dimiliki.

#### **3.1.4. Kesenjangan**

Kesenjangan ekonomi distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu: (1) kesenjangan antar daerah (2) kesenjangan antar sektor dan (3) kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat (Basri, 1995: 92). Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan yaitu Kurva Lorenz, Indeks Gini, kriteria Bank Dunia, Indeks Williamson.

Isu kesenjangan dan pertumbuhan hingga kini masih merupakan debat yang tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Menurut Kuncoro (2003:135) seringkali ada trade off antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Menurut World Bank (1990:55) antara pertumbuhan dan kemiskinan bukanlah suatu trade-off yang tidak dapat diatasi. Dengan kebijakan yang tepat, golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan jika mereka dapat melaksanakan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan akan konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terdapat berbagai tipe pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Penelitian dengan data silang tempat oleh Kuznetz (1955) diakui sebagai pelopor penelitian komparatif dalam distribusi pendapatan. Penelitian empiris Kuznetz mensintesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) yaitu pada awal ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata. Namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan makin merata.

### 3.2. Kondisi Kemiskinan Daerah

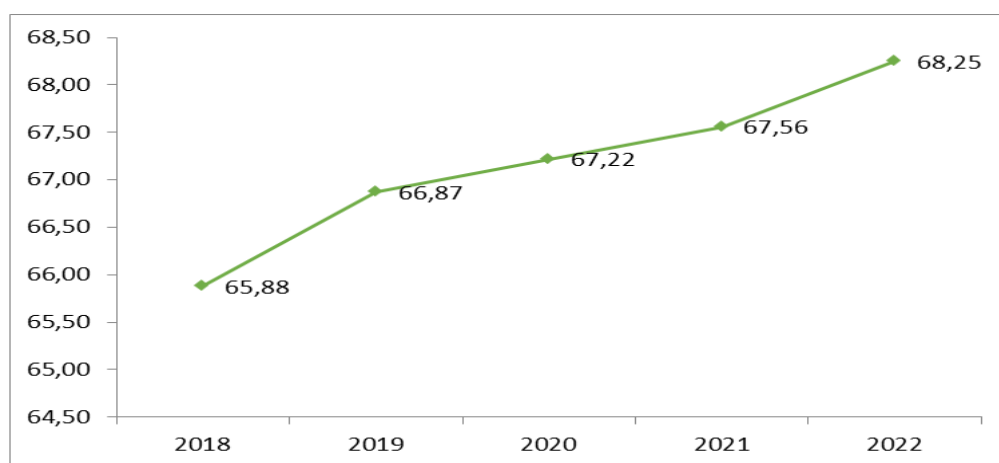
Pada masa lalu, pembangunan lebih diorientasikan pada usaha pemerintah untuk mengejar dan mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara menambah jumlah investasi-investasi baru yang pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan cara ini, diharapkan akan terjadi "Trickle Down Effects" atau efek tetesan. Kesejahteraan diasumsikan akan menetes sampai ke semua level sosial ekonomi masyarakat. Namun pendekatan yang hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi ternyata memiliki dampak yang kurang baik. Peningkatan pendapatan nasional tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Yang terjadi kemudian adalah pendapatan terdistribusi secara tidak merata, sehingga meskipun secara nasional perhitungan pendapatan lebih tinggi, mayoritas rumah tangga tetap berada pada keadaan sosial ekonomi yang buruk.

Oleh karena itu, banyak kritik yang terlontar dan mengatakan bahwa pembangunan yang lebih menekankan pada sisi peningkatan PDB akan berorientasi materialis dan mendorong masyarakat untuk terus memproduksi barang-barang tak berguna. Belajar dari pengalaman serta perkembangan pemikiran mengenai pengukuran keberhasilan pembangunan, maka United Nation Development Programme (UNDP) menyusun paradigma baru yang tidak hanya menonjolkan sisi material tetapi juga kemajuan-kemajuan yang terkait dengan sisi harkat kesejahteraan manusia. Kemudian dikenalkanlah paradigma pembangunan yang lebih berorientasi kepada human development center, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan.

Gambar 3.1.

Perkembangan IPM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018-2022



Sumber: BPS

Di samping pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan, pemerintah juga terus memperbaiki kebijakan yang terkait dengan isu pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur dan mengidentifikasi keberhasilan usaha mendorong sebanyak mungkin masyarakat ke tingkat kesejahteraan, maka pemerintah mengembangkan berbagai pendekatan perhitungan. Dalam usaha untuk melakukan pengukurannya tersebut, maka Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

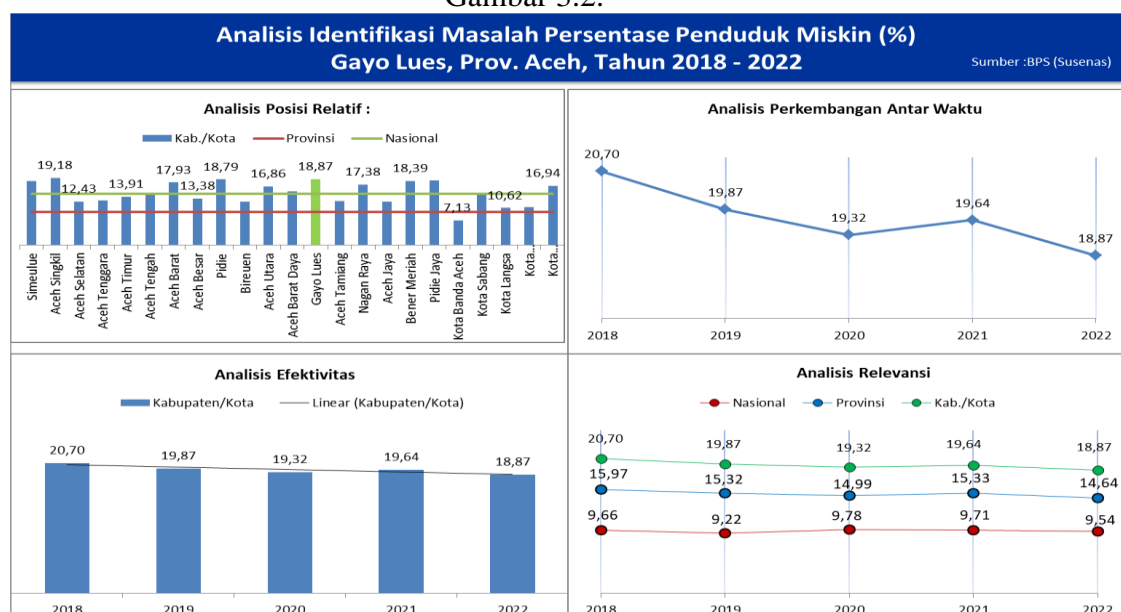
Untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan dan program tersebut, maka digunakan beberapa indikator statistik kemiskinan umum diantaranya:

### 1. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Tingkat kemiskinan atau sering juga disebut sebagai persentase penduduk miskin merupakan nilai yang menunjukkan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk disuatu wilayah.

Proporsi penduduk miskin terus mengalami penurunan tiap tahunnya pada tahun 2018-2020. Kenaikan terjadi pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 19,64 %. Akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan yang begitu signifikan dari penurunan pada tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 18,87 %. Walaupun demikian secara keseluruhan persentase penduduk miskin Kabupaten Gayo Lues selama lima tahun terakhir membentuk tren linier yang menurun, sehingga kondisi yang ada saat ini dapat dijadikan basis untuk meneruskan penurunan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang. Dengan catatan bahwa Kabupaten Gayo Lues dapat mempertahankan kecepatan penurunan persentase penduduk miskin dalam beberapa waktu terakhir.

Gambar 3.2.

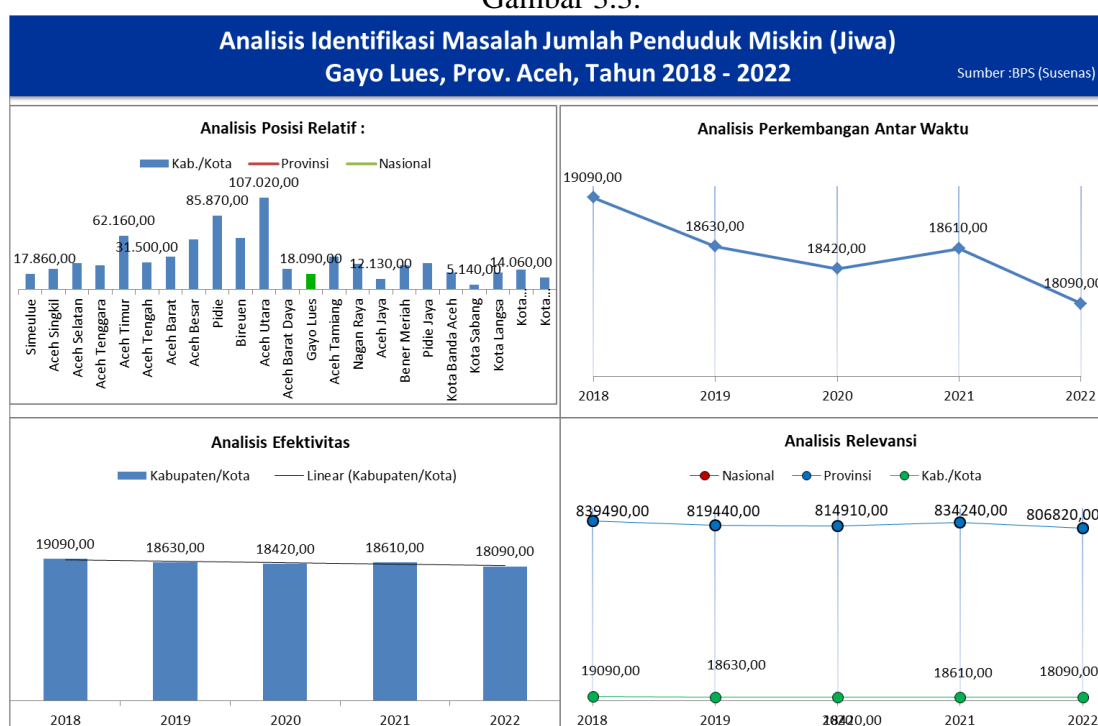


## 2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah tertentu dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Gayo Lues secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Gayo Lues terjadi kenaikan dengan capaian 18.610 jiwa dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan dengan capaian 18.090 jiwa.

Berdasarkan analisis posisi relatif Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 berada pada peringkat 19 dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Gayo Lues berada di bawah rata-rata jumlah penduduk miskin dari Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

Gambar 3.3.



## 3. Garis Kemiskinan

Metode yang digunakan dalam perhitungan kemiskinan ini didasarkan atas Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Untuk Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan garis kemiskinan ini kemudian akan diukur berapa banyak penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah standar nilai tersebut. Perbandingan dalam persentase antara jumlah penduduk yang pengeluarannya berada dibawah GK terhadap jumlah keseluruhan penduduk disebut sebagai Tingkat Kemiskinan. Oleh karenanya, permasalahan kemiskinan harus

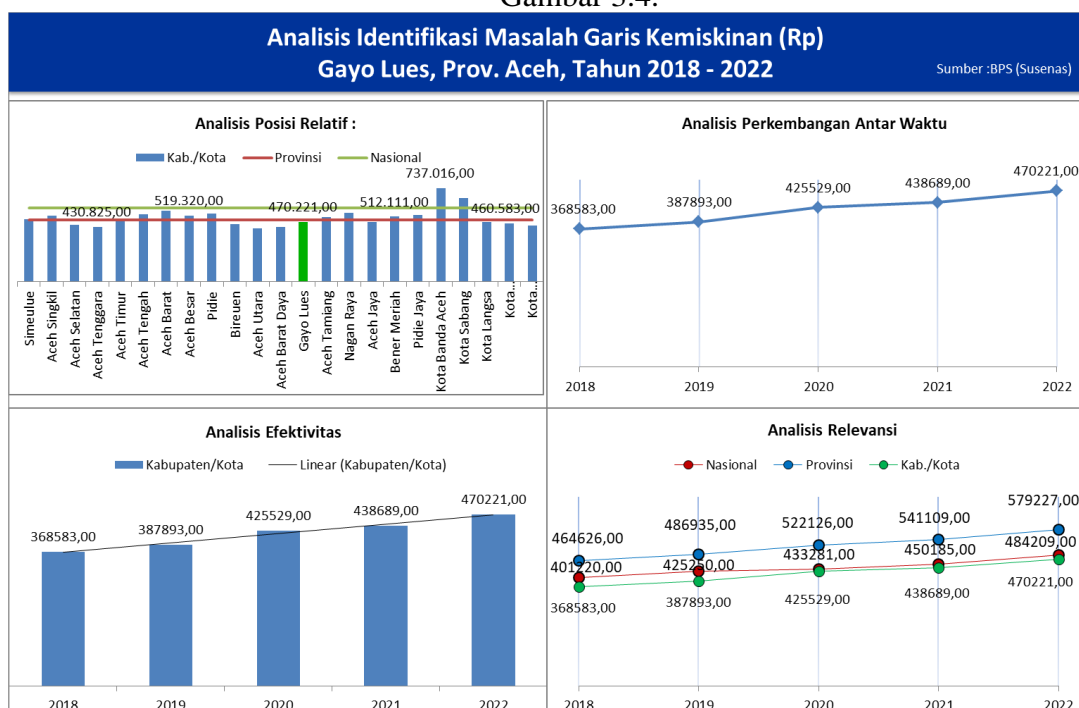
menjadi perhatian serius bagi pemerintah baik dipusat, maupun bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan program disusun dalam upaya mendorong sebanyak mungkin masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan dan kerentanan kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Gayo Lues tahun 2022 berada pada peringkat 14 diantara Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh. Garis kemiskinan (GK) menggambarkan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri atas komponen garis kemiskinan makanan dan non-makanan.

Pada tahun 2018, Garis kemiskinan Kabupaten Gayo Lues adalah Rp. 368.583 dan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 2021. Capaian Garis kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 sebesar Rp. 470.221 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya (2021) sebesar Rp. 438.689. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam upaya menjaga agar laju inflasi harus benar-benar dalam kendali Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan perlu memastikan agar harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin khususnya harus murah, terjangkau dan tersedia.

Capaian garis kemiskinan Kabupaten Gayo Lues tahun 2022 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh berada pada peringkat 14. Kota Banda menjadi Kabupaten/Kota tertinggi tingkat capaian garis kemiskinan yaitu sebesar Rp. 737.016 dan terendah dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp. 420.615.

Gambar 3.4.



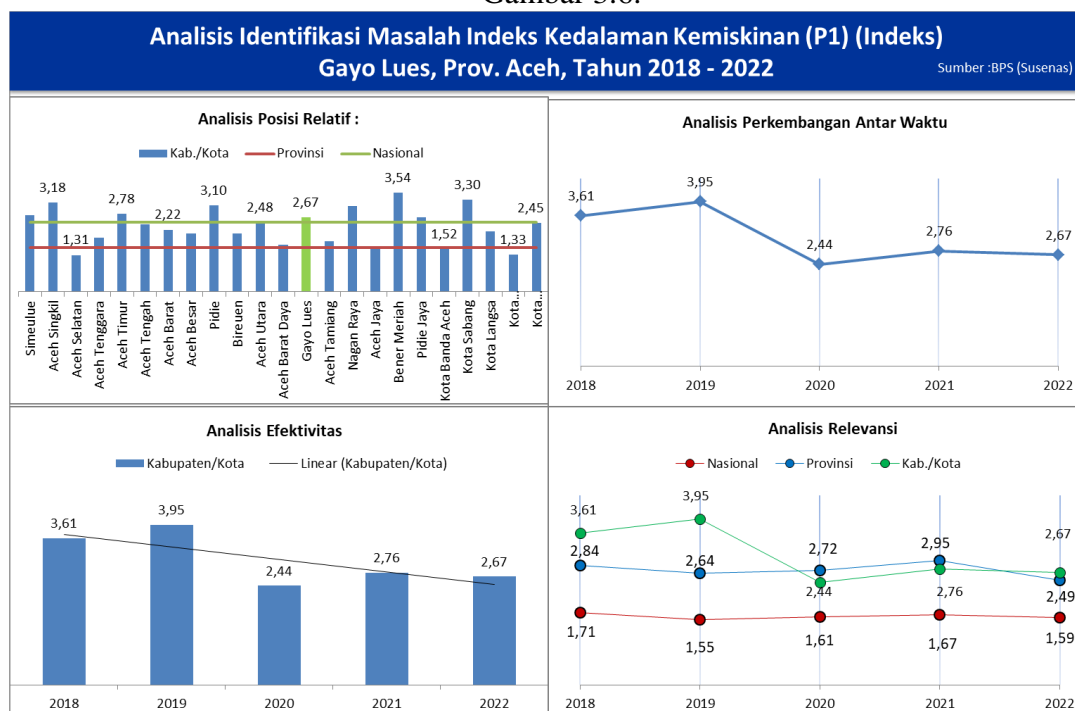


#### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gayo Lues mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2022 mencapai 2,67 menurun dibandingkan dengan tahun 2021 (2,76). Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2019 yang memiliki capaian indeks kedalaman tertinggi pada periode lima tahun terakhir sebesar 3,95.

Posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gayo Lues jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berada pada peringkat 8. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bener Meriah (3,54) dan terendah dicapai Kabupaten Aceh Selatan (1,31).

Gambar 3.6.



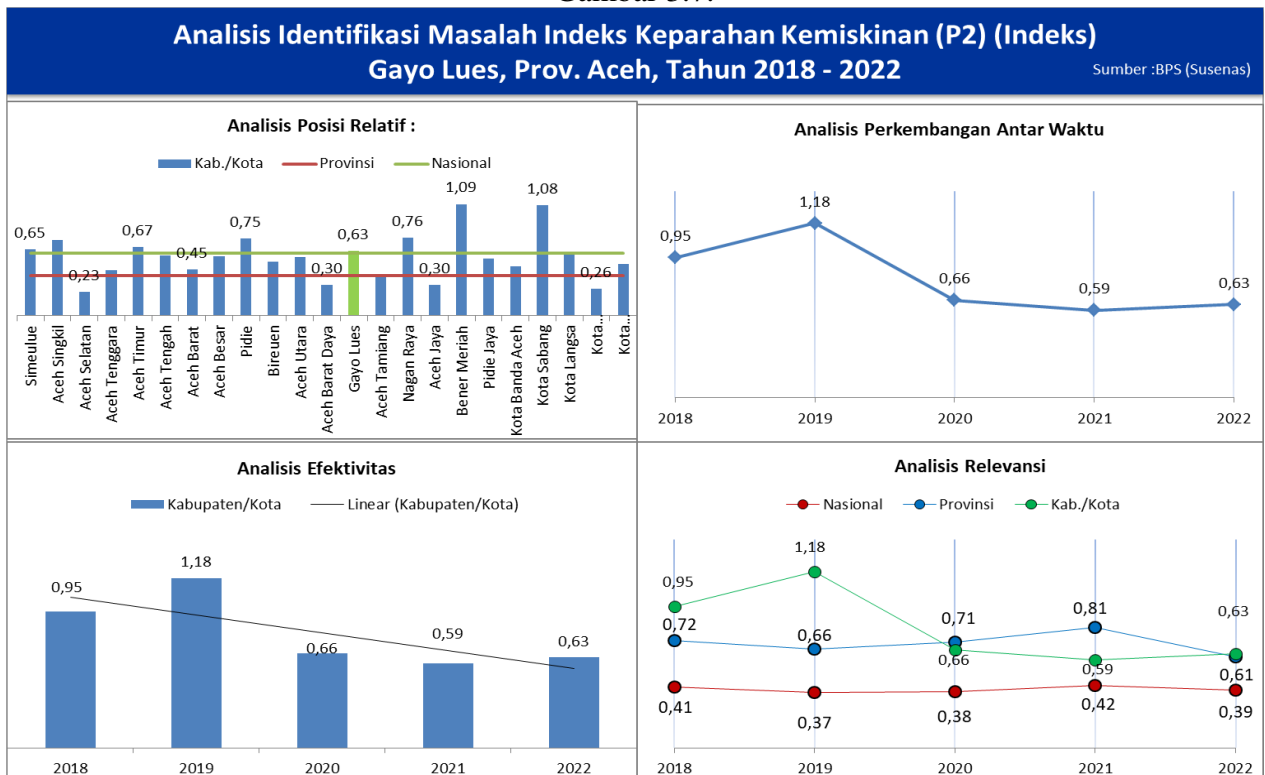
#### 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, untuk indeks keparahan kemiskinan juga berfluktuatif dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2016 Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gayo Lues mencapai 0,95 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,63. Pada periode lima tahun terakhir ini, tahun 2019 memiliki tingkat capaian indeks keparahan kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya yaitu mencapai 1,18.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh capaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 berada pada peringkat 8. Capaian indeks

keparahan tertinggi berada pada Kabupaten Bener Meriah (1,09) dan terendah dicapai oleh Kabupaten Aceh Selatan (0,23).

Gambar 3.7.



### 3.3. Identifikasi Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Gayo Lues

#### a. Perilaku Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

Karakteristik wilayah sangat mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat Aceh khususnya Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues terdiri atas 11 Kecamatan dan 148 desa dengan luas wilayah 5549,91 Km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Pining merupakan daerah terluas yaitu 1350,09 Km<sup>2</sup> atau sebesar 24,33 % dari total luas Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan Kecamatan Blangkejeren merupakan daerah terkecil dengan luas 166,06 Km<sup>2</sup> atau sebesar 2,99 % dari total luas Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan Pining dan Kecamatan Tripe Jaya memiliki jarak terjauh dari Ibu kota Kabupaten yaitu sejauh 55 Km.

Ditinjau dari sisi topografi wilayah, Kabupaten Gayo Lues terletak pada ketinggian 100-3.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl yaitu seluas 175.944,16 hektar atau 31,70 persen, sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian >3.000 yaitu 3.387,44 hektar atau sekitar 0,61 persen. Ketinggian dan Karakteristik bentang lahan yang sangat variatif dengan dominasi berbukit hingga bergunung menjadi inspirasi sebutan Kabupaten Gayo Lues sebagai Negeri Seribu Bukit.

Tipe iklim wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut Mohr, Schmidt dan Ferguson termasuk Iklim B (basah). Iklim Kabupaten Gayo Lues lebih basah jika dibandingkan dengan bagian utara Provinsi Aceh. Hal ini akibat pengaruh letak Kabupaten Gayo Lues di daerah medium sampai tinggi serta tingkat kerapatan vegetasi yang masih tinggi menyebabkan daerah

ini memiliki curah hujan relatif tinggi. Rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Gayo Lues adalah 27 °C. Bulan terpanas terjadi pada Bulan Maret-Mei yaitu berkisar 30 °C, sedangkan Bulan September-Desember merupakan bulan-bulan dengan suhu terendah, dengan suhu udara berkisar 25 °C. Kelembaban udara di Kabupaten Gayo Lues cukup tinggi yaitu berkisar 84-89 persen dengan rata-rata dalam 10 tahun terakhir 86,6 persen.

Pola ruang wilayah sebagaimana amanah Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues 2012-2032, Luas Hutan Lindung ditetapkan 480.635,94 ha (71,24 persen) dan Kawasan Budidaya dengan seluas 1.599,59 km (28 persen). Apabila dijumlahkan secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km.

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Gayo Lues mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, longsor, Kebakaran lahan, dan kecelakaan transportasi. Longsor pada umumnya terjadi pada topografi curam akibat menurunnya kemampuan tanah menyimpan dan menahan air sehingga pada saat intensitas curah hujan di atasnya tinggi terjadi perpindahan massa tanah (*landslide*) dengan volume yang tinggi.

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Gayo Lues berada di Kecamatan Putri Betung yaitu 3 kali sepanjang tahun 2021, Semua kampung sepanjang jalan nasional ruas Blangkejeren-Kutacane rawan longsor, Kecamatan Pantan Cuaca Desa Ise-Ise dan Tangsaran, Kecamatan Dabun Gelang Kendawi dan Bur Badak, Kecamatan Pining Desa Pining, Desa Lesten, Desa Pertik, Desa Ekan, Desa Pasir Putih, Kecamatan Tripe Jaya Desa Uyem Beriring. Sepanjang tahun 2021, bencana banjir paling sering terjadi di Kecamatan Blangkejeren, Pining dan Terangun. Sedangkan bencana kebakaran paling sering terjadi Kecamatan Kuta Panjang dan Blangkejeren.

Masyarakat Kabupaten Gayo Lues merupakan masyarakat yang religious (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berkeinginan memperkuat Dinul Islam dengan menciptakan seribu hafiz yang dijadikan sebagai prioritas pembangunan Tahun 2017-2022. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues didasarkan pada norma-norma Islami, yang karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Berkaitan dengan hal tersebut maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan, karakter dan prilaku dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesehajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nangroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan

upacara-upacara adat lainnya. Wali Nangroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat pada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang berkriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Gayo Lues didasarkan pada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk:

1. Menata kawasan strategis di Kabupaten Gayo Lues menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
2. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
3. Meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan;
4. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

#### **b. Permasalahan Kemiskinan Bidang Urusan Kabupaten Gayo Lues**

Seperti yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya, pengukuran kemiskinan diukur melalui Persentase Penduduk Miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Dimana kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Gayo Lues ini dapat diidentifikasi dari beberapa permasalahan per urusan yang ada yang juga menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan daerah.

#### **3.3.1. Bidang Pendidikan**

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

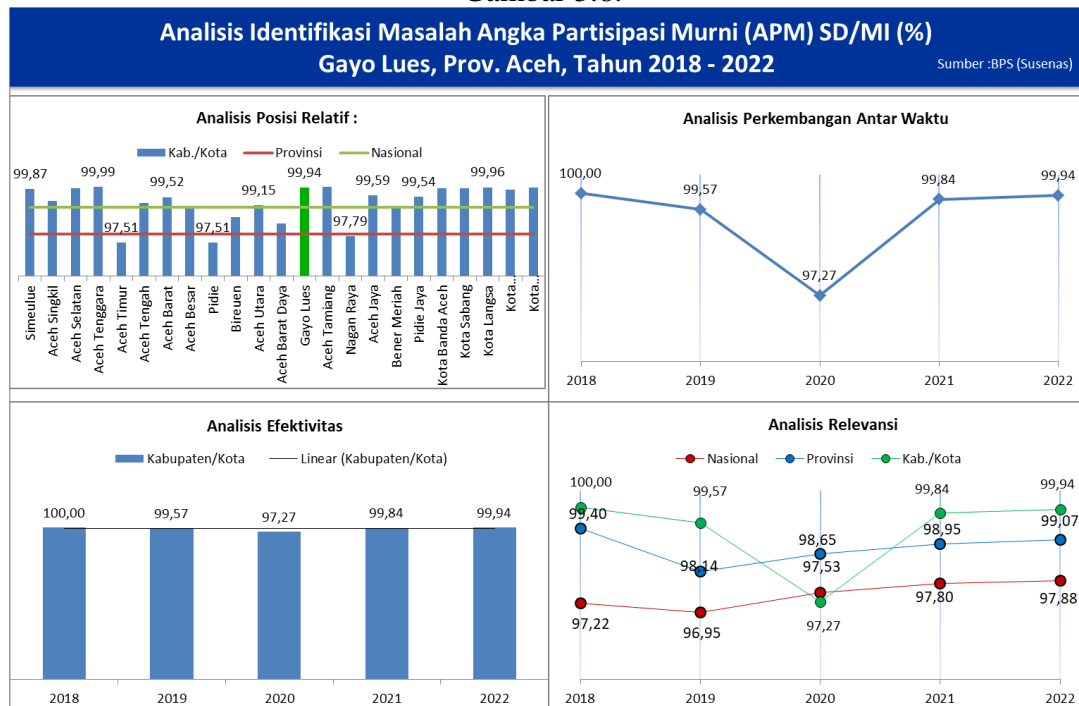
#### ***Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI)***

Angka Partisipasi Murni pendidikan merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usia, indikator ini akan menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2022, capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI) Kabupaten Gayo Lues adalah 99,94%. Capaian ini lebih baik dari capaian Provinsi Aceh (99,07%) dan Nasional (97,88). Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SD/MI

Kabupaten Gayo Lues memiliki tren fluktuatif. Kondisi terendah pada lima tahun terakhir tercapai pada tahun 2020 sebesar 97,27%.

Gambar 3.8.



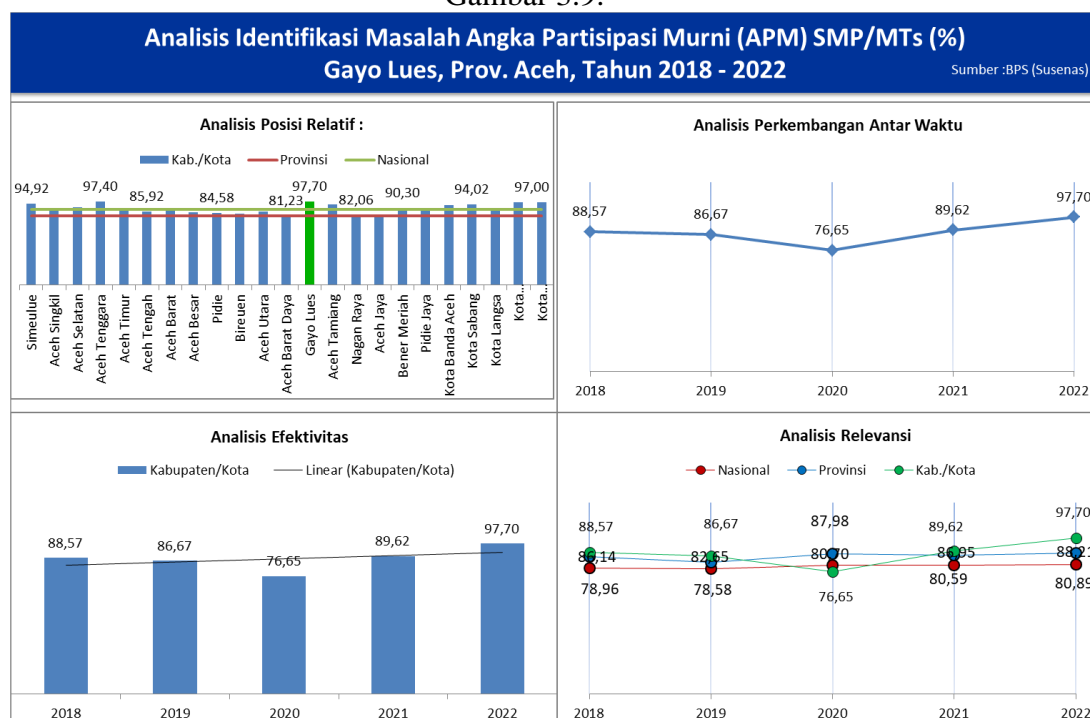
### Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs)

Pada tahun 2022, capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs) Kabupaten Gayo Lues adalah 97,70%. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Aceh (88,21%) dan Nasional (80,89). Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SMP/MTs Kabupaten Gayo Lues, menunjukkan tren yang meningkat dalam dua tahun terakhir di 2021-2022, namun pada tahun 2019-2020 memiliki tren menurun. Secara umum, sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 terlihat bahwa APM SMP/MTs lebih tinggi dari capaian Provinsi dan Nasional.

Jika dilihat dari posisi relatif Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh berada pada peringkat 1. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Partisipasi Murni terendah ada pada Kabupaten Aceh Barat Daya dengan capaian sebesar 81,23%.



Gambar 3.9.



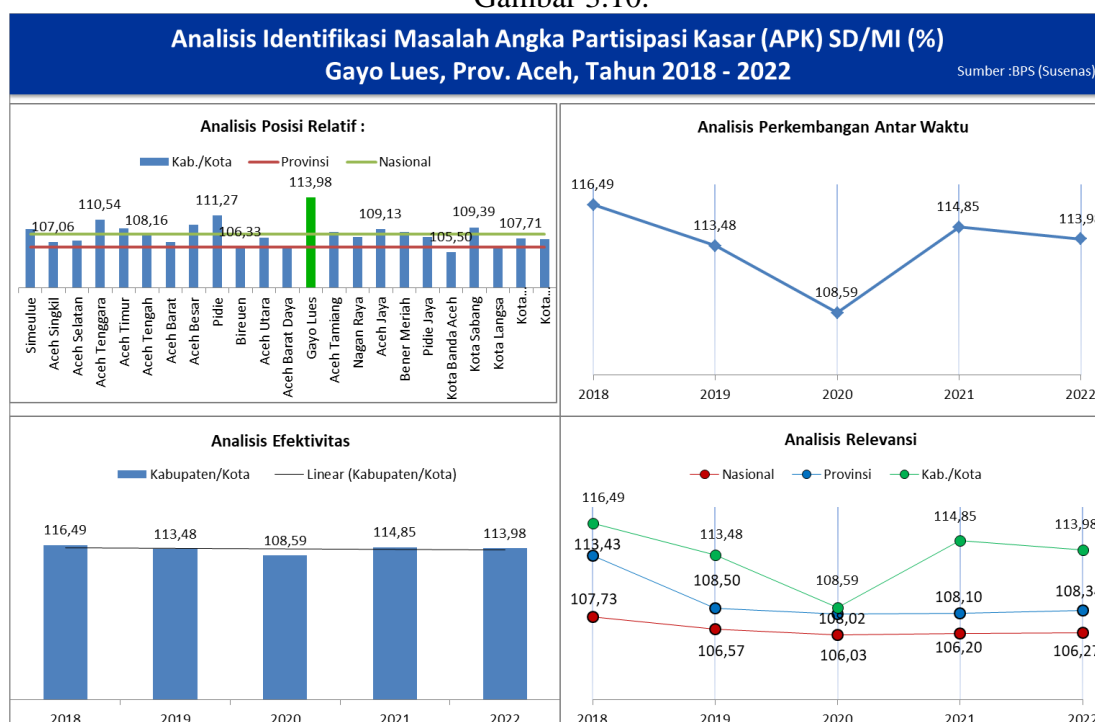
### Angka Partisipasi Kasar SD/MI (APK SD/MI)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan analisis perkembangan antar waktu, Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Gayo Lues dalam lima tahun terakhir memiliki tren berfluktuatif. Capaian terendah pernah terjadi pada tahun 2020 sebesar 108,59 % dan rata-rata capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Gayo Lues berada diatas 100%. Hal ini diartikan bahwa pada lima tahun terakhir ada siswa dengan umur yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2022 capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Gayo Lues sebesar 113,98 %. Capaian ini jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh, tahun 2022 Kabupaten Gayo Lues berada pada peringkat pertama. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Partisipasi Kasar SD/MI terendah berada pada Kota Banda Aceh.

Gambar 3.10.

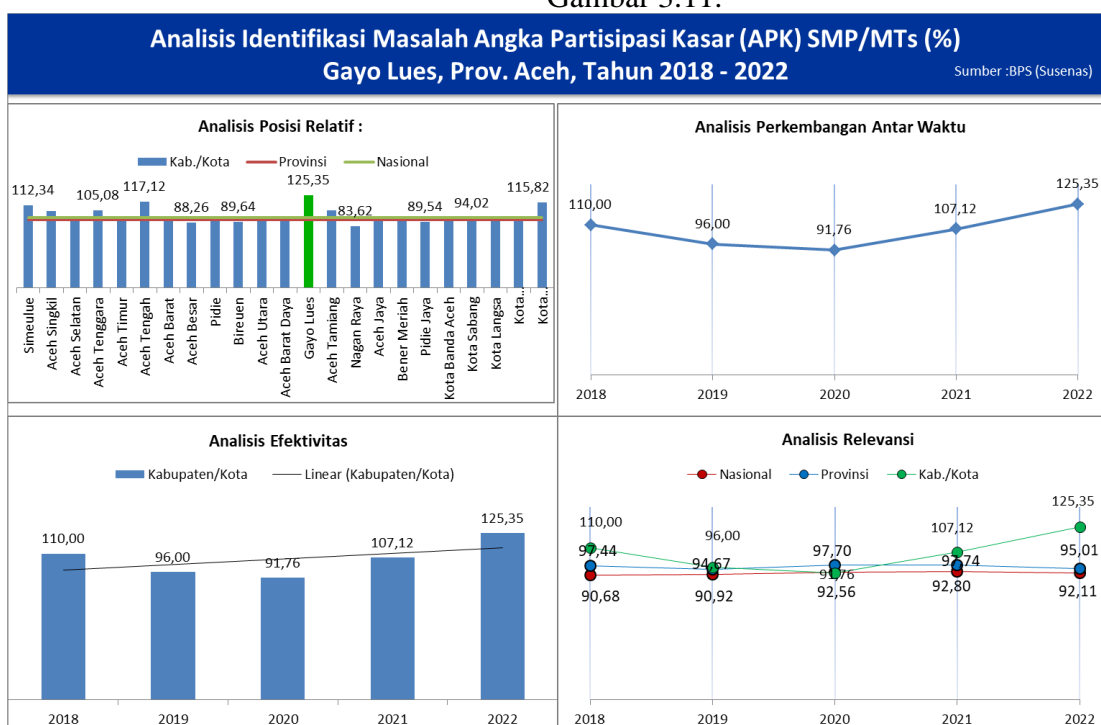


**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (APK SMP/MTs)**

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Gayo Lues selama dua tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Capaian tertinggi selama lima tahun terakhir berada pada tahun 2022 (125,35%) dan kondisi terendah pernah terjadi pada tahun 2020 (91,76%). Jika dilihat dari tingkat capaian lebih dari 100% pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa ada siswa yang sekolah tidak sesuai dengan umur jenjang pendidikannya.

Posisi relatif Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Gayo Lues tahun 2022 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh berada pada peringkat pertama dan terendah berada pada Kabupaten Nagan Raya sebesar 83,62%. Persentase Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Gayo Lues lebih tinggi dari capaian Provinsi (95,01%) dan Nasional (92,11%).

Gambar 3.11.



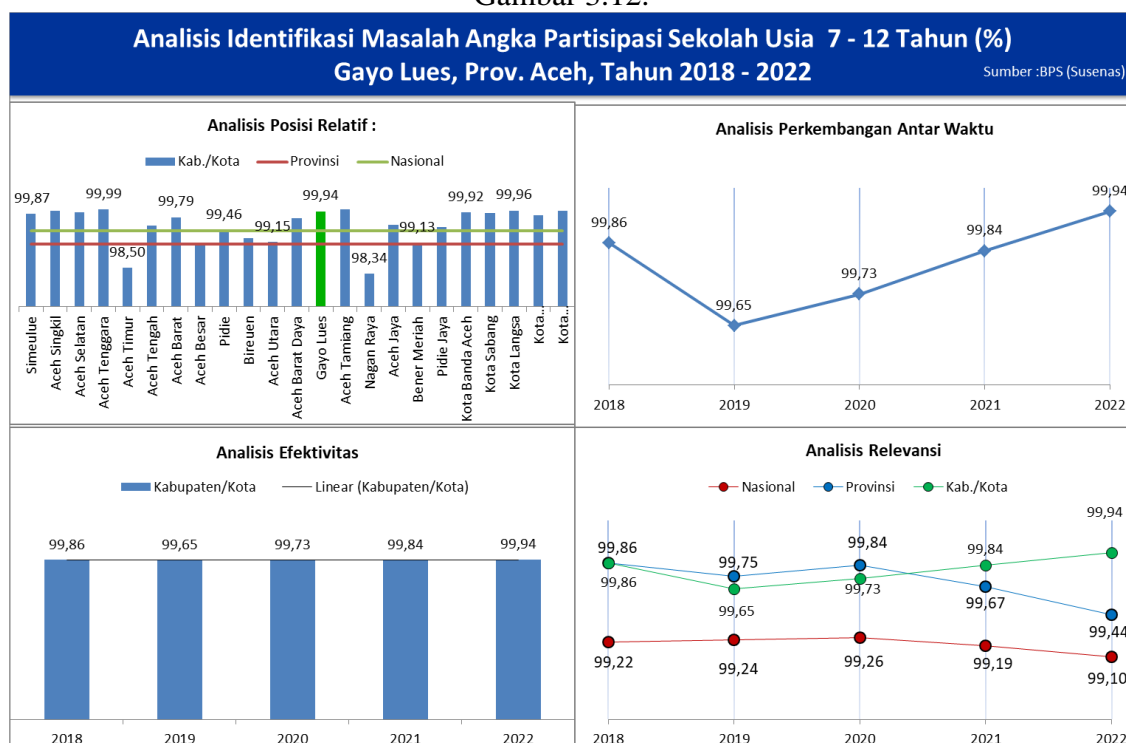
### Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Kegunaan Angka Partisipasi Sekolah adalah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Angka Partisipasi Sekolah usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Gayo Lues selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Kondisi penurunan Angka Partisipasi Sekolah usia 7 -12 tahun terjadi pada tahun 2019 (99,65). Hal ini dikarenakan ada siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan umur jenjang pendidikannya.

Gambar 3.12.



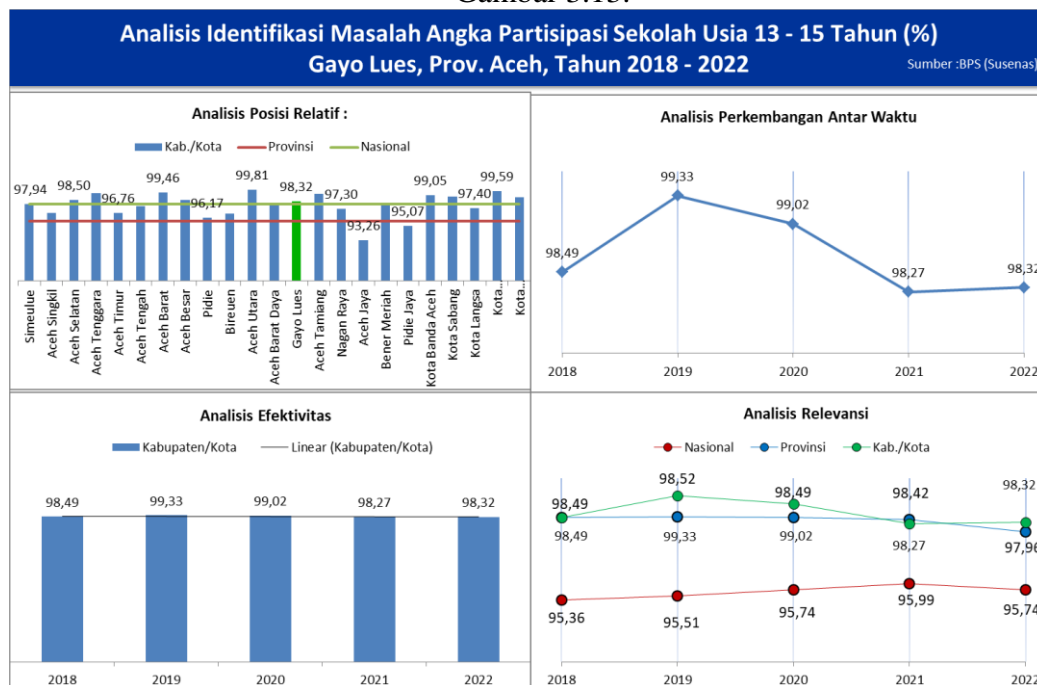
### Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Gayo Lues selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Kondisi penurunan Angka Partisipasi Sekolah usia 13 -15 tahun paling rendah terjadi pada tahun 2021 (98,27%) dan pada lima tahun terakhir Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun paling tinggi pernah dicapai tahun 2019 (99,33%).

Pada tahun 2022 posisi relatif Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun Kabupaten Gayo Lues dengan 22 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh berada pada peringkat 11 dengan capaian 98,32%. Sedangkan capaian tertinggi dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara (99,81%) dan terendah dicapai oleh Kabupaten Aceh Jaya (93,26%).

Secara relevansi capaian Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun di Kabupaten Gayo Lues rata-rata tiap tahunnya berada di atas capain Provinsi dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian Angka Partisipasi Kabupaten Gayo Lues masih relevan dengan kondisi rata-rata capaian Kabupaten/Kota di Aceh dan Nasional.

Gambar 3.13.

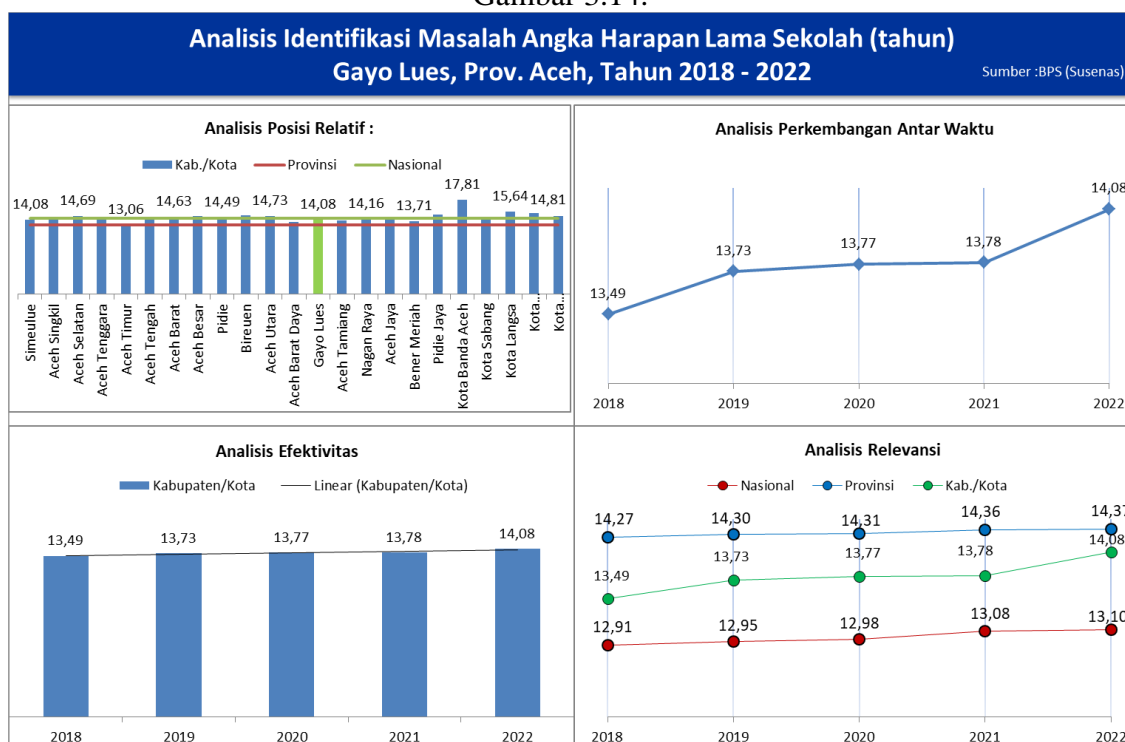


**Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Analisis perkembangan antar waktu memperlihatkan bahwa system pendidikan di Kabupaten Gayo Lues terus mengalami peningkatan. Kondisi ini terlihat pada perkembangan angka harapan lama sekolah yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada posisi relatif, capaian Kabupaten Gayo Lues berada pada peringkat 17 diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

Gambar 3.14.

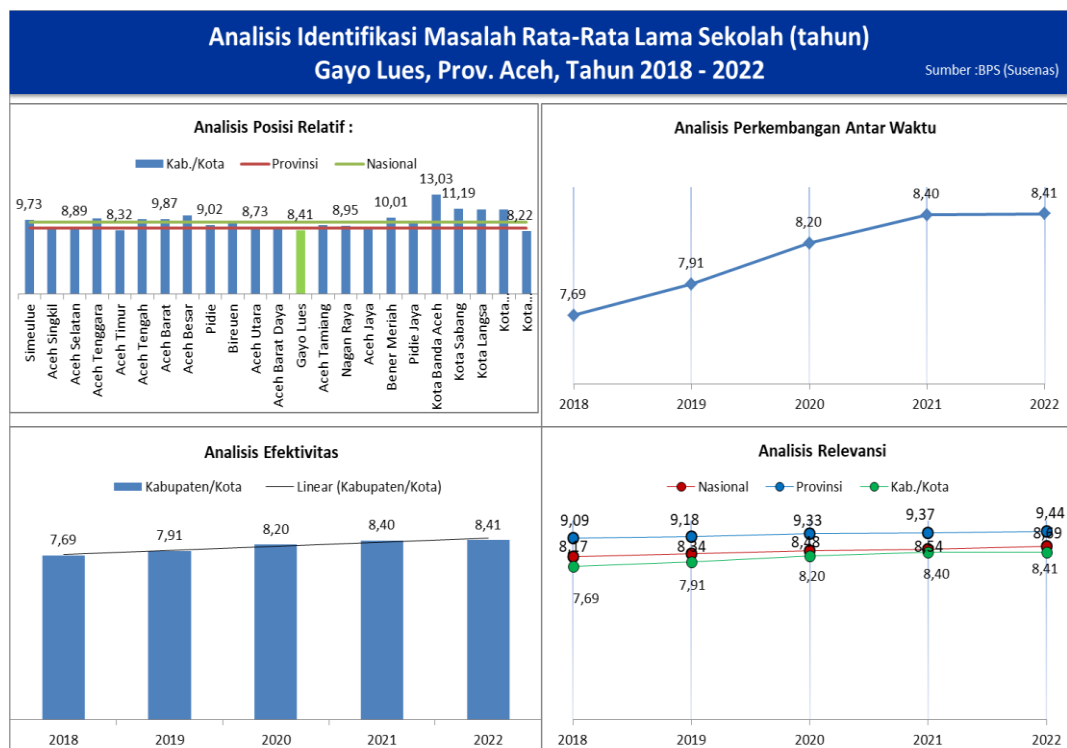




### Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Gambar 3.15.

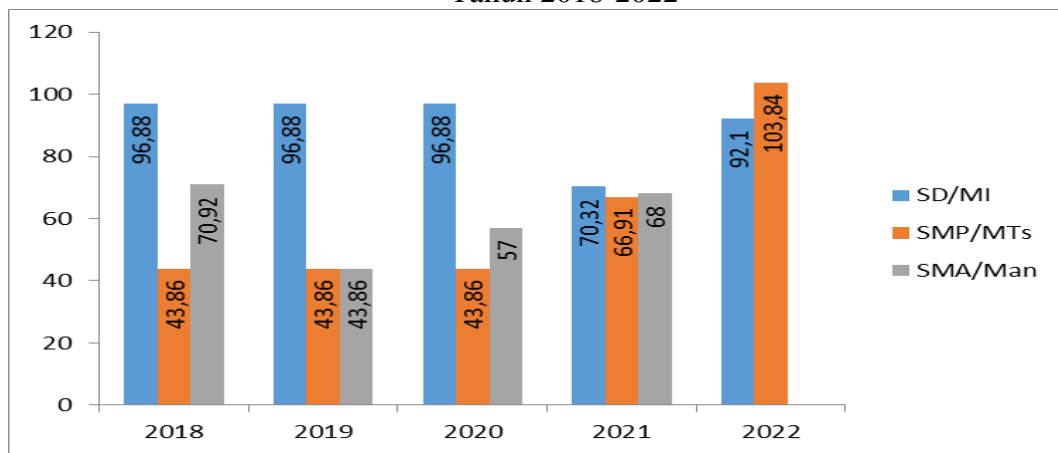


### Distribusi Sekolah dan Guru Bersertifikasi

Ketersediaan sarana prasarana sekolah sangat menentukan keberhasilan pendidikan di suatu daerah. Sarana pendidikan di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, walaupun perguruan tinggi masih merupakan cabang dari daerah luar Kabupaten Gayo Lues.

Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 terus meningkat pada rasio ketersediaan Sekolah SD/MI dan mengalami penurunan pada rasio ketersediaan sekolah pada SMP/MTs dan SMA/MAN.

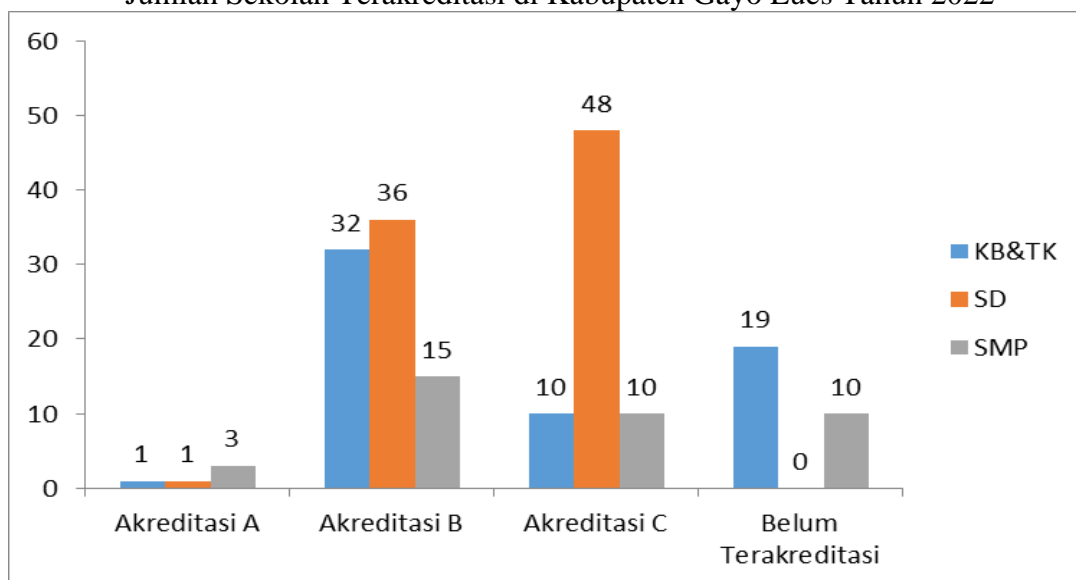
Gambar 3.16.  
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Gayo Lues  
Tahun 2018-2022



Sumber: RPKK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024

Akreditasi Sekolah adalah mengukur suatu lembaga pendidikan oleh badan yang berwenang dengan memenuhi penilaian syarat dan kriteria tertentu, akreditasi merupakan suatu bentuk sistem jaminan mutu eksternal yang merupakan proses yang digunakan oleh lembaga berwenang dalam penilaian. Dengan bertujuan untuk membantu mengetahui sejauh mana kriteria mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau standart nasional pendidikan sebagai standart minimal kualitas. Dari 185 tingkatan sekolah yang belum terakreditasi sebesar 15% (29 sekolah).

Gambar 3.17.  
Jumlah Sekolah Terakreditasi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

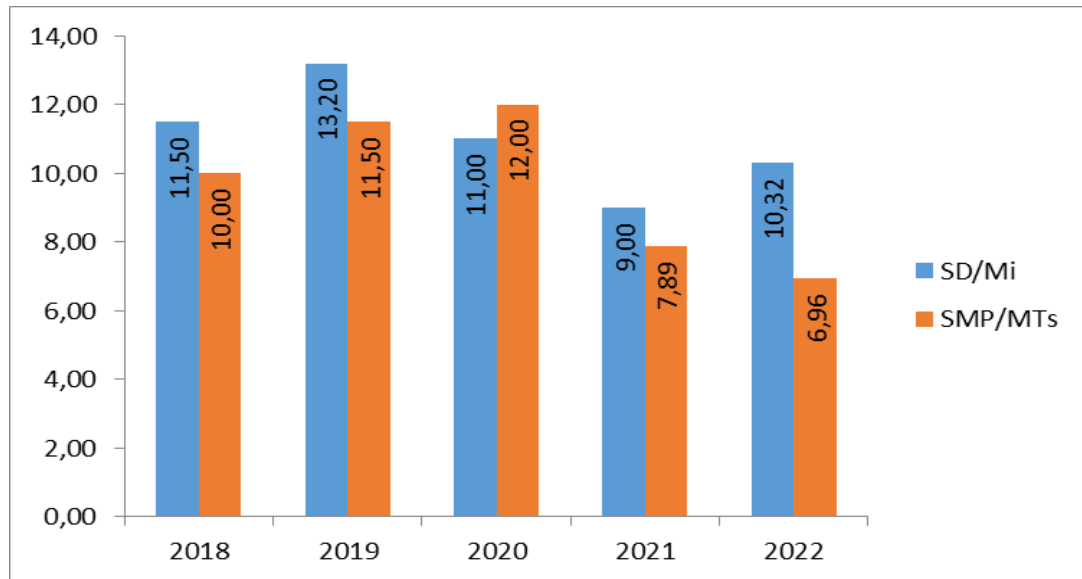


Sumber: RPKK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024

Rasio guru terhadap murid menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Untuk menjaga kualitas pendidikan kedepan, rasio guru terhadap murid harus dijaga. Untuk memenuhi kualitas tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues sudah berupaya dengan menambahkan Guru dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memenuhi beban kerja guru dalam mengajar.

Capaian rasio guru terhadap murid di Kabupaten Gayo Lues tertinggi berada pada tahun 2019 dan jenjang pendidikan SD/MI (13,20) dan terendah pada tahun 2022 dan jenjang SMP/MTs (6,96).

Gambar 3.18  
Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Gayo Lues  
Tahun 2018-2022



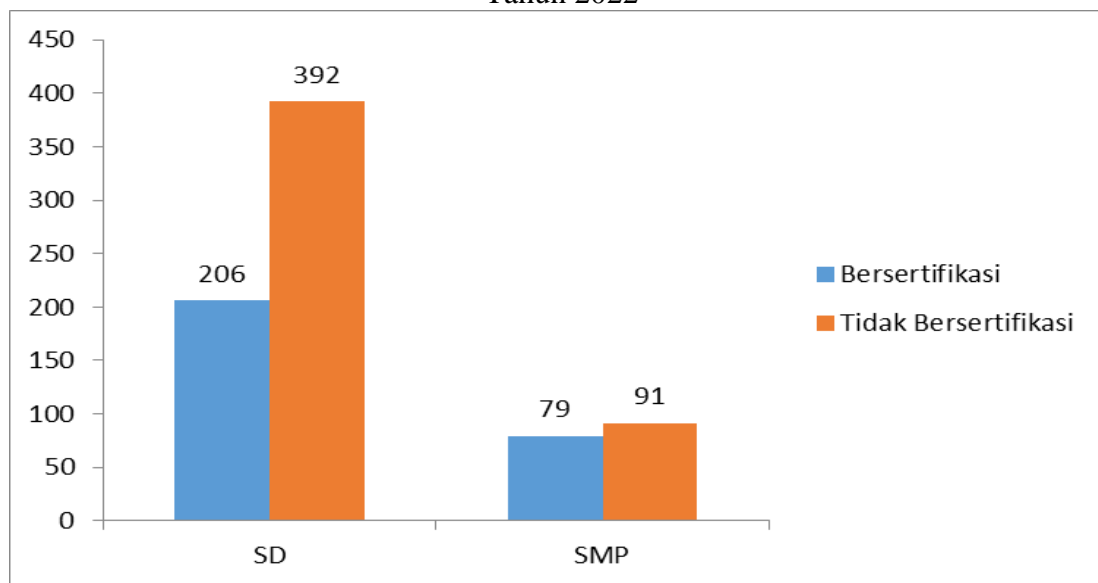
Sumber: RPKK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024

Sertifikasi Guru atau Sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.

Seorang guru yang sudah bersertifikat, akan memiliki nilai lebih yang dapat digunakan sebagai nilai tambah ketika seorang guru akan berpindah ke sekolah lain yang mungkin lebih menjanjikan. Sertifikasi Guru ini diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah memenuhi syarat.

Kabupaten Gayo Lues sudah memiliki Guru bersertifikasi yang tersebar pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Adapun jumlah guru bersertifikasi pada jenjang pendidikan SD berjumlah 206 orang dan jenjang pendidikan SMP 79 orang. Jumlah guru yang tidak bersertifikasi masih lebih banyak daripada jumlah guru bersertifikasi.

Gambar 3.19.  
Jumlah Guru SD dan SMP yang bersertifikasi di Kabupaten Gayo Lues  
Tahun 2022



Sumber: RKP-P 2023 Kabupaten Gayo Lues

### 3.3.2. Bidang Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu modal manusia (human capital) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas setiap manusia. Sehat merupakan suatu kondisi sejahtera secara sempurna fisik, mental dan sosial tidak terbatas pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan masyarakat lebih tinggi sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga tercipta masyarakat sehat secara keseluruhan. Di samping itu, kondisi kesehatan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan daerah. Dalam urusan kesehatan ini terdapat permasalahan pembangunan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang juga telah tertuang dalam dokumen RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026 dimana dapat teringkas sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima.
2. Belum optimalnya penanganan gizi buruk.
3. Masih rendahnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan.
4. Belum optimalnya ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya tenaga kesehatan.
5. Belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur kesehatan.

## Angka Harapan Hidup

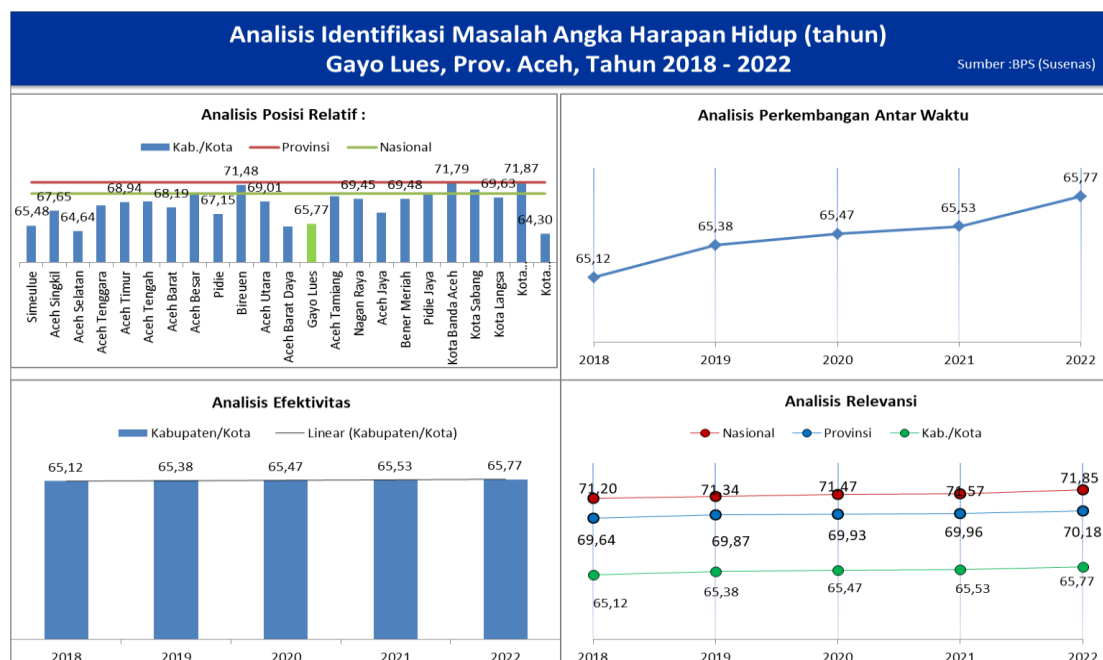
Menurut BPS Angka Harapan Hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Analisis perkembangan antar waktu memperlihatkan angka harapan hidup Kabupaten Gayo Lues meningkat tiap tahunnya selama lima tahun terakhir (2018-2022). Seperti pada tahun 2022 angka harapan hidup Kabupaten Gayo Lues sebesar 65,77. Artinya bahwa hasil evaluasi pada tahun 2022 usia penduduk Kabupaten Gayo Lues di perkirakan akan berusia 65,77 tahun. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

Pada analisis posisi relatif menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Gayo Lues berada dibawah dibawah capaian Provinsi Aceh dan Nasional. Namun, angka harapan hidup Kabupaten Gayo Lues meningkat setiap tahunnya dan mengikuti tren grafik capaian Provinsi Aceh dan Nasional tiap tahunnya. Sedangkan secara efektivitas terlihat bahwa intervensi yang dalam mempengaruhi capaian angka harapan hidup tiap tahunnya efektif. Terlihat bahwa tren yang terus meningkat dan memiliki garis linier.

Gambar 3.20





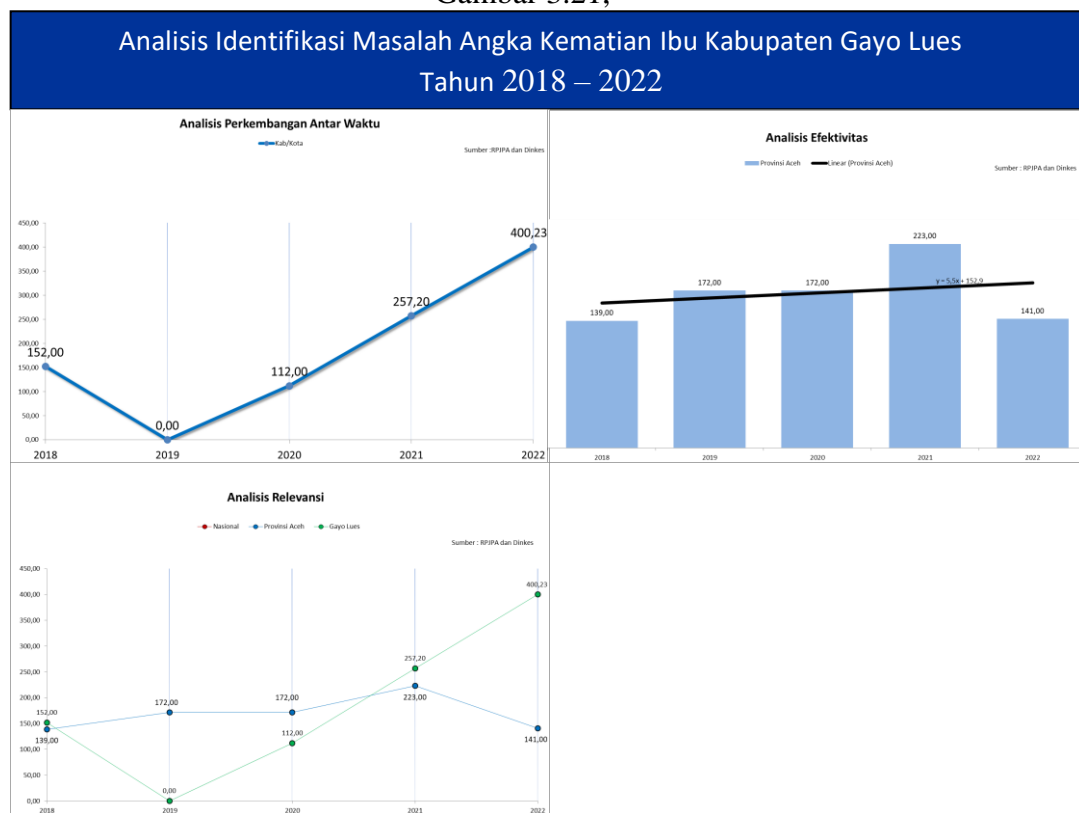
## Kematian Ibu

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Jumlah kematian ibu selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan tiap tahunnya. Adapun jumlah kematian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sejumlah 400,23 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kematian terendah terjadi pada tahun 2019 berjumlah 000 per 100.000 kelahiran hidup.

Jika dilihat secara efektivitas tren jumlah kematian ibu menjauhi garis linear. Hal ini diartikan bahwa setiap kebijakan tidak begitu berpengaruh untuk menurunkan jumlah kematian ibu. Intervensi yang dilakukan hanya bersifat sementara dan tidak kontinyu.

Gambar 3.21,



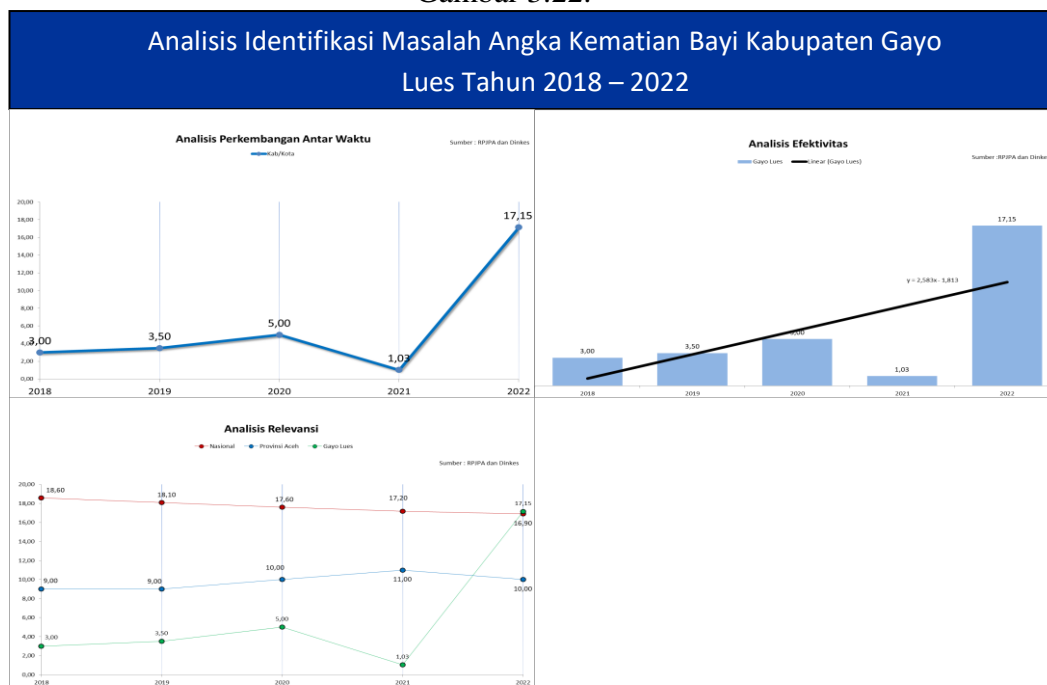
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues

## Kematian Bayi

Angka kematian bayi/Infant Mortality adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Gayo Lues selama lima tahun terakhir fluktuatif dan meningkat. Capaian jumlah kematian bayi tertinggi dicapai pada tahun 2022 berjumlah 17,15 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Pada analisis efektivitas terlihat tren capaian tiap tahunnya jauh dari garis linear. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi tidak signifikan mempengaruhi jumlah kematian bayi dan intervensi bersifat tidak simultan dengan jumlah kematian bayi.

Gambar 3.22.

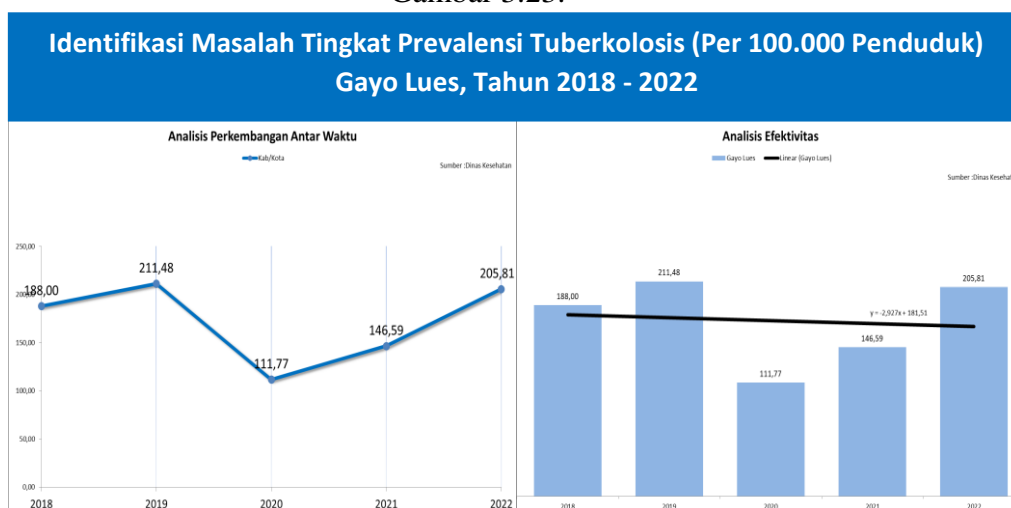


### Prevalensi Tuberkolosis

Penyakit TBC paru yang disebabkan terjadi ketika daya tahan tubuh menurun. Dalam perspektif epidemiologi yang melihat kejadian penyakit sebagai hasil interaksi antar tiga komponen pejamu (host), penyebab (agent), dan lingkungan (environment) dapat ditelaah faktor risiko dari simpul-simpul tersebut. Pada sisi pejamu, kerentanan terhadap infeksi Mycobacterium tuberculosis sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh seseorang pada saat itu. Pengidap HIV AIDS atau orang dengan status gizi yang buruk lebih mudah untuk terinfeksi dan terjangkit TBC.

Pada Kabupaten Gayo Lues tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki grafik yang fluktuatif. Kondisi tertinggi pernah dicapai pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 211,48 (Per 100.000 penduduk) dan tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 111,77. Tetapi pada 2 tahun terakhir tingkat prevalensi tuberkolosis mengalami peningkatan.

Gambar 3.23.



Upaya dan pengendalian yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan masyarakat adalah:

1. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. Membudayakan perilaku etika berbatuk;
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
4. Peningkatan daya tahan tubuh;
5. Penanganan penyakit penyerta TBC;
6. Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

### ***Sarana Kesehatan***

Sarana kesehatan merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk mendukung pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Di Kabupaten Gayo Lues sarana kesehatan terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Apotek. Penyediaan sarana kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 3.1.

Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019-2021

<b>Fasilitas Kesehatan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rumah Sakit</b>	1	1	1
<b>Rumah Sakit Bersalin</b>	-	-	-
<b>Poliklinik</b>	5	1	1
<b>Puskesmas</b>	14	12	13
<b>Puskesmas Pembantu</b>	35	31	28
<b>Apotek</b>	4	8	5

Sumber: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2023

### ***Tenaga Kesehatan***

Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan No 36 tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan memiliki beberapa petugas yang dalam kerjanya saling berkaitan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan ketenagaan medis lainnya (Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996).

Begitu pentingnya tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berupaya untuk menyediakan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Gayo Lues di dominasi oleh tenaga keperawatan (134 orang) dan tenaga kebidanan (291 orang).

Tabel 3.2.  
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Tenaga Medis	71
2	Psikologi Medis	3
3	Tenaga Keperawatan	134
4	Tenaga Kebidanan	291
5	Tenaga Kefarmasian	33
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	58
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	21
8	Tenaga Gizi	24
9	Tenaga Keterampilan	11
10	Tenaga Keteknisian Medis	27
11	Tenaga Teknik Biomedika	50

Sumber: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2023

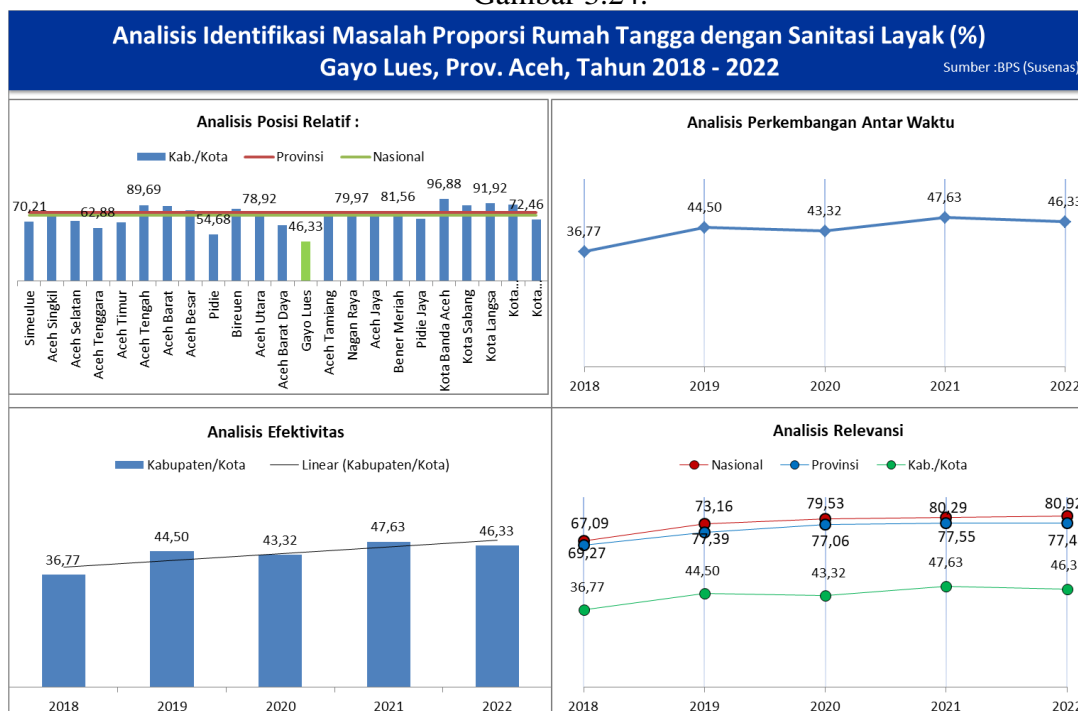
### 3.3.3. Bidang Infrastruktur Dasar

Analisis bidang infrastruktur dasar yang merupakan salah satu karakteristik terpenting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kondisi perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini juga menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan.

#### *Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak*

Pemenuhan terhadap infrastruktur dasar yang sangat penting untuk di penuhi adalah akses masyarakat terhadap sanitasi layak. Sanitasi yang terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Perkembangan persentase rumah tangga yang bersanitasi di Kabupaten Keerom ada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif. Kondisi penurunan pernah di alami Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2020 (43,32) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki tren positif. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 47,63, tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan.

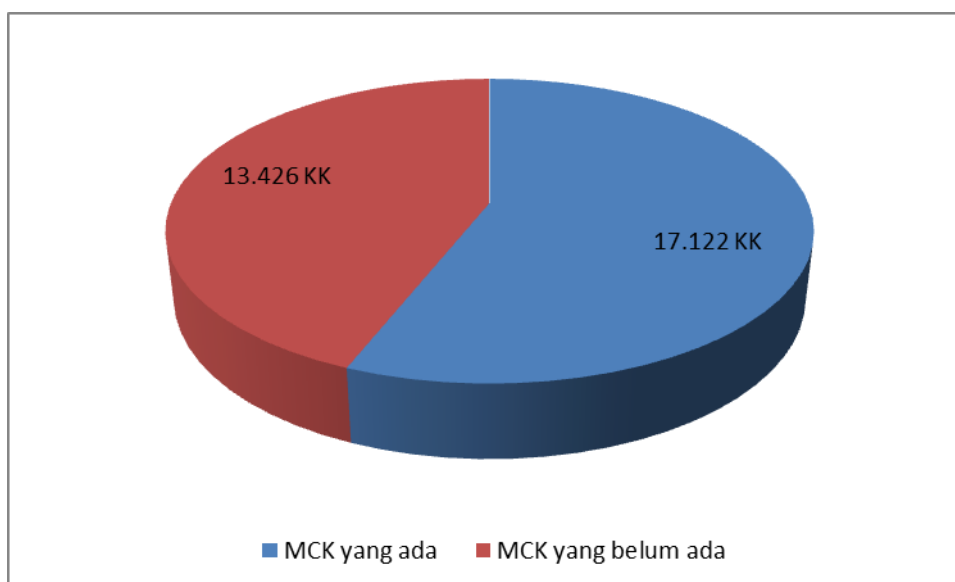
Gambar 3.24.



Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gayo Lues, tahun 2022 jumlah Keluarga yang memiliki MCK sudah mencapai 56% dari keseluruhan jumlah keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi sanitasi dari tiap keluarga makin baik.

Gambar 3.25.

Jumlah KK yang Memiliki MCK di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022



Sumber: RPKP 2024 Kabupaten Gayo Lues

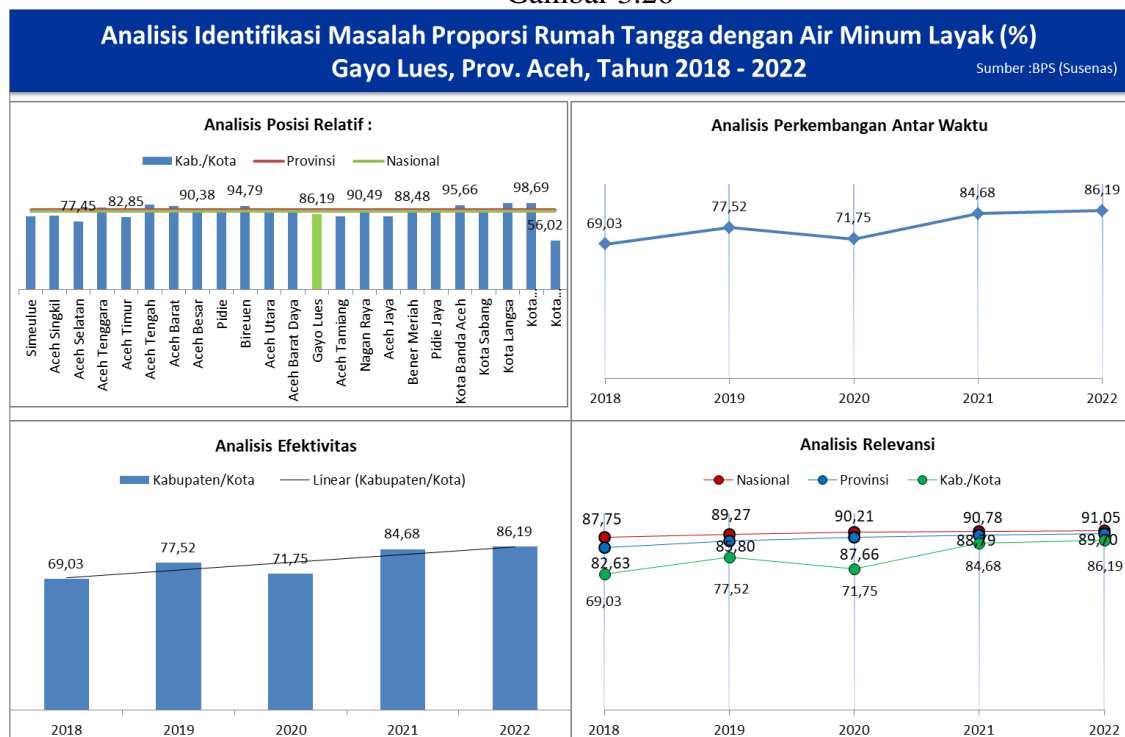


### Rumah Tangga dengan Air Minum layak

Dari gambar di bawah ini menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Gayo Lues selama lima tahun terakhir (2018-2022) lebih rendah dari capaian Provinsi Aceh dan Nasional. Jika dilihat dari posisi relatif tahun 2022 dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh, Kabupaten Gayo Lues berada pada peringkat 16. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian Kabupaten Gayo Lues tidaklah terlalu buruk dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh. Capaian tertinggi dicapai oleh Kota Lhokseumawe dan terendah dicapai oleh Kota Subulussalam.

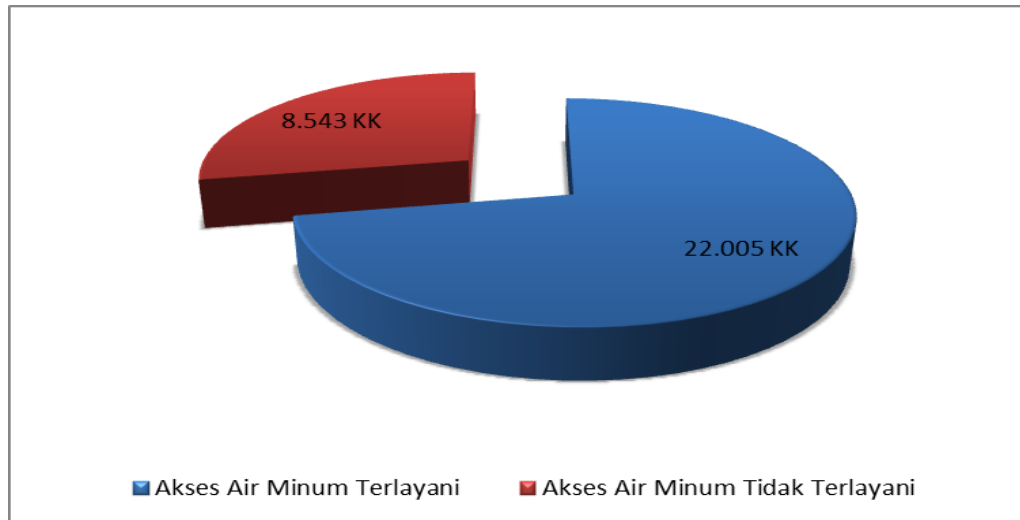
Perkembangan capaian air minum layak selama lima tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi berada pada tahun 2022 dengan capaian 86,19% dan terendah berada pada tahun 2018 (69,03%). Jika dilihat dari efektivitas, capaian Kabupaten Gayo Lues tiap tahunnya memiliki tren yang berada diluar dari garis linier. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kebijakan terkait air minum kurang terstruktur dan terkonsentrasi pada pemenuhan akses air minum layak.

Gambar 3.26



Upaya pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga air minum layak dengan menyediakan air untuk masyarakat melalui PAM/PDAM dan pemeliharaan sumber-sumber air. Pelayanan terhadap penyediaan air untuk masyarakat Kabupaten Gayo Lues telah dapat melayani 22.005 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Gayo Lues sudah terlayani kebutuhan air minum. Sedangkan untuk masyarakat yang belum memperoleh akses air minum melalui PDAM/PAM, menggunakan air sumur dan sarana air minum lainnya.

Gambar 3.27,  
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Akses Air Minum di Kabupaten Gayo Lues  
Tahun 2022



Sumber: RKPK 2024 Kabupaten Gayo Lues

### 3.3.4. Bidang Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 ke atas. Penduduk usia kerja terbagi menjadi 2 bagian yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang besar dapat menjadi sumber pembangunan daerah. Di sisi lain, penduduk usia kerja yang melimpah dan tidak dibekali dengan pengembangan softskill serta lapangan pekerjaan yang memadai akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut tentunya akan mengganggu kestabilan ekonomi suatu daerah. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah kemiskinan baik secara nasional, provinsi maupun di lingkup kabupaten/kota, permasalahan timbul karena tidak adanya perimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun dengan perkembangan jumlah lapangan usaha yang menampung tenaga kerja tersebut.

#### *Tingkat Pengangguran Terbuka*

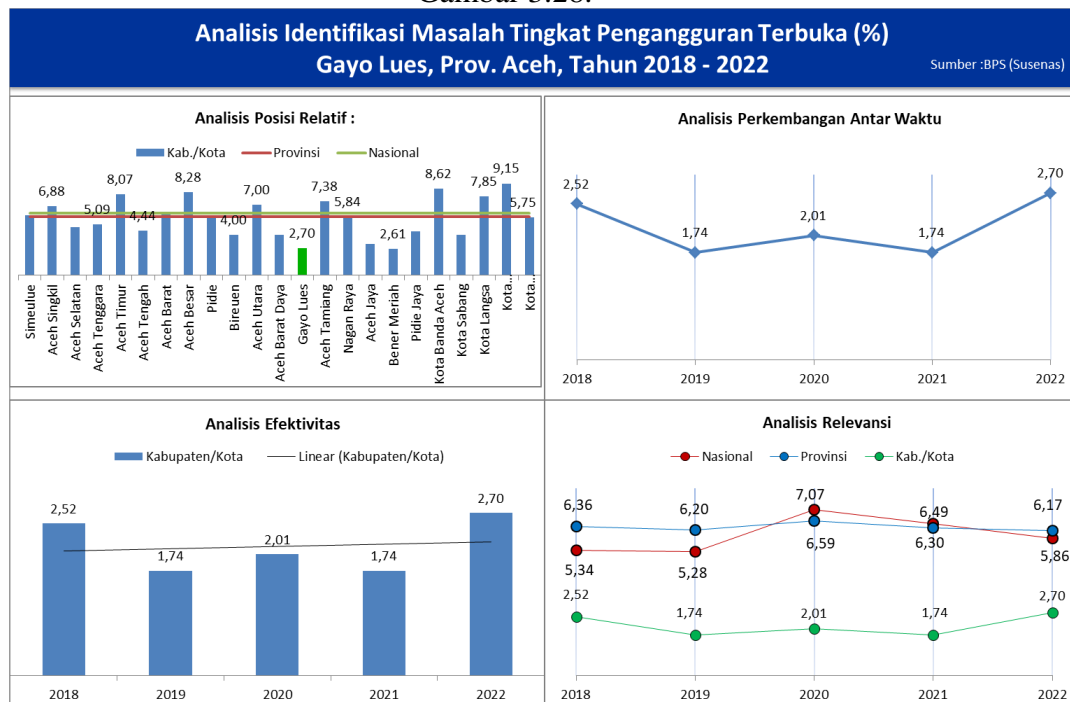
Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, semakin besar kesempatan dan partisipasi angkatan kerja di sebuah daerah, demikian juga dengan Kabupaten Gayo Lues. Pada tahun 2022, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka adalah 2,70% jauh dibawah capaian Provinsi Aceh (6,17 %) dan jauh dibawah capaian Nasional (5,86 %), ini menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka Gayo Lues jauh lebih baik dari provinsi dan nasional pada tahun yang sama.

Posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gayo Lues tahun 2022 dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh berada pada peringkat 22. Artinya bahwa tingkat pengangguran terbuka sangat kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi

Aceh. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi dicapai oleh Kota Lhokseumawe (9,15%) dan terendah dicapai oleh Kabupaten Bener Meriah.

Kondisi perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gayo Lues selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Capaian setiap tahunnya menjauhi garis linear, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang telah diambil tidak signifikan mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka secara kontinyu.

Gambar 3.28.



### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

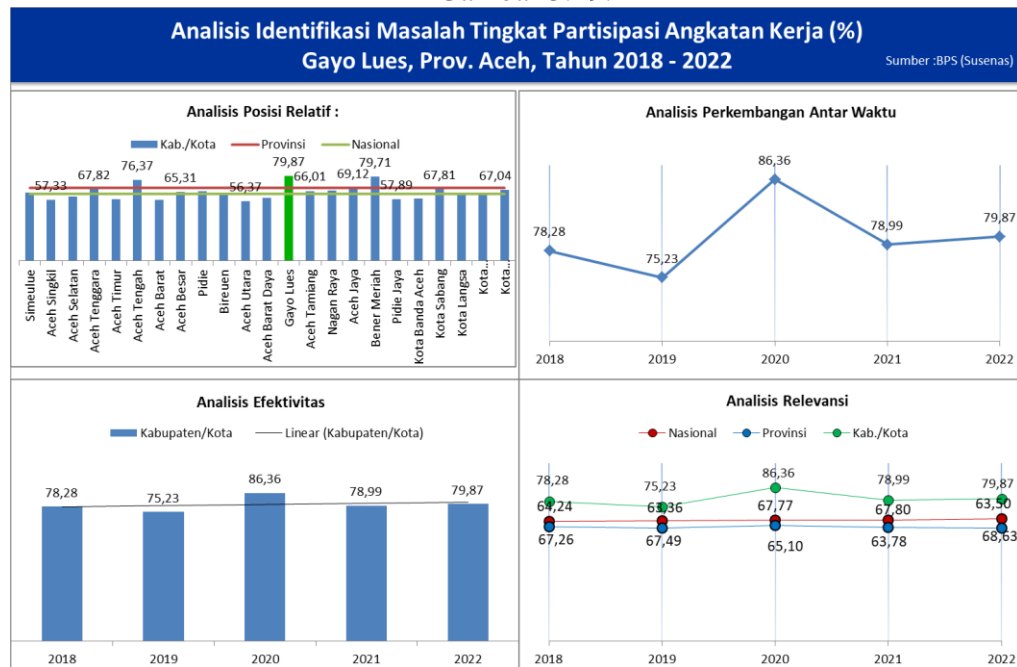
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar persentase penduduk usia kerja yang mendapatkan pekerja dan atau bekerja di sebuah daerah, demikian juga dengan Kabupaten Gayo Lues. Pada tahun 2022, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2022 adalah 79,87%, di atas capaian Provinsi Aceh (63,50%) dan Nasional (68,63%), ini menandakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gayo Lues lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional pada tahun yang sama.

Posisi relatif tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Gayo Lues tahun 2022 dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh berada pada peringkat pertama. Artinya bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja sangat besar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh. Tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi setelah Kabupaten Gayo Lues dicapai oleh Kabupaten Bener Meriah (79,71%) dan terendah dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara.

Kondisi perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Gayo Lues selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Capaian setiap tahunnya agak menjauhi garis linear, hal ini

mengindikasikan bahwa kebijakan yang telah diambil tidak begitu berdampak untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Gayo Lues secara kontinyu.

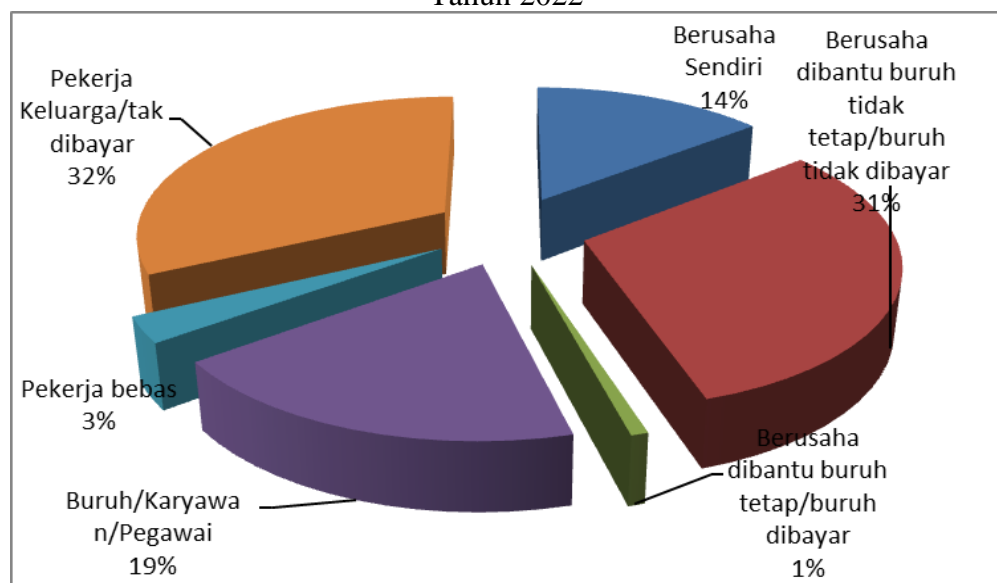
Gambar 3.29.



Berdasarkan Peta Administrasi Kabupaten Gayo Lues berada di dalam kawasan pegunungan yang didalamnya ada ekosistem taman nasional. Kondisi ini menjadikan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebagian besar menjadi petani.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat Kabupaten Gayo Lues memiliki status pekerjaan sebagian besar didominasi oleh pekerjaan dibantu pekerja keluarga/tak dibayar (32%) dan berusaha dibantu buruh tidak dibayar (31%). Sedangkan pekerjaan yang mempekerjakan karyawan/buruh tetap hanya 1 % saja.

Gambar 3.30  
Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022



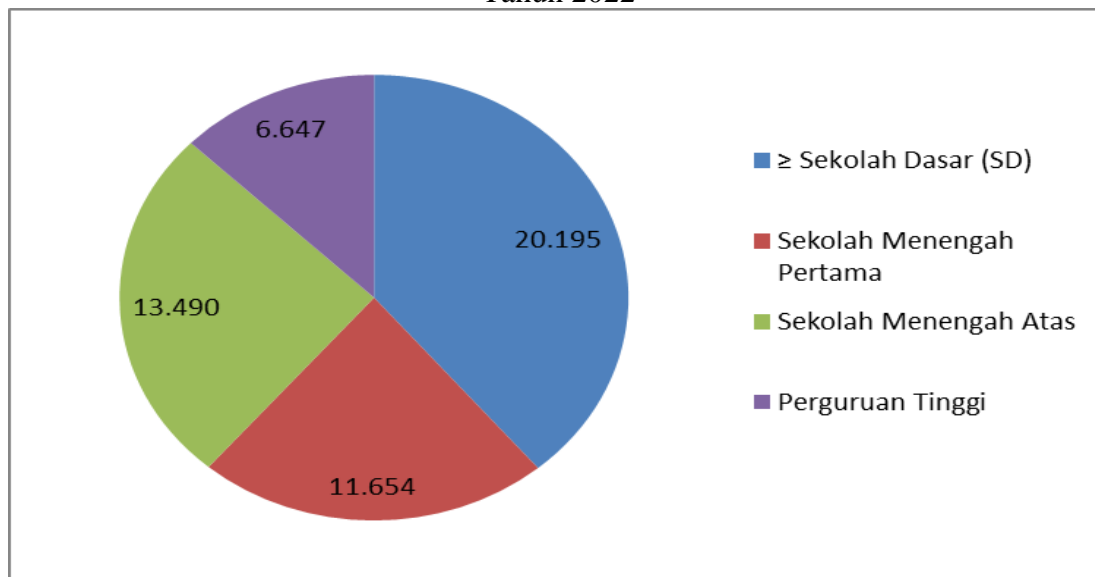
Sumber: Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2023

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisis sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga, sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja masih berada di bawah standar dan masih ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu penyebab dari kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan yang belum merata. Pendidikan yang belum merata disebabkan oleh masih terkonsentrasinya akses pendidikan pada daerah tertentu.

Begitu pentingnya pendidikan dalam menentukan kualitas tenaga kerja dan menjadi cerminan kategori pekerjaan yang ada di suatu daerah. Untuk Kabupaten Gayo Lues jumlah angkatan kerja berpendidikan terakhir dibawah Sekolah Dasar (SD) mendominasi dengan angka 20.195 orang. Sedangkan angkatan kerja dengan berpendidikan terakhir perguruan tinggi berjumlah hanya 6.647 orang.

Gambar 3.31.  
Jumlah Angkatan yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022



Sumber: Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2023

### 3.3.5. Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan 1 dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pemerintah pada awal Tahun 2020. Tanggal 4 Maret tahun 2020, Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas telah memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem secara Nasional menjadi 0% di akhir RPJMN tahun 2024, sedangkan berdasarkan rilis BPS, kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2022 adalah 2,04 persen.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP, sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar World Bank, berdasarkan hitungan World Bank persentase penduduk miskin ekstrem Nasional tahun 2022 adalah 2,04 %, sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem Nasional adalah 5.800.000 jiwa. BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk di konversikan ke dalam rupiah, berdasarkan perhitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2022 adalah Rp. 10.739 per kapita perhari, jika dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 adalah 322.170/kepala/bulan dan berlaku secara Nasional.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah memberikan amanat bagi seluruh lapis pemerintah sampai Pemerintahan Desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi. Arahan Presiden tersebut di antaranya:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
  - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
  - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

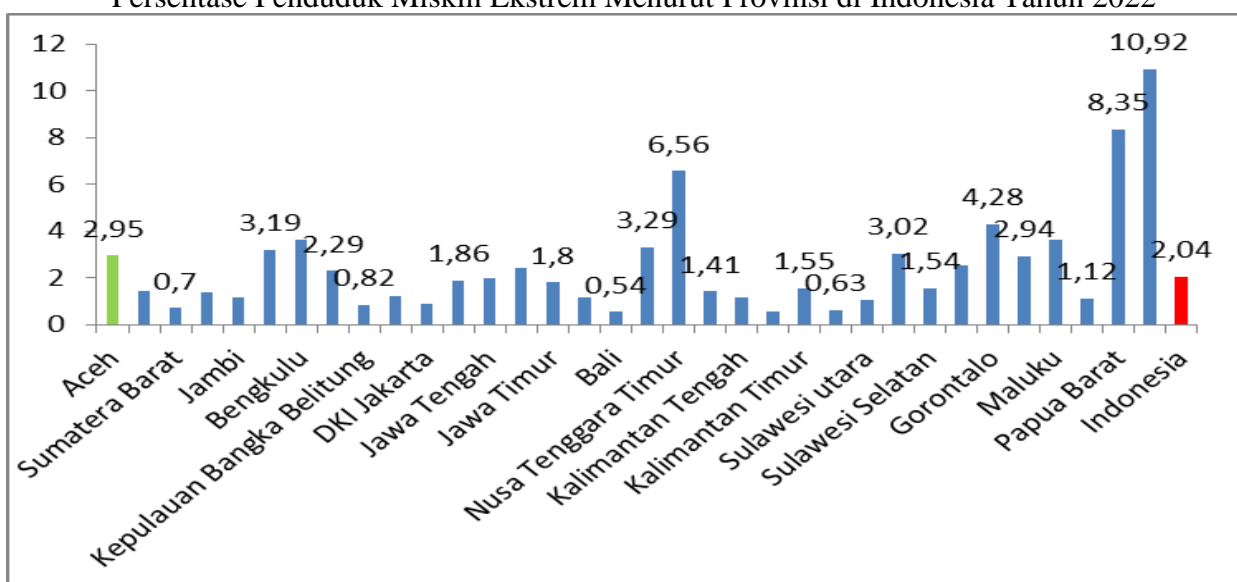
Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, dilaksanakan dengan prinsip **Tepat sasaran:** Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini, **Pendekatan multidimensi:** Pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan. **Keterpaduan dan sinergi:** Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem. **Tersampainya dan dipahaminya informasi:** Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE. **Koordinasi dan kerja sama multipihak:** Pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi



dan kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah serta **Terpantau dan terkendali**: Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi tahun 2022 berada pada Provinsi Papua dengan capaian 10,92 %. Capaian persentase penduduk miskin ekstrem Papua ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Sedangkan untuk capaian persentase penduduk miskin ekstrem terendah berada pada Provinsi Bali dengan capaian 0,54% dan Provinsi Aceh berada peringkat 10 dengan capaian 2,95%.

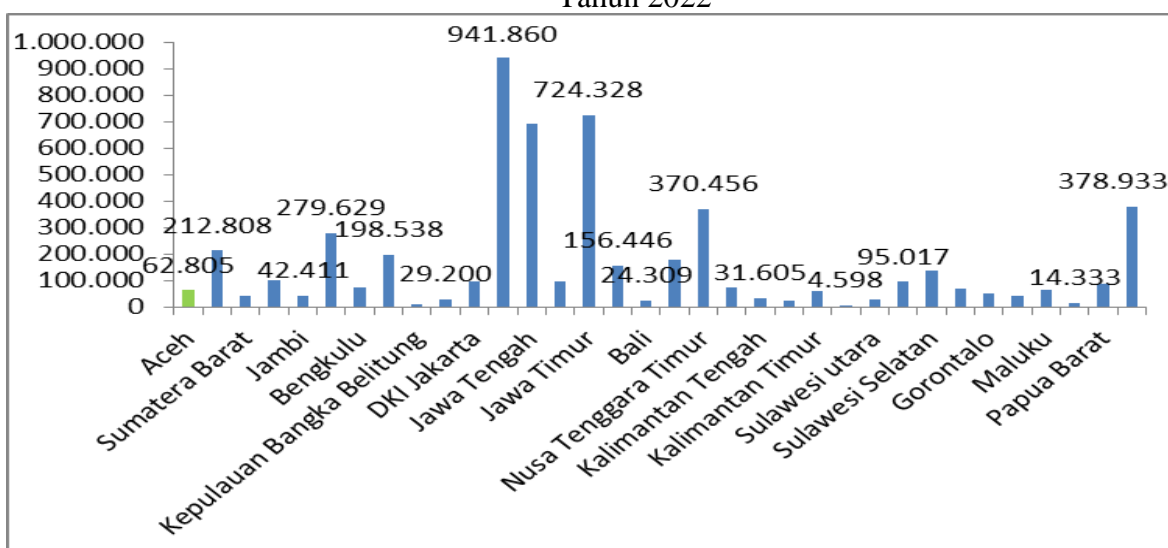
Gambar 3.32  
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022



Sumber: BPS

Kondisi yang berbeda terjadi pada jumlah penduduk miskin ekstrem tahun 2022. Pada jumlah penduduk miskin ekstrem, capaian tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat (941.860 jiwa) dan terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara (4.598 Jiwa). Sedangkan Provinsi Aceh berada pada peringkat ke 21 dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 62.805 jiwa.

Gambar 3.33.  
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Provinsi di Indonesia  
Tahun 2022

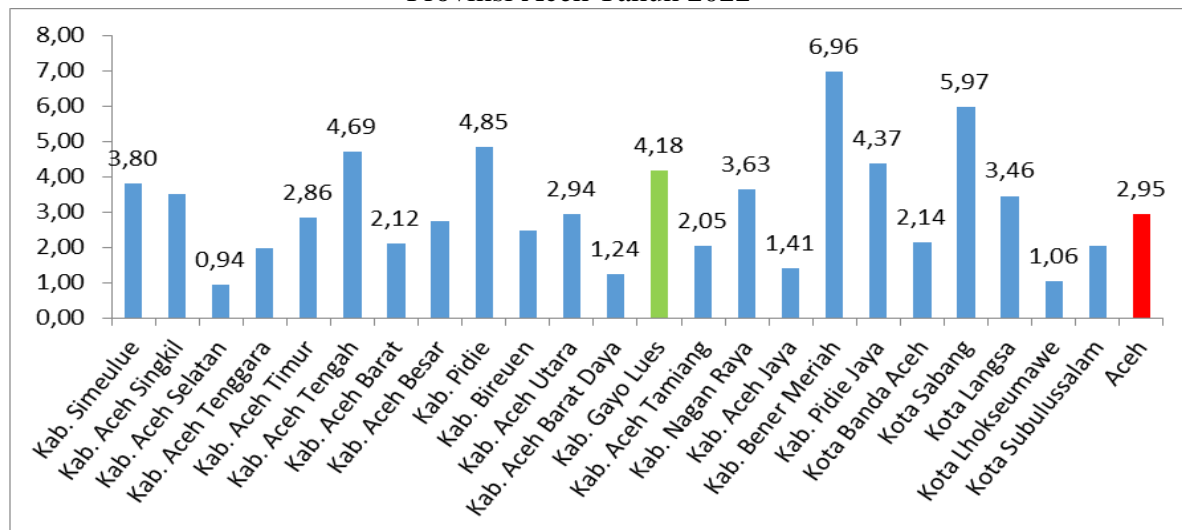


Sumber: BPS

Aceh merupakan salah satu Provinsi dengan capaian persentase kemiskinan ekstrem terendah jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya secara Nasional. Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh berada pada peringkat 4.

Persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Gayo Lues tahun 2022 sebesar 4,18% dan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya berada pada peringkat 6. Sedangkan capaian tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bener Meriah sebesar 6,96% dan terendah dicapai oleh Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,94 %.

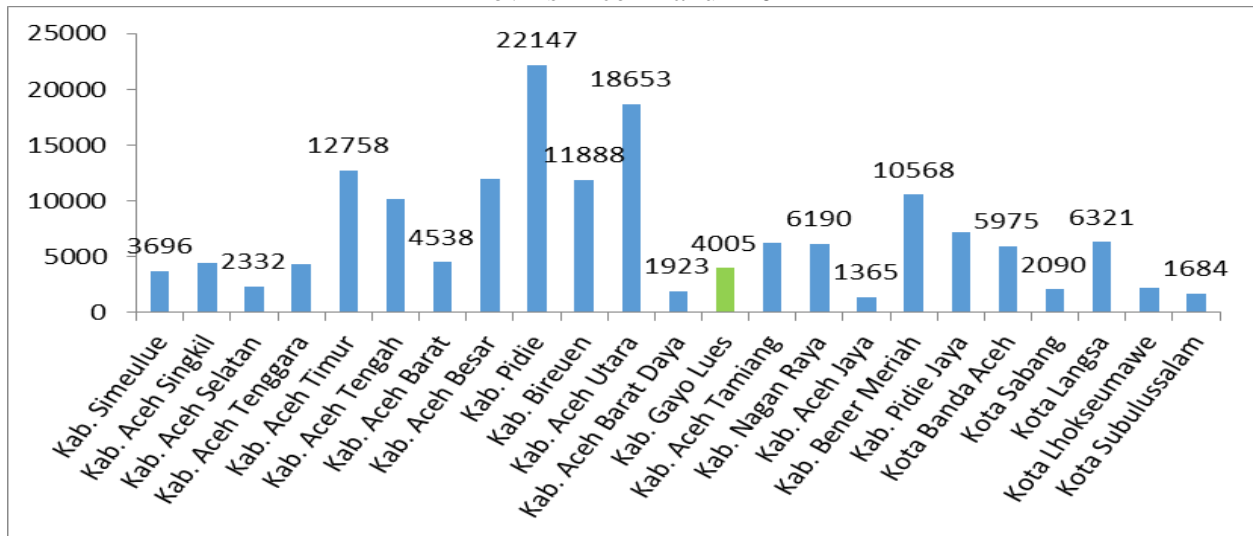
Gambar 3.34.  
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota  
Provinsi Aceh Tahun 2022



Sumber: BPS

Jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Gayo Lues tahun 2022 berjumlah 4.005 jiwa dan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya berada pada peringkat 16. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak dicapai oleh Kabupaten Pidie (22.147 jiwa) dan terendah dicapai oleh Kabupaten Aceh Jaya (1.365 jiwa).

Gambar 3.35.  
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota  
Provinsi Aceh Tahun 2022



Sumber: BPS

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PROGRAM**

#### **4.1. PENGEMBANGAN LOGIKA PROGRAM (THEORY OF CHANGE)**

Theory of Change (ToC) adalah metodologi untuk menentukan outcome yang ingin dicapai sekaligus memproyeksikan langkah untuk mencapainya melalui intervensi program kebijakan. Theory of Change mendefinisikan tujuan jangka panjang atau menengah dan kemudian memetakan ke belakang untuk mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Metodologi ini digunakan sebagai persyaratan wajib dalam merancang sebuah proyek kebijakan yang efektif dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Dengan menggunakan prinsip Theory of Change, maka logika program akan menjelaskan mengapa sebuah program atau kebijakan diambil, dan nantinya akan bermanfaat sebagai basis untuk pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mengkaji ulang seluruh hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Kemudian dari bahan tersebut dapat diperkirakan apa yang terjadi jika intervensi dilakukan. Diharapkan setelah mengerjakan metodologi ini, maka praktisi dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang strategi dan taktik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berikut pengembangan beberapa Logika Program (Theory of Change) berdasarkan permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues yang telah dibahas pada Bab III sebelumnya.

##### **1. Logika Program (Theory of Change) Pendidikan**

Di Kabupaten Gayo Lues Pendidikan menjadi permasalahan yang paling dominan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian yang lebih baik, mengingat tingkat pendidikan masyarakat Gayo Lues masih rendah. Dalam hal ini Tim teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Bidang Pendidikan berfokus pada Peningkatan Partisipasi Pendidikan Dasar khususnya bagi anak dari rumah tangga miskin dan rentan miskin serta mengoptimalkan mutu Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan target RPK Gayo Lues tahun 2023-2026, Hal ini dikarenakan jumlah guru SD yang sudah bersertifikasi sebanyak 206 guru dari total guru SD 598 guru, dan jumlah guru SMP yang sudah bersertifikasi sebanyak 79 guru dari total guru SMP 170 guru serta belum meningkatnya level akreditasi sekolah.

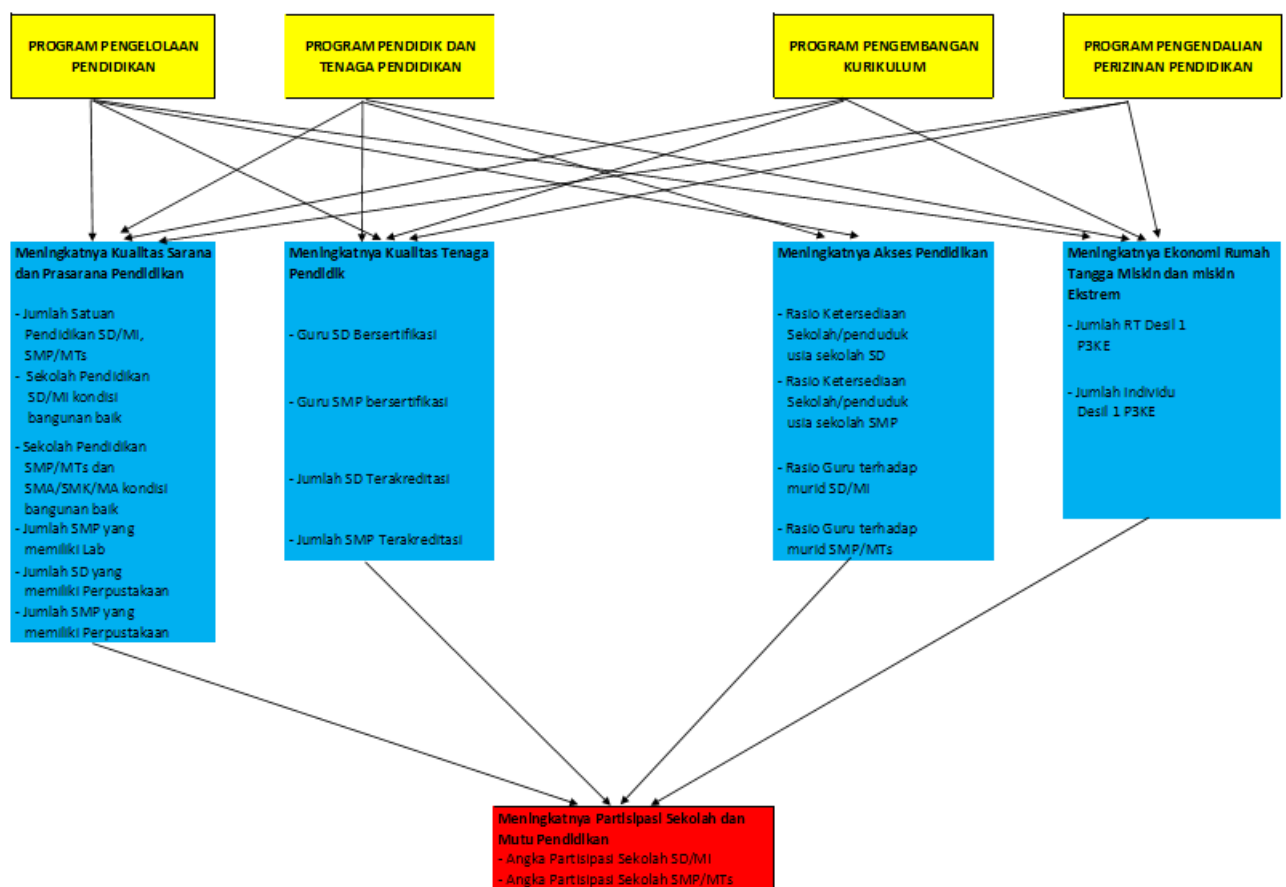
Logika program (theory of change) untuk peningkatan partisipasi sekolah dan mutu pendidikan tersebut memperlihatkan bahwa meningkatnya partisipasi sekolah tersebut (final outcome/goal) memiliki empat determinan kunci yaitu (1) Meningkatnya Kualitas Sarana dan

Prasarana Pendidikan (2) Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik (3) Meningkatnya Akses Pendidikan, dan (4) Meningkatnya Ekonomi Rumah Tangga Miskin dan miskin Ekstrem

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari kedua determinan kunci untuk peningkatan partisipasi sekolah dan mutu pendidikan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan indikator antara lain : Jumlah Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik, Jumlah SMP yang memiliki Lab, Jumlah SD yang memiliki Perpustakaan, Jumlah SMP yang memiliki Perpustakaan.
2. Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dengan indikator antara lain : Guru SD Bersertifikasi, Guru SMP bersertifikasi, Jumlah SD Terakreditasi, Jumlah SMP Terakreditasi.
3. Meningkatnya Akses Pendidikan dengan indikator antara lain : Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah SD, Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah SMP, Rasio Guru terhadap murid SD/MI, Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs.
4. Meningkatnya ekonomi rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan indikator antara lain : Jumlah RT Desil 1 P3KE dan Jumlah Individu Desil 1 P3KE.

Gambar 4.1  
TOC Bidang Pendidikan



Keterangan (program dan kegiatan):

Program/kegiatan Prioritas dan pendukung

1. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah
2. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama dan Pengadaan Perabot
3. Pembangunan Ruang Laboratorium, Perpustakaan, Jamban dan Pagar
4. Pembangunan Toilet/ Jamban SMPIT
5. Pembangunan UKS TK dan Area Bermain
6. Rehabilitasi Bangunan Toilet
7. Pemberian beasiswa siswa/santri
8. Penyediaan dana penunjang pendidikan
9. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
10. Pelatihan rencana pembelajaran bagi guru
11. Pelatihan kurikulum dan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan
12. Penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) atau sejenisnya
13. Perluasan Program Indonesia Pintar
14. Penyediaan dukungan sarana transportasi pendidikan
15. Penyediaan dukungan sarana rumah tinggal guru dan tenaga kependidikan
16. Penyediaan fasilitas pendukung sekolah bagi anak-anak kurang mampu dan miskin
17. Dukungan bantuan ekonomi bagi rumah tangga miskin ekstrem dan miskin
18. Dukungan program mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali sekolah
19. Distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues dan perangkat daerah terkait pendidikan pun perlu mempertimbangkan karakteristik pendidikan dari penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Gayo Lues selama 8,41 tahun.
2. Angka Putus Sekolah SD/MI Tahun 2021 sebesar 0.776 persen dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 2.53 persen.
3. Rendahnya tingkat kelulusan kepala keluarga hampir di setiap jenjang pendidikan menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan rumah tangga.

## **2. Logika Program (*Theory of Change*) Kesehatan**

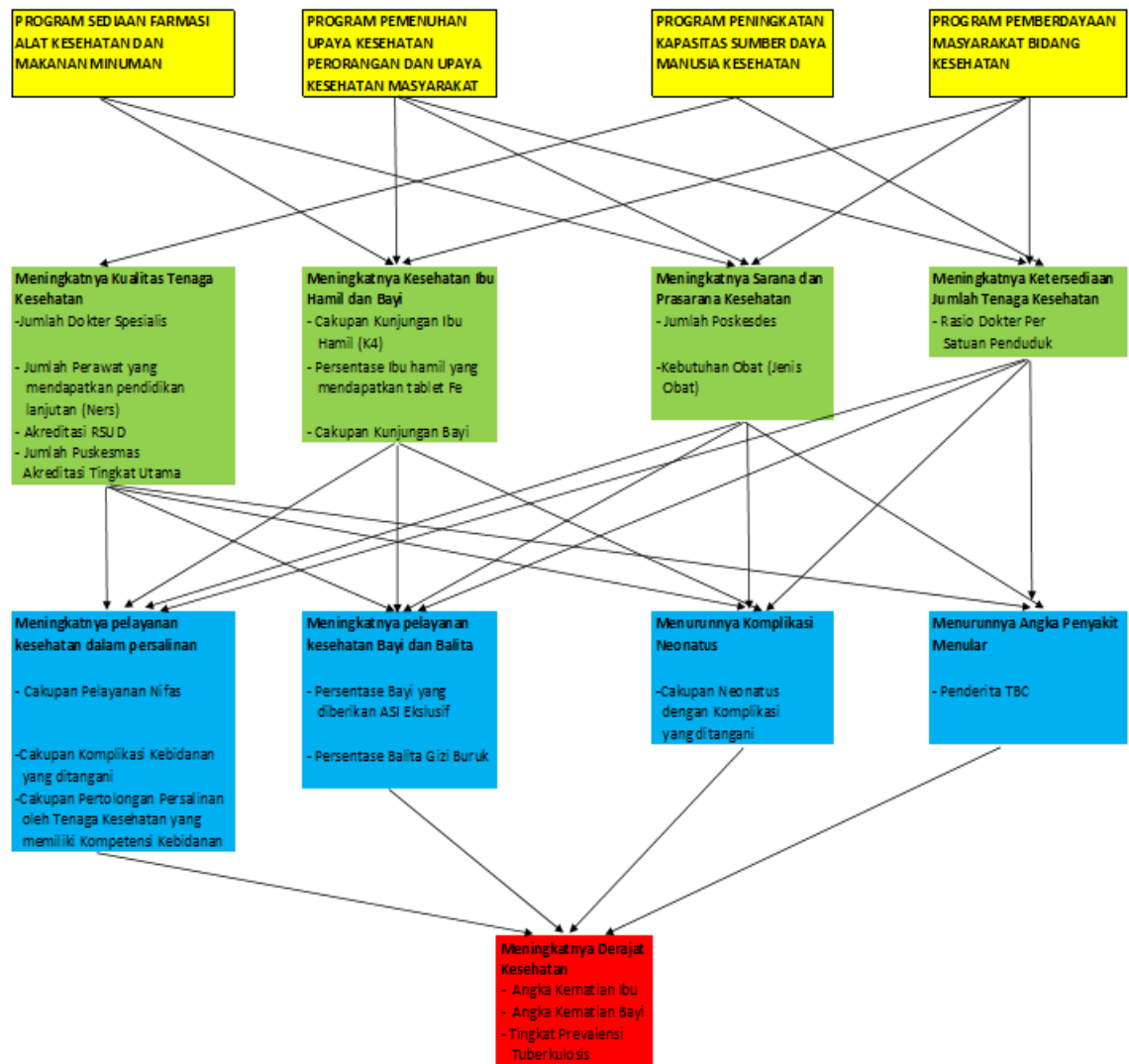
Logika program (theory of change) dibidang Kesehatan yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Gayo Lues berfokus pada Meningkatnya derajat Kesehatan yang mana indikatornya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Tingkat Prevalensi Tuberkulosis, Hal ini dikarenakan ketiga indikator tersebut dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan juga merupakan indikator SDGs/TPB Berkelanjutan. Sehingga perlu dilakukannya intervensi khusus dalam penanganannya



khususnya bagi penduduk miskin dan rentan miskin.

Logika program (theory of change) dibidang Kesehatan memperlihatkan bahwa meningkatnya derajat kesehatan dengan indikator angka kematian ibu, angka kematian bayi dan Tingkat Prevalensi Tuberkulosis memiliki empat determinan kunci, yaitu (1) Meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan (2) Meningkatnya pelayanan kesehatan Bayi dan Balita (3) Menurunnya Komplikasi Neonatus (4) Menurunnya Angka Penyakit Menular.

Gambar 4.2  
TOC Bidang Kesehatan



Keterangan (program dan kegiatan):

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
5. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
7. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

8. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
9. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
10. Pelayanan kesehatan pada Bumil dan Bufas.
11. Pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita
12. Pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD)
13. Pelayanan Kesehatan pada Usia Sekolah Dasar
14. Pelayanan Kesehatan pada Usia Remaja
15. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
16. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia
17. Program pemberian PMT Bumil KEK, pemantauan bumil anemi untuk minum tablet tambah darah
18. Program peningkatan kompetensi bidan dalam kegawat daruratan maternal
19. Peningkatan komitmen stakeholder dalam upaya penemuan kematian ibu dan bayi
20. Peningkatan kompetensi perawatan NICU dalam menangani kegawatdarutan
21. Peningkatan kompetensi bidan dalam kegawatdarutan neonatal, peningkatan cakupan bayi mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)
22. Peningkatan cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif
23. Peningkatan cakupan Imunisasi dasar lengkap.

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari keempat determinan kunci tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya Kualitas Tenaga Kesehatan, dengan indikator: Jumlah Dokter Spesialis, Jumlah Perawat yang mendapatkan pendidikan lanjutan (Ners), Akreditasi RSUD, Jumlah Puskesmas Akreditasi Tingkat Utama.
- 2) Meningkatnya Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi, dengan indikator: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4), Persentase Ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe, Cakupan Kunjungan Bayi.
- 3) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan, dengan indikator: Jumlah Poskesdes, Kebutuhan Obat (Jenis Obat).
- 4) Meningkatnya Ketersediaan Jumlah Tenaga Kesehatan, dengan indikator: Rasio Dokter Per Satuan Penduduk.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues dan perangkat daerah terkait kesehatan perlu mempertimbangkan karakteristik kesehatan dari penduduk miskin ekstrem, di antara karakteristik tersebut adalah:

1. Prevalensi stunting di kabupaten Gayo Lues pada Tahun 2021 sebesar 42.9 persen

dan menurun 34,6 persen di Tahun 2022, sementara Prevalensi Stunting di Provinsi Aceh pada Tahun 2021 sebesar 33,2 persen dan menurun 31,2 persen di Tahun 2022, hal ini menunjukkan angka stunting Gayo Lues selama dua tahun terakhir masih diatas angka stunting Aceh.

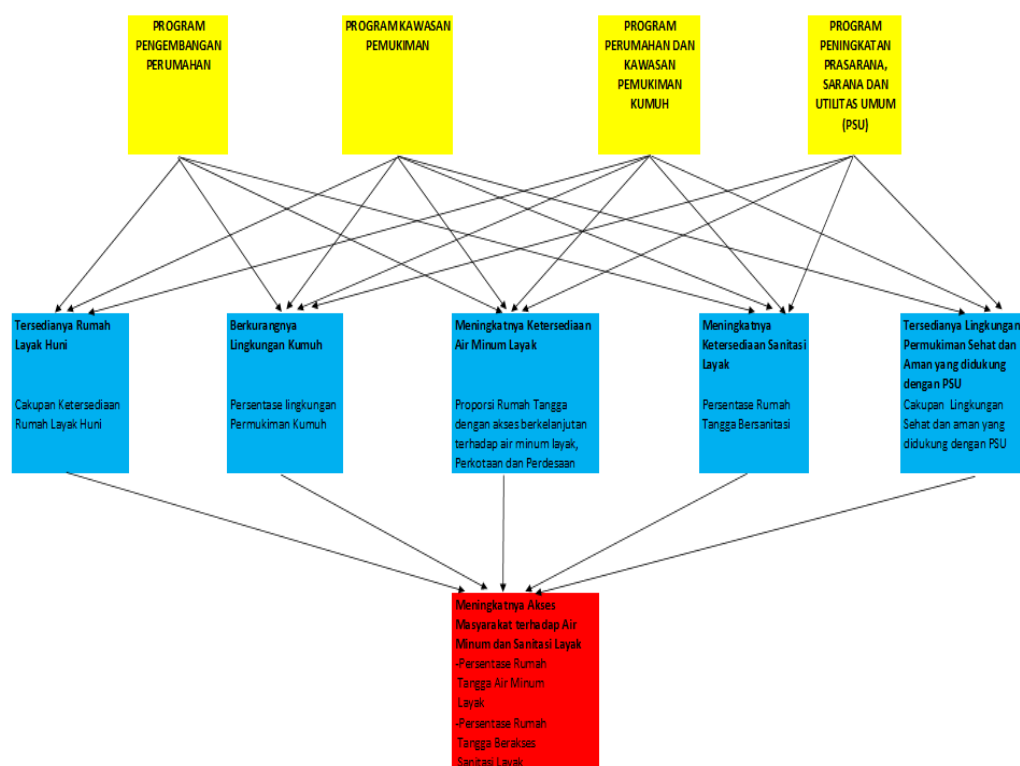
### **3. Logika Program (*Theory of Change*) Infrastruktur Dasar**

Logika program (theory of change) di Bidang Infrastruktur Dasar yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Gayo Lues mengambil fokus pada Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak, hal ini pun sesuai dengan target Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026, dengan masih relatif rendah persentase rumah tangga dengan sanitasi layak dan rendah persentase rumah tangga dengan air minum layak dalam level provinsi, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan intervensi khusus dalam pencapaiannya, khususnya bagi penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Gayo Lues.

Logika program (theory of change) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Gayo Lues memperlihatkan bahwa Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak (final outcome/goal) dengan indikator persentase rumah tangga air minum layak dan persentase rumah tangga berakses sanitasi layak memiliki Lima determinan kunci, yaitu:

- 1) Tersedianya Rumah Layak Huni, dengan indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.
- 2) Berkurangnya Lingkungan Kumuh, dengan indikator Persentase lingkungan Permukiman Kumuh.
- 3) Meningkatnya Ketersediaan Air Minum Layak, dengan indikator Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, Perkotaan dan Perdesaan .
- 4) Meningkatnya Ketersediaan Sanitasi Layak, dengan indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.
- 5) Tersedianya Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan PSU, dengan indikator Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

Gambar 4.3  
TOC Bidang Infrastruktur Dasar



**Keterangan (program dan kegiatan):**

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
3. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
4. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
5. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
6. Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan pengolahan Air limbah
8. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan drainase lingkungan
9. Kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
10. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan
11. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dan perangkat daerah terkait perumahan dan permukiman pun perlu mempertimbangkan karakteristik prasarana dasar penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

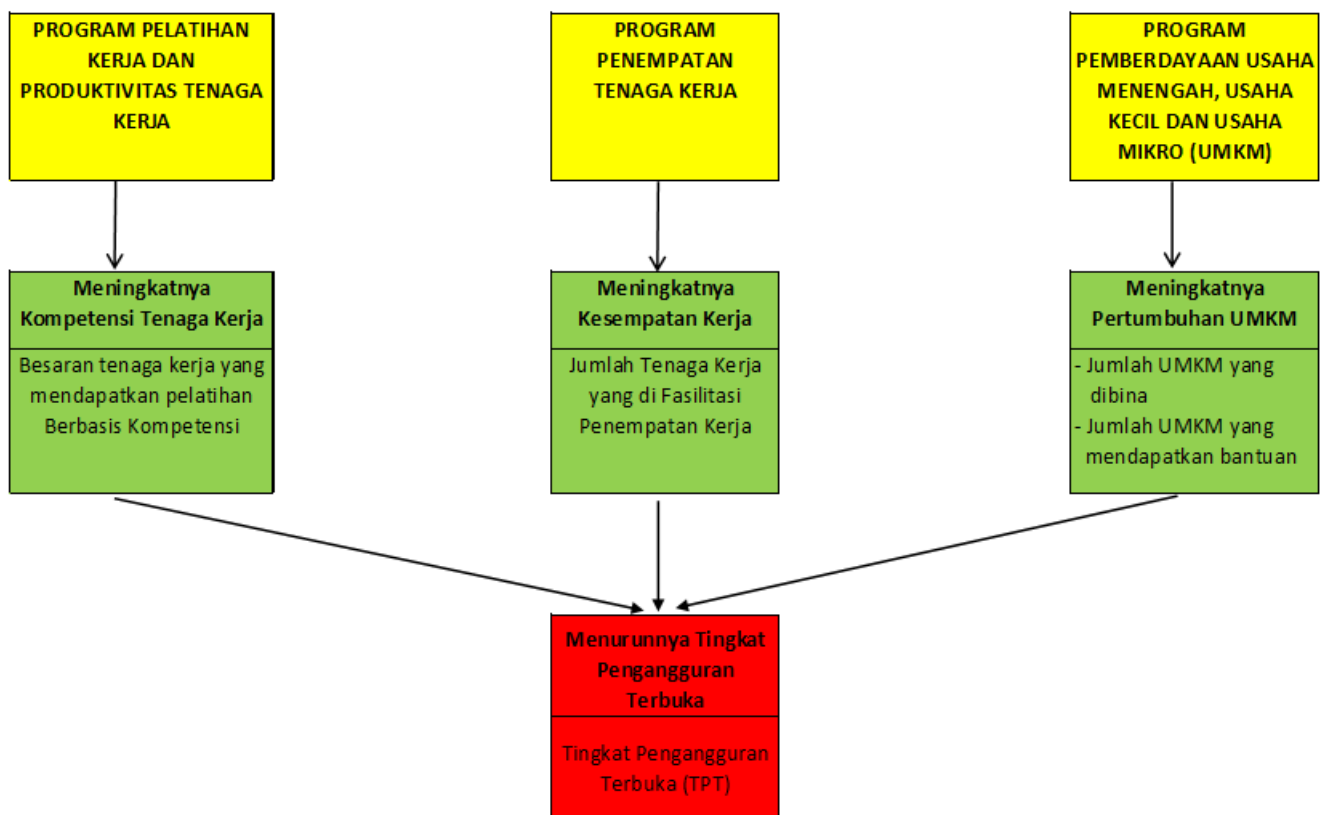
1. Penduduk miskin ekstrem di Gayo Lues masih memiliki keterbatasan akses.
2. Masih terdapat rumah tangga miskin ekstrem di Gayo Lues yang tidak menikmati Akses air minum layak, serta tidak memiliki toilet.

#### 4. Logika Program (Theory of Change) Ketenagakerjaan

Logika program (theory of change) di bidang ketenagakerjaan mengambil fokus pada menurunnya tingkat pengangguran, oleh karena itu perlunya intervensi khususnya bagi penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Gayo Lues dalam isu ketenagakerjaan.

Logika program (theory of change) yang telah disusun memperlihatkan bahwa menurunnya tingkat pengangguran terbuka (final outcome/goal) memiliki tiga determinan kunci, yaitu (1) meningkatnya kompetensi tenaga kerja (2) meningkatnya kesempatan kerja (3) Meningkatnya pertumbuhan UMKM .

Gambar 4.4  
TOC Bidang Ketenagakerjaan



Keterangan (Program dan Kegiatan)

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program peningkatan kesempatan kerja
3. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
4. Program pengembangan kawasan transmigrasi

5. Program perencanaan dan pembangunan industri
6. Program promosi penanaman modal
7. Program pelayanan penanaman modal
8. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan perangkat daerah yang memiliki kaitan dengan isu ketenagakerjaan di Kabupaten Gayo Lues perlu mempertimbangkan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah

1. Di Kabupaten Gayo Lues, Kepala dan anggota rumah tangga miskin ekstrem rata-rata berada pada usia produktif
2. Jika dilihat dari sumber penghasilan utama kepala rumah tangga miskin ekstrem, terdapat 50,99% pertanian.

### 5. Bidang Strategis Lainnya

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK Tahun 2023, menunjukkan bahwa terdapat 33.619 jiwa penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin) tidak bekerja, sedangkan sektor paling dominan pekerjaan penduduk 40% ini adalah petani (30.307 jiwa), wiraswasta (2.174 jiwa), Pedagang (1.319 jiwa), pegawai swasta (1.199 jiwa), Pekerja Lepas (806 jiwa), Lainnya (783 jiwa), Nelayan (140 jiwa) serta pensiunan (125 jiwa).

**Tabel 4.1 Informasi 40% Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Pekerjaan Individu Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2023**

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
1	Blangkejeren	8.824	4.533	24	633	508	978	56	541	314
2	Kutapanjang	3.031	2.821	6	55	95	249	10	39	83
3	Rikit Gaib	1.726	1.43	8	60	93	139	9	14	78
4	Terangun	3.218	3.419	28	112	125	109	14	78	39
5	Pining	1.918	2.152	19	66	44	55	3	10	11
6	Blangpegayon	2.469	2.549	17	44	80	222	4	4	58
7	Puteri Betung	3.501	3.99	15	80	15	102	7	7	45
8	Dabun Gelang	2.616	2.457	8	67	82	124	8	44	63
9	Blangjerango	2.673	2.929	4	88	59	71	4	35	36
10	Teripe Jaya	1.989	2.079	10	83	32	77	4	28	25



11	Pantan Cuaca	1.654	1.948	1	31	66	48	6	6	31
<b>Total (11)</b>		<b>33.619</b>	<b>30.307</b>	<b>140</b>	<b>1.319</b>	<b>1.199</b>	<b>2.174</b>	<b>125</b>	<b>806</b>	<b>783</b>

Sumber: P3KE, Kemenko PMK Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, penajaman sasaran program dan intervensi oleh Kabupaten Gayo Lues agar dapat diarahkan kepada individu penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dengan informasi pekerjaan paling dominan seperti dijelaskan diatas, yaitu (1) Buruh pertanian dan perkebunan, (2) Wiraswasta, (3) Pedagang, serta (4) Buruh dan tenaga lepas lainnya.

Adapun program kegiatan yang dapat diarahkan untuk bidang-bidang strategis lainnya dari 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah desil 1, 2, 3, 4 adalah program dan kegiatan yang mengarah kepada:

- 1) Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi:
  - a. Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program- program perlindungan sosial.
  - b. Meningkatkan koordinasi K/L dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah.
  - c. Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan).
  - d. Melibatkan komunitas, lembaga non pemerintah, dan swasta.
  - e. Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).
- 2) Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi:
  - a. Melalui peningkatan pendapatan/ akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar.
  - b. Melalui peningkatan kapasitas SDM
  - c. Melalui peningkatan kapasitas UMKM
  - d. Melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM
- 3) Pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang menysar penduduk miskin ekstrem, dengan strategi:
  - a. Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar
  - b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah

- c. Mendorong konvergensi anggaran
- d. Mendorong konsolidasi program
- e. Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pun, perlu mempertimbangkan karakteristik penduduk miskin ekstrem dan miskin terkait isu strategis. Diantara karakteristik umum penduduk miskin ekstrem dan miskin adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mayoritas buruh tani, buruh dagang, mengurus rumah tangga, dan kepala rumah tangga perempuan, mayoritas bekerja di sektor pertanian sebagai buruh dan berstatus informal.

Dengan karakteristik penduduk miskin ekstrem seperti yang sudah dijelaskan diatas, usulan konvergensi program kegiatan intervensi oleh dinas-dinas terkait yang direkomendasikan diantaranya:

1. Untuk Kepala Rumah Tangga perempuan, berpendidikan rendah, usia produktif:
  - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program pengembangan dan pemanfaatan pekarangan, pelatihan keterampilan dll,
  - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pemberdayaan ekonomi kelompok.
2. Untuk Rumah Tangga dengan sanitasi, air minum dan rumah tidak layak:
  - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program padat karya pembangunan sarana sanitasi (WC Komunal), air minum (sumber air minum bersama), dan tenaga bantu renovasi rumah.
3. Untuk Anggota Rumah Tangga usia produktif berpendidikan rendah:
  - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pelatihan keterampilan, budidaya, sumber daya alam setempat menjadi bahan baku.
  - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pemberdayaan ekonomi kelompok.
4. Untuk Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada Balita:
  - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program bantuan PMT balita kepada posyandu/PKM untuk menstimulasi kehadiran imunisasi di posyandu/PKM.

## **4.2 ANALISIS ANGGARAN**

### **4.2.1. Analisis Ruang Fiskal**

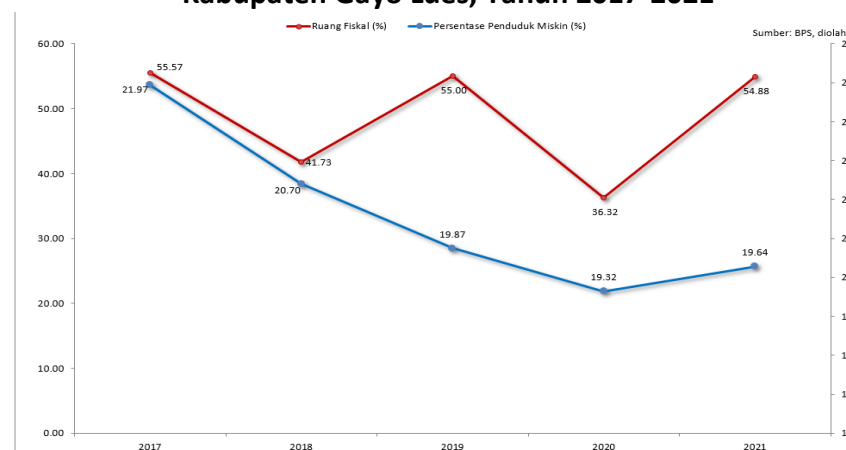
Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Konsep ruang fiskal ini berkaitan dengan kesinambungan fiskal, yaitu berhubungan dengan kemampuan pemerintah di masa depan untuk membiayai program-program yang diinginkan, membayar kembali pokok dan bunga utang serta menjamin solvabilitas keuangan pemerintah.

Ruang fiskal Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung fluktuatif, di mana pada tahun 2017 Kabupaten Gayo Lues memiliki keleluasaan fiskal sebesar 55,57%, dan menurun ke 41,73% ditahun 2018, hingga pada tahun 2021 keleluasaan fiskal Kabupaten Gayo Lues sebesar 54,88%. Sedangkan dari sisi persentase penduduk miskin Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.

Jika dilihat dari ruang fiskal Kabupaten Gayo Lues dalam kurun waktu Tahun 2017-2021, dibandingkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sudah sejalan dan menunjukkan bahwa intervensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam rangka mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya telah sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Lebih jelas terkait Perkembangan Persentase Ruang Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 dilihat pada gambar 4.6.

**Gambar 4.5.**  
**Perkembangan Ruang Fiskal (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%)**  
**Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2017-2021**

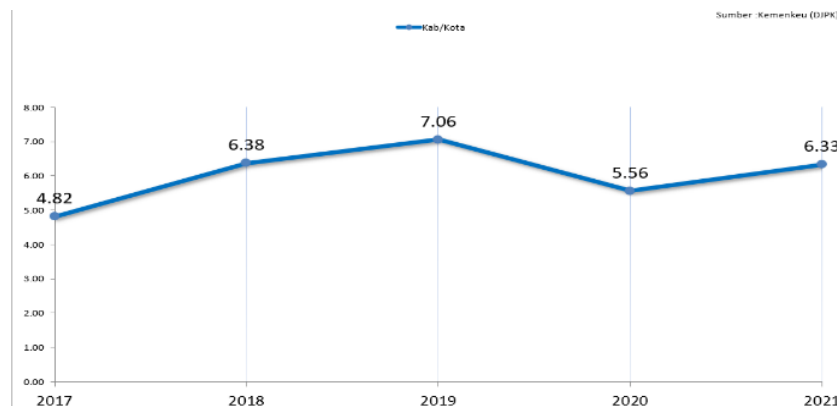


#### 4.2.2. Analisis Derajat Otonomi Fiskal

Analisis derajat otonomi fiskal dapat dilihat dari rasio kemandirian suatu daerah. Rasio kemandirian daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah kepada transfer dari pemerintah pusat, dalam rangka membiayai seluruh belanjanya, yang dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan. Rasio ketergantungan adalah selisih dari 100% dikurangi dengan rasio kemandirian daerah. Bila rasio kemandirian daerah adalah 7,06%, maka rasio ketergantungannya adalah  $100\% - 7,06\% = 92,94\%$ .

Berdasarkan analisis derajat otonomi fiskal, terlihat bahwa kemandirian daerah dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh proses pemulihan ekonomi pasca bencana pada tahun 2020 akibat bencana non alam pandemi global Covid-19.

Gambar 4.6  
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (%) Kabupaten Gayo Lues  
Tahun 2017-2021



Berdasarkan Gambar 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah harus terus ditingkatkan, karena berdasarkan kondisi terakhir ketergantungan daerah dari pihak eksternal pada tahun 2021 masih tinggi yaitu mencapai 93,67%. Oleh sebab itu maka Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2021 belum dapat secara leluasa menampung seluruh usulan program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masih harus menyaring skala prioritas dari yang sebenarnya juga prioritas.

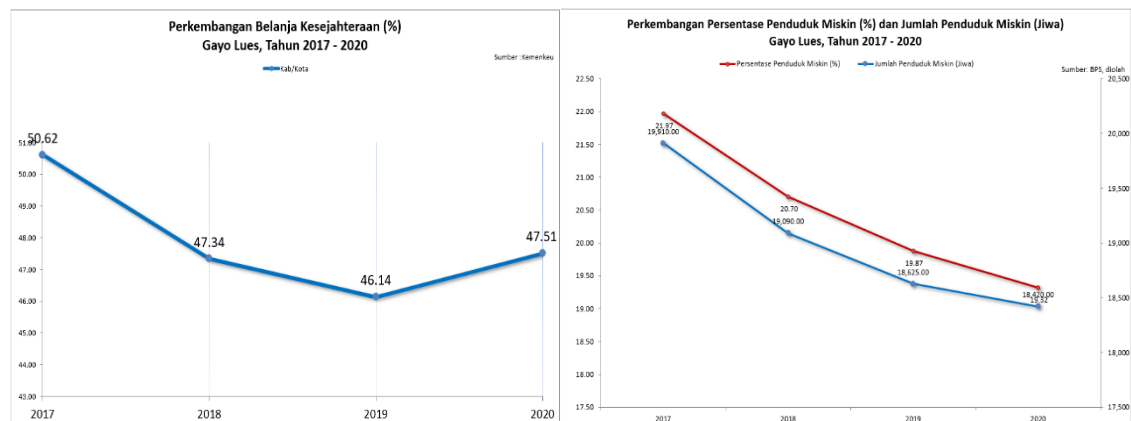
#### 4.2.3. Belanja Menurut Fungsi Terkait Penanggulangan

##### a. Belanja Menurut Fungsi Kesejahteraan

Persentase alokasi belanja kesejahteraan merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Persentase alokasi belanja kesejahteraan merupakan total APBD menurut fungsi perlindungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan serta fungsi fasilitas umum dan perumahan. Dalam kurun empat tahun terakhir (2017-2020), Persentase alokasi belanja kesejahteraan Kabupaten Gayo Lues terus meningkat, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2019 namun alokasi belanja kesejahteraan meningkat Kembali pada tahun 2020 sebesar 47,51%.

Peningkatan persentase belanja publik selama empat tahun terakhir di Kabupaten Gayo Lues telah berkontribusi sangat positif pada penurunan persentase penduduk miskin dalam periode 2017-2020.

Gambar 4.7.  
Belanja Menurut Fungsi Kesejahteraan



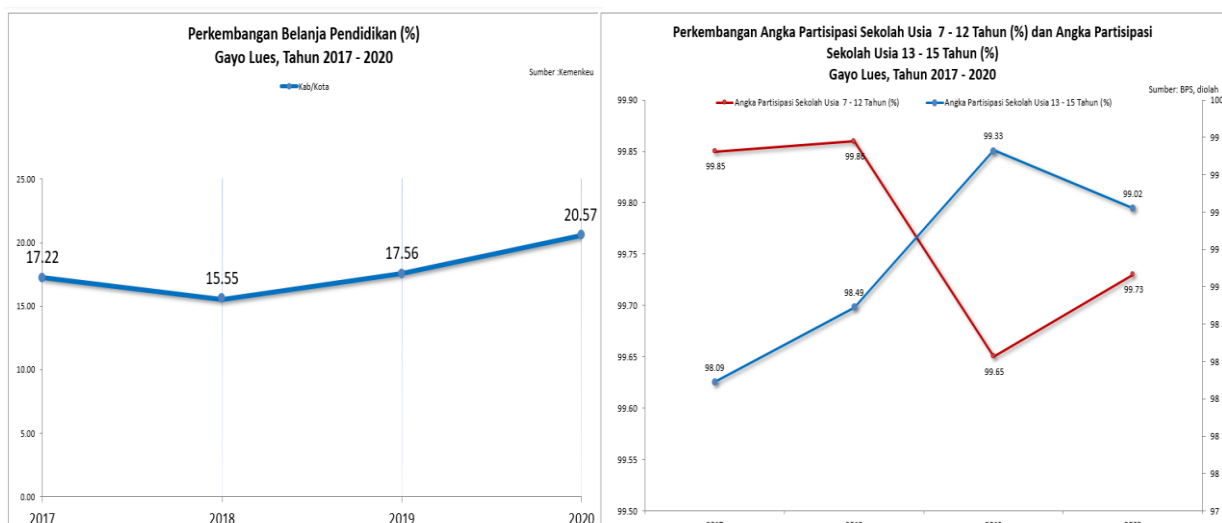
### b. Belanja Menurut Fungsi Pendidikan

Belanja untuk meningkatkan akses layanan pendidikan berada pada Dinas Pendidikan. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020 proporsi anggaran dinas pendidikan terhadap total belanja daerah cenderung meningkat sebagaimana gambar 4.8.

Amanat Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat 1 telah mengatur agar alokasi untuk sektor pendidikan di masing-masing daerah minimal 20% harus teralokasikan dari total APBD, berdasarkan ketentuan tersebut, Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2020 alokasi sektor pendidikan mencapai 20,57%.

Sasaran utama dari besarnya alokasi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar wajib belajar dua belas tahun. Data capaian Kabupaten Gayo Lues untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Capaian tersebut sempat menurun pada tahun 2019 untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan pada tahun 2020 untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs, namun tren linear menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021-2022.

Gambar 4.8.  
Belanja Menurut Fungsi Pendidikan

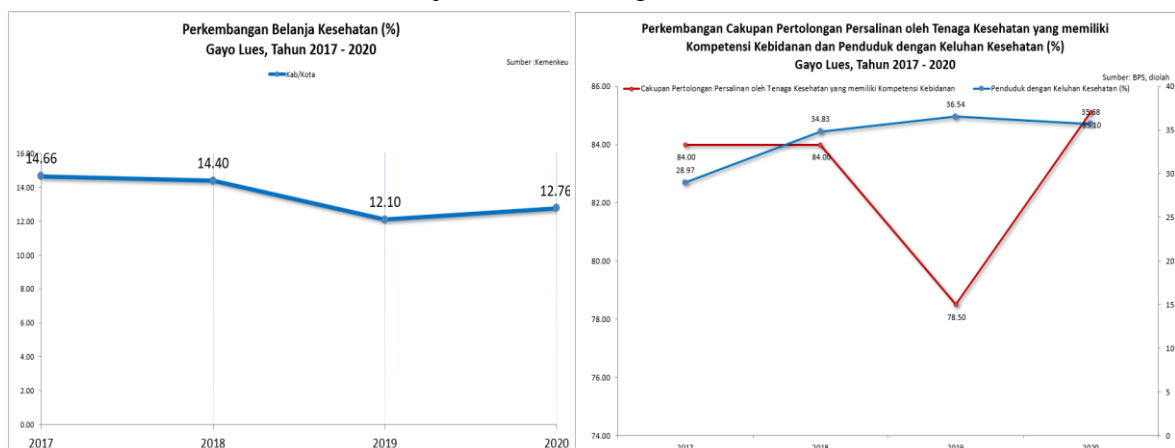


### c. Belanja Menurut Fungsi Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari isu kemiskinan, seperti halnya Pendidikan, undang-undang telah mengatur agar alokasi APBD minimal sekurang-kurangnya 10% harus terpenuhi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar sektor kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 2017 alokasi belanja kesehatan Kabupaten Gayo Lues sebesar 14,66% namun mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 12,10%, Selanjutnya pada tahun 2020 alokasi belanja kesehatan menunjukkan kenaikan menjadi 12,76%.

Sasaran utama dari peningkatan alokasi anggaran kesehatan adalah perbaikan indikator-indikator kunci kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, peningkatan kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih, angka morbiditas, perbaikan penduduk dengan keluhan kesehatan dan lain-lainnya, dengan demikian ketika alokasi anggaran kesehatan terus meningkat, kondisi ini diikuti dengan semakin membaiknya indikator penduduk dengan keluhan kesehatan yang semakin menurun dan semakin meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Gambar 4.9.  
Belanja Menurut Fungsi Kesehatan



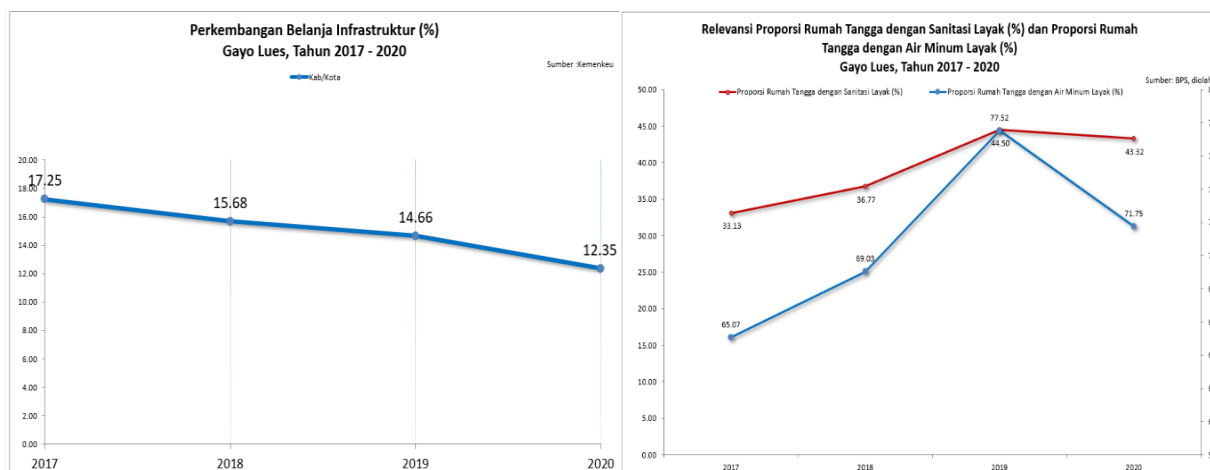
### d. Belanja Menurut Fungsi Infrastruktur Dasar

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar merupakan bagian tidak terpisahkan dari isu kemiskinan, karena prioritas tersebut, maka alokasi anggaran APBD pun harus tersedia untuk perbaikan indikator-indikator yang terkait dengan infrastruktur dasar. Kabupaten Gayo Lues mengalokasikan belanja infrastruktur dasar pada tahun 2017 sebesar 17,25%, namun mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 12,35%.

Sasaran utama dari alokasi anggaran infrastruktur dasar adalah perbaikan indikator-indikator kunci perumahan dan fasilitas umum seperti proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, air minum layak dan lainnya. Hal ini terlihat dengan semakin membaiknya indikator seperti proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan proporsi rumah tangga dengan air minum layak.



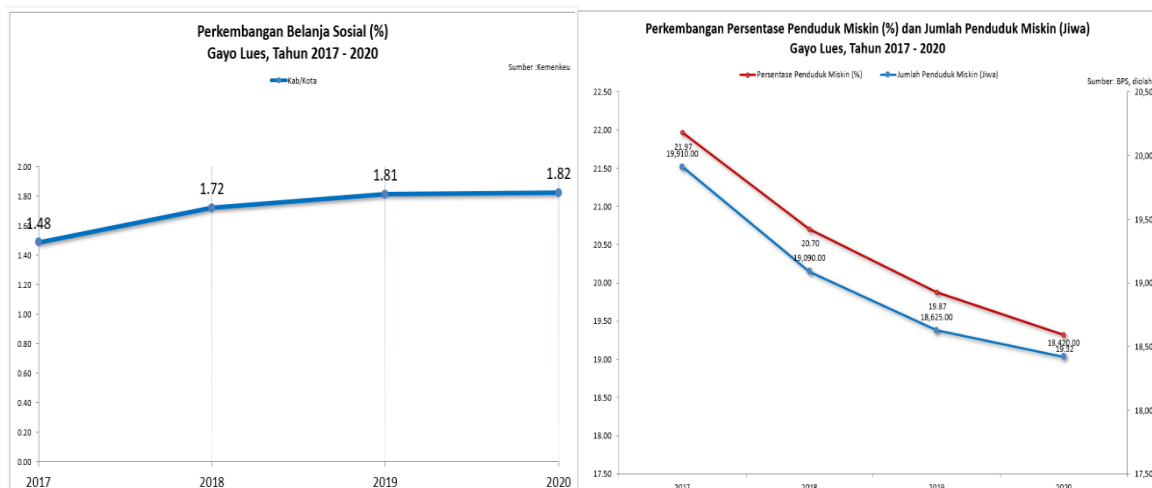
Gambar 4.10.  
Belanja Menurut Fungsi Infrastruktur Dasar



#### e. Belanja Sosial

Persentase alokasi belanja sosial merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam rangka memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Namun dalam kurun waktu 2017-2020, alokasi persentase belanja sosial masih cukup rendah dengan rata-rata proporsi dibawah 2%, namun adanya peningkatan dari tahun ke tahun Dimana pada tahun 2017 dengan alokasi 1,48%, 2018 (1,72%), 2019 (1,81%) serta 2020 (1,82%). Langkah konkrit yang diperlukan adalah meningkatkan alokasi persentase belanja sosial dalam APBD Kabupaten Gayo Lues, perlindungan sosial bagi masyarakat selama ini lebih bertumpu kepada program-program Pemerintah Pusat seperti Program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), BPUM, BST dan program Sembako

Gambar 4.11.  
Perkembangan Alokasi Belanja Sosial (%)



#### **4.2.4 Kinerja Pelaksanaan APBK**

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), maka analisis kinerja pelaksanaan APBK harus dilakukan terhadap APBK itu sendiri, analisis kinerja pelaksanaan APBK pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Gayo Lues merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Kabupaten Gayo Lues yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan DPRK Gayo Lues serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues. Secara umum kebijakan keuangan Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat dari perkembangan APBK tahun per tahunnya. Secara umum struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

##### **A. Pendapatan**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana desa, sesangan transfer pemerintah provinsi yaitu: dana bagi hasil pajak dari provinsi dan bagi hasil lainnya lainnya, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah lainnya;

##### **B. Belanja**

Belanja Kabupaten Gayo Lues meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Kabupaten Gayo Lues yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Kabupaten Gayo Lues dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kabupaten Gayo Lues. Belanja Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beberapa komponen:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Modal dalam APBK digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan. Secara spesifik kebijakan alokasi belanja daerah Kabupaten Gayo Lues menitikberatkan alokasi belanja daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan bidang urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepadapemerintah desa.

### **C. Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBK dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPK. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBK ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan realisasi pendapatan Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 realisasi pendapatan sebesar Rp. 976.610.487.499,45 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 866.299.706.637,24 dengan rata-rata pertumbuhan minus sebesar 3 persen. Menurut kelompok pendapatan Kabupaten Gayo Lues, rata-rata pertumbuhan positif pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 2 persen, dana perimbangan rata-rata pertumbuhan menurun minus 1 persen. Sebaliknya untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2021, pada tahun 2020 pendapatan hibah meningkat dikarenakan mendapat bantuan hibah dari provinsi untuk penanganan covid-19 dan infrastruktur secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan sebesar 2.569 persen.

Rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Gayo Lues selama periode 2017- 2021 minus 3 persen, dimana pada tahun 2017 sebesar Rp.981.737.098.947,17 dan pada tahun 2021 sebesar Rp.865.796.574.657,60, yang terdiri dari pertumbuhan rata-rata dari belanja operasi sebesar minus 2 persen, belanja modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 4 persen, belanja tidak terduga meningkat sebesar 19 persen dan belanja transfer meningkat sebesar 0,1 persen.

Sedangkan rata-rata pertumbuhan pembiayaan Kabupaten Gayo Lues selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan negatif mencapai minus 37 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah sebesar minus 41persen, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan stagnan sebesar minus 0 persen. Lebih jelas mengenai realisasi dan trend Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Gayo Lues periode Tahun 2017-2021 pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel 4.2**  
**Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten**  
**Gayo Lues 2017-2021**

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>976.610.487.499,45</b>	<b>860.506.512.575,25</b>	<b>955.951.451.751,26</b>	<b>920.676.739.729,40</b>	<b>866.299.706.637,24</b>	<b>(3)%</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>60.312.455.602,47</b>	<b>48.758.464.134,18</b>	<b>51.415.803.751,47</b>	<b>58.402.728.094,40</b>	<b>63.638.387.113,24</b>	<b>2%</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	5.433.785.265,80	6.144.707.294,00	6.978.714.035,00	5.904.228.419,00	7.877.737.919,00	11%
	Pendapatan Retribusi Daerah	22.296.472.033,00	1.427.456.490,00	1.719.285.047,00	1.019.816.159,00	1.254.803.190,00	(23)%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.522.600.616,60	3.773.178.707,00	3.987.633.126,00	4.240.372.089,26	3.739.145.018,76	2%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.059.597.687,07	37.413.121.643,18	38.730.171.543,47	47.238.311.427,14	50.766.700.985,48	15%
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>916.182.305.212,98</b>	<b>799.905.438.023,07</b>	<b>890.680.674.711,79</b>	<b>821.686.800.104,00</b>	<b>789.832.405.524,00</b>	<b>(3)%</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>	<b>571.558.575.124,00</b>	<b>649.955.059.479,00</b>	<b>585.232.201.100,00</b>	<b>539.387.276.926,00</b>	<b>534.811.046.801,00</b>	<b>(1)%</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak	10.742.399.185,00	8.338.551.222,00	7.186.270.673,00	11.414.981.130,00	10.525.027.932,00	4%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	8.004.907.742,00	8.705.340.153,00	5.521.572.021,00	4.636.120.659,00	5.808.624.051,00	(5)%
	Dana Alokasi Umum	462.943.021.000,00	462.943.021.000,00	472.230.875.000,00	423.662.731.000,00	419.760.894.000,00	(2)%
	Dana Alokasi Khusus	89.868.247.197,00	169.968.147.104,00	100.293.483.406,00	99.673.444.137,00	98.716.500.818,00	12%

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>	<b>112.903.222.000,00</b>	<b>127.709.134.895,00</b>	<b>112.011.066.895,00</b>	<b>124.146.254.000,00</b>	<b>134.861.957.800,00</b>	<b>5%</b>
	Dana Penyesuaian	112.903.222.000,00	127.709.134.895,00	112.011.066.895,00	124.146.254.000,00	134.861.957.800,00	5%
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>231.720.508.088,98</b>	<b>22.241.243.649,07</b>	<b>193.437.406.716,79</b>	<b>158.153.269.178,00</b>	<b>120.159.400.923,00</b>	<b>159%</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.580.968.062,23	22.241.243.649,07	31.390.213.275,79	30.792.926.101,00	27.726.948.603,00	11%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	117.300.000,00	-	-	(25)%
	Dana Otonomi Khusus	212.139.540.026,75	-	161.929.893.441,00	92.360.343.077,00	-	(61)%
	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	-	-	-	35.000.000.000,00	92.432.452.320,00	164%
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>115.726.684,00</b>	<b>11.842.610.418,00</b>	<b>13.854.973.288,00</b>	<b>40.587.211.531,00</b>	<b>12.828.914.000,00</b>	<b>2.569%</b>
	Pendapatan Hibah	2.663.875,00	11.837.360.000,00	13.850.800.000,00	40.566.250.000,00	-	111.094%
	Pendapatan Lainnya	113.062.809,00	5.250.418,00	4.173.288,00	20.961.531,00	12.828.914.000,00	15.347%
	<b>BELANJA</b>	<b>981.737.098.947,17</b>	<b>872.242.666.102,85</b>	<b>997.301.204.353,29</b>	<b>922.032.643.854,40</b>	<b>865.796.574.657,60</b>	<b>(3)%</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>560.800.703.232,00</b>	<b>513.860.742.203,85</b>	<b>621.477.939.644,61</b>	<b>540.757.456.053,00</b>	<b>504.558.624.112,60</b>	<b>(2)%</b>
	Belanja Pegawai	212.150.728.858,00	219.879.393.388,00	232.267.735.256,00	271.562.231.306,00	233.033.767.681,00	3%
	Belanja Barang dan Jasa	250.279.029.214,00	250.080.915.915,85	294.748.042.427,61	235.677.224.747,00	231.617.001.287,60	(1)%



No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Subsidi	2.380.320.000,00	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	89.489.569.160,00	36.388.752.900,00	82.791.461.961,00	16.546.400.000,00	30.217.065.044,00	18%
	Belanja Bantuan Sosial	6.501.056.000,00	7.511.680.000,00	11.670.700.000,00	16.971.600.000,00	9.690.790.100,00	18%
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>241.994.974.893,00</b>	<b>182.929.286.128,00</b>	<b>189.666.012.327,68</b>	<b>158.855.311.972,40</b>	<b>192.711.178.360,00</b>	<b>(4)%</b>
	Belanja Tanah	300.356.456,00	1.062.999.760,00	-	2.171.408.000,00	4.416.728.320,00	64%
	Belanja Peralatandan Mesin	50.573.152.710,00	31.381.165.940,00	24.561.272.300,00	35.623.882.341,40	21.412.736.943,00	(14)%
	Belanja Gedung dan Bangunan	45.758.008.700,00	26.562.695.958,00	51.167.562.475,68	49.096.877.587,00	61.033.107.800,00	18%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.822.019.527,00	110.187.713.170,00	112.754.354.752,00	64.508.416.350,00	104.771.126.217,00	0%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.541.437.500,00	13.734.711.300,00	1.182.822.800,00	7.454.727.694,00	1.077.479.080,00	139%
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>24.292.898.900,00</b>	<b>26.465.320.000,00</b>	<b>25.919.170.500,00</b>	<b>63.548.507.560,00</b>	<b>14.884.920.415,00</b>	<b>19%</b>
	Belanja Tidak Terduga	24.292.898.900,00	26.465.320.000,00	25.919.170.500,00	63.548.507.560,00	14.884.920.415,00	19%
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>154.648.521.922,17</b>	<b>148.987.317.771,00</b>	<b>160.238.081.881,00</b>	<b>158.871.368.269,00</b>	<b>153.641.851.770,00</b>	<b>(0,1)%</b>
	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>750.400.800,00</b>	<b>741.664.305,00</b>	<b>571.656.615,00</b>	<b>797.864.500,00</b>	-	<b>(21)%</b>
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	602.756.200,00	569.190.178,00	442.525.564,00	719.547.700,00	-	(16)%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	147.644.600,00	172.474.127,00	129.131.051,00	78.316.800,00	-	(37)%
	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>153.898.121.122,17</b>	<b>148.245.653.466,00</b>	<b>159.666.425.266,00</b>	<b>158.073.503.769,00</b>	<b>153.641.851.770,00</b>	<b>0%</b>

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tranfer Bantuan Keuangan Ke Desa	153.473.989.056,17	147.821.521.400,00	159.242.293.200,00	158.015.630.769,00	153.641.851.770,00	0%
	Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya	424.132.066,00	424.132.066,00	424.132.066,00	57.873.000,00	-	(47)%
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(5.126.611.447,72)</b>	<b>(11.736.153.527,60)</b>	<b>(41.349.752.602,03)</b>	<b>(1.355.904.125,00)</b>	<b>503.131.979,64</b>	<b>37%</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>						
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>68.259.596.650,68</b>	<b>62.132.926.202,96</b>	<b>49.396.772.175,36</b>	<b>6.913.307.073,33</b>	<b>3.557.402.948,33</b>	<b>(41)%</b>
	SiLPA	68.259.596.650,68	62.132.926.202,96	49.396.772.175,36	6.913.307.073,33	3.557.402.948,33	(41)%
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0%
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>67.259.596.650,68</b>	<b>61.132.926.202,96</b>	<b>48.396.772.175,36</b>	<b>4.913.307.073,33</b>	<b>3.557.402.948,33</b>	<b>(37)%</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>62.132.985.202,96</b>	<b>49.396.772.675,36</b>	<b>7.047.019.573,33</b>	<b>3.557.402.948,33</b>	<b>4.060.534.927,97</b>	<b>(35)%</b>

## BAB V

### LOKASI PRIORITAS

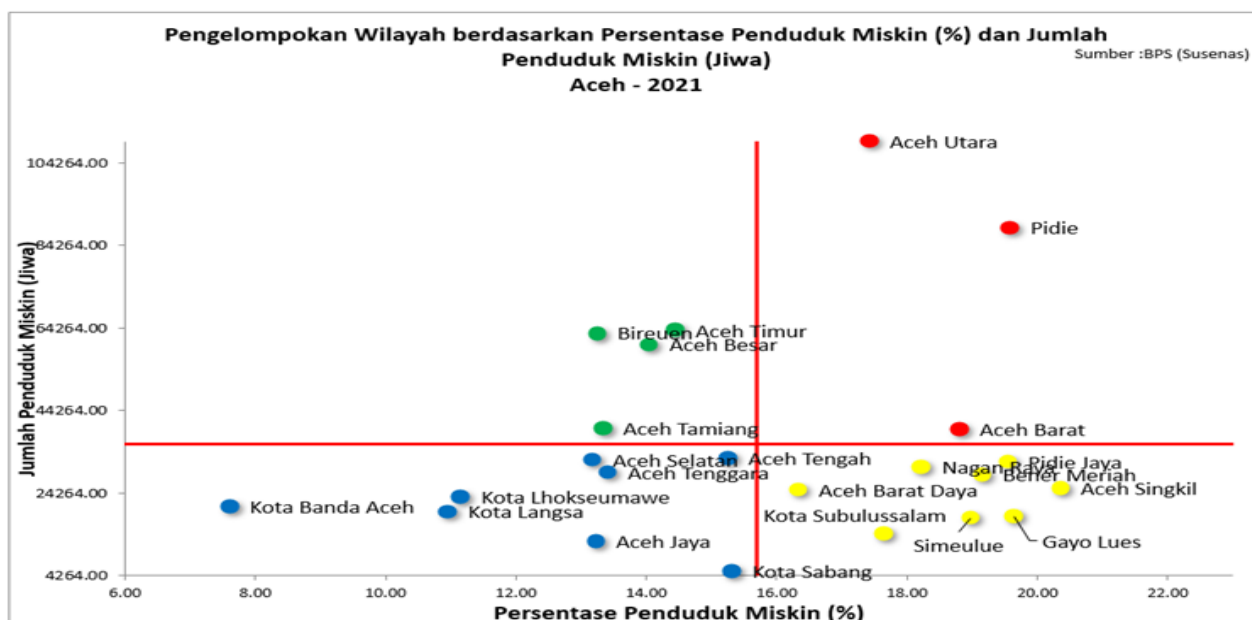
#### 5.1. Analisis Kuadran Wilayah

Wilayah yang menjadi prioritas intervensi berdasarkan indikator kemiskinan, dapat diketahui dengan melakukan proses pemetaan wilayah berdasarkan capaian indikator kemiskinan.

Untuk mendapatkan wilayah prioritas, maka dilakukan analisis grafik dengan menentukan koordinat yang dibentuk oleh pasangan indikator. Pasangan indikator yang dimaksud bisa berupa pasangan antara indikator utama vs indikator pendukung, dimana masing-masing indikator diletakkan pada sumbu x (horizontal) dan sumbu y (vertikal). Kemudian dari hasil capaian indikator, didapat titik-titik wilayah yang terpisah dalam empat kuadran. Masing-masing kuadran mewakili urutan prioritas kelompok wilayah intervensi terhadap indikator kemiskinan yang bersangkutan sekaligus memberikan informasi lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut ini beberapa analisis kuadran wilayah untuk intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues:

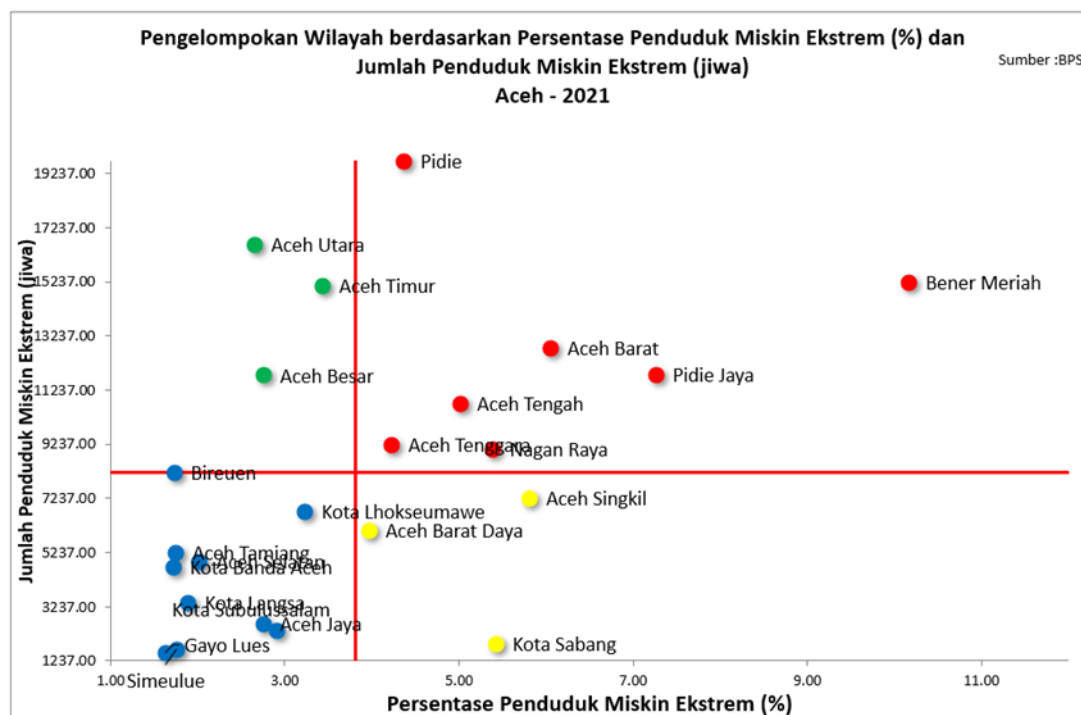
Pada tataran wilayah prioritas makro untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2021, maka wilayah prioritas perlu diarahkan kepada:



<b>Prioritas pertama</b>	Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat.
<b>Prioritas kedua</b>	Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Nagan raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues

<b>Prioritas ketiga</b>	Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Tamiang
<b>Prioritas keempat</b>	Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang.

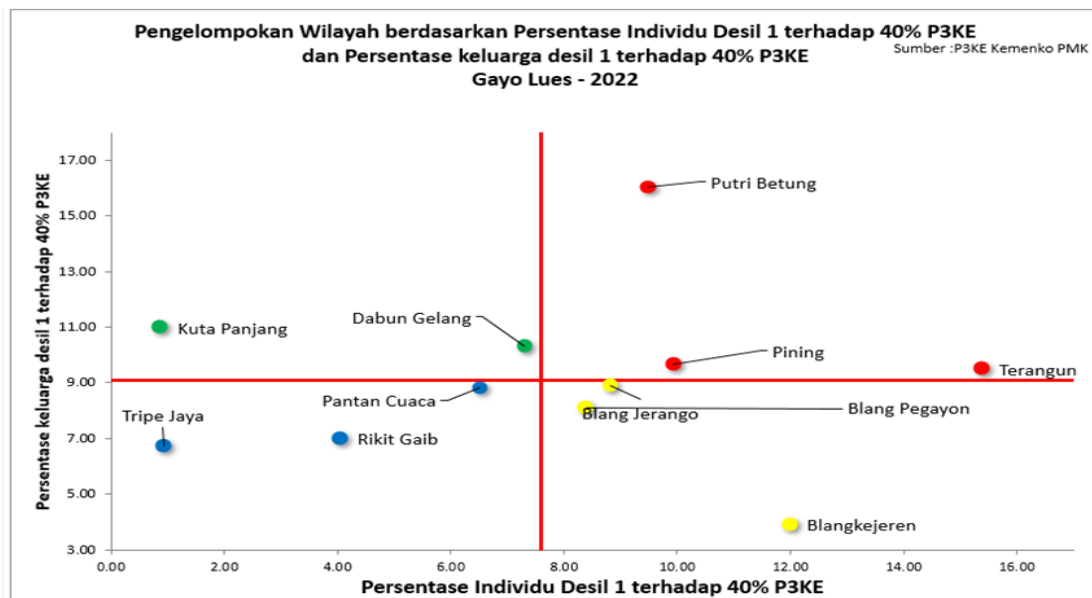
Sedangkan untuk wilayah prioritas makro penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Aceh tahun 2021, maka wilayah prioritas perlu diarahkan kepada:



<b>Prioritas pertama</b>	Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Nagan Raya
<b>Prioritas kedua</b>	Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Sabang.
<b>Prioritas ketiga</b>	Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar.
<b>Prioritas keempat</b>	Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Langsa, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Gayo Lues.

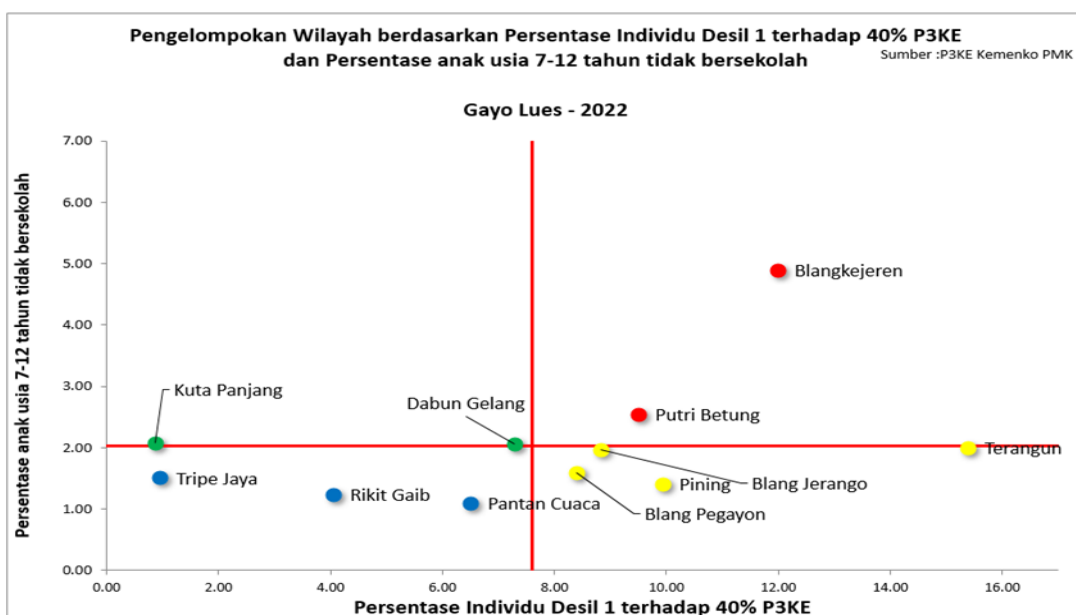
### 5.1.1. Wilayah Prioritas Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues

1. Wilayah prioritas berdasarkan persentase individu Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE



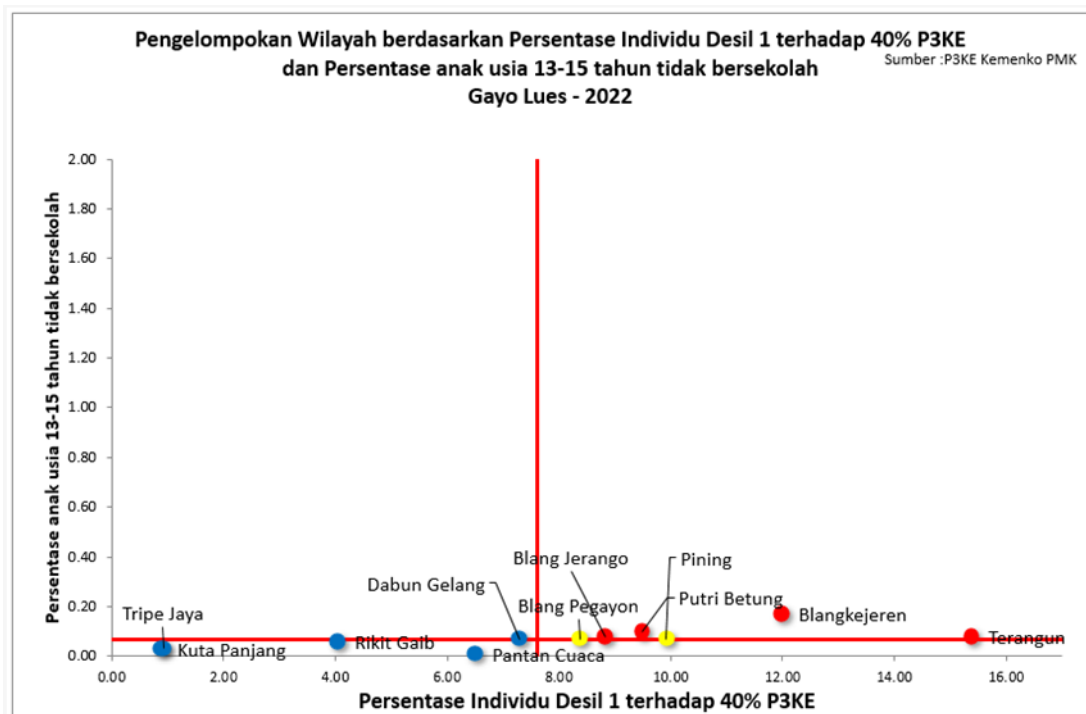
<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Terangun, Kecamatan Putri Betung, dan Kecamatan Pining
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan BlangPegayon dan Kecamatan Blangkejeran.
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Kuta Panjang
<b>Prioritas keempat</b>	Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Pantan Cuaca dan Kecamatan Rikit Gaib.

2. Wilayah prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase anak usia 7-12 tahun tidak bersekolah



<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Blangkejeren dan Kecamatan Putri Betung
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Terangun, Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Pining dan Kecamatan BlangPegayon.
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Kuta Panjang
<b>Prioritas keempat</b>	Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Pantan Cuaca dan Kecamatan Rikit Gaib.

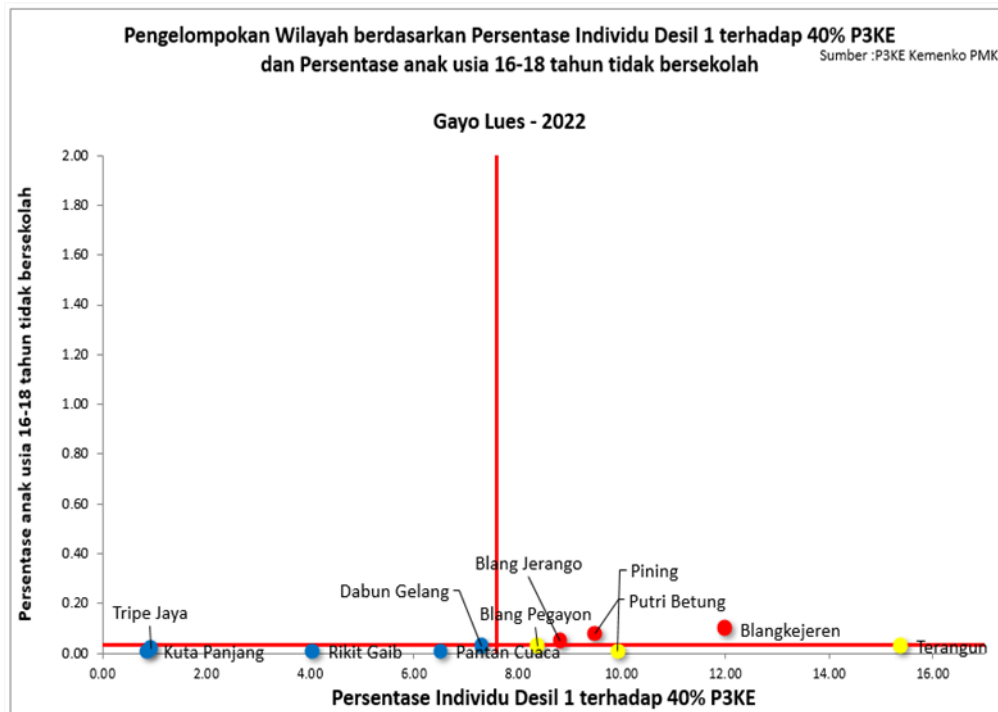
3. Distrik prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40 % P3KE dengan persentase anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah



<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blangjerango Kecamatan Putri Betung dan Kecamatan Terangun
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Kecamatan Pining dan Kecamatan BlangPegayon.
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Dabun Gelang

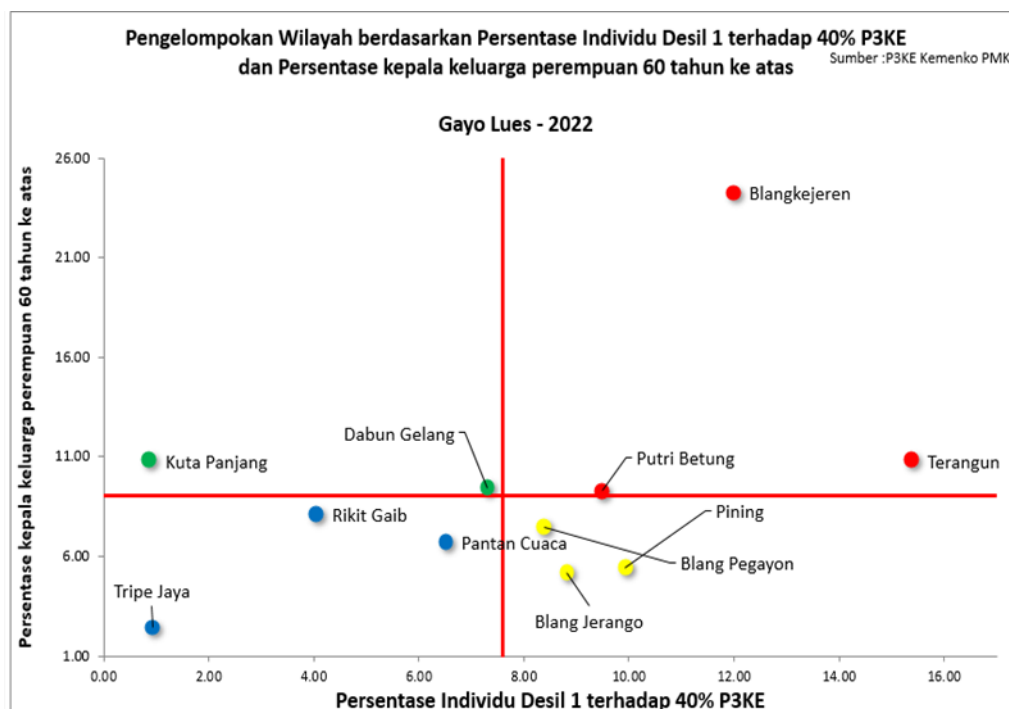


4. Wilayah prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah



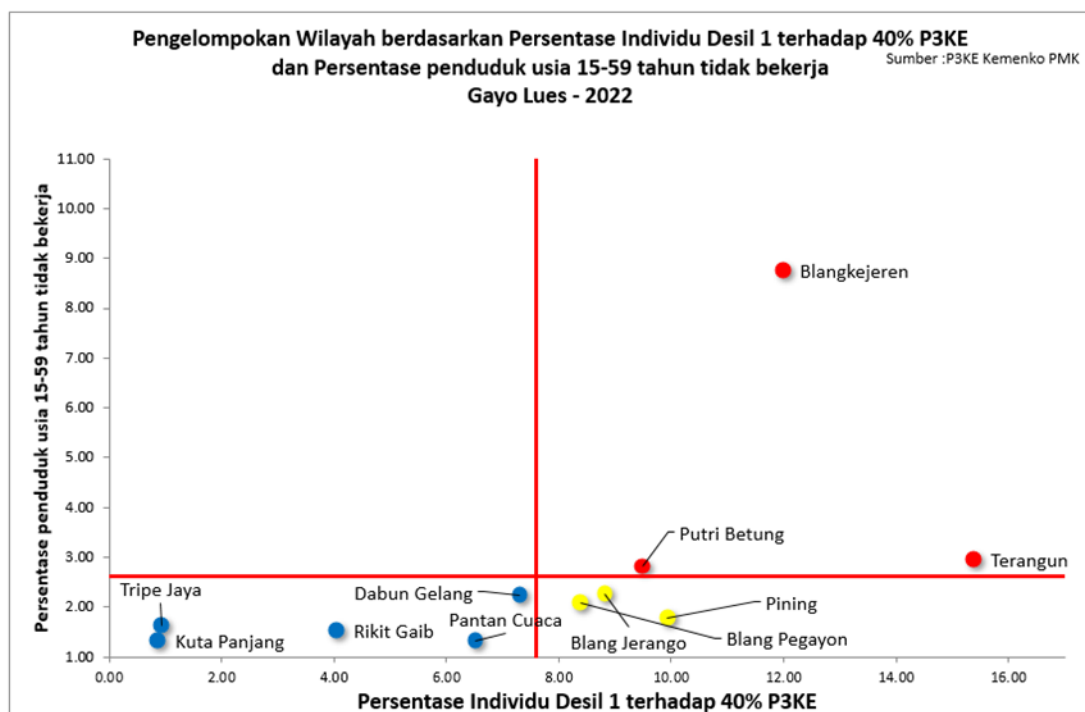
<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blangjerango, dan Kecamatan Putri Betung
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Terangun, Kecamatan Pining dan Kecamatan BlangPegayon.
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Dabun Gelang

5. Wilayah Prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase kepala keluarga perempuan 60 tahun ke atas



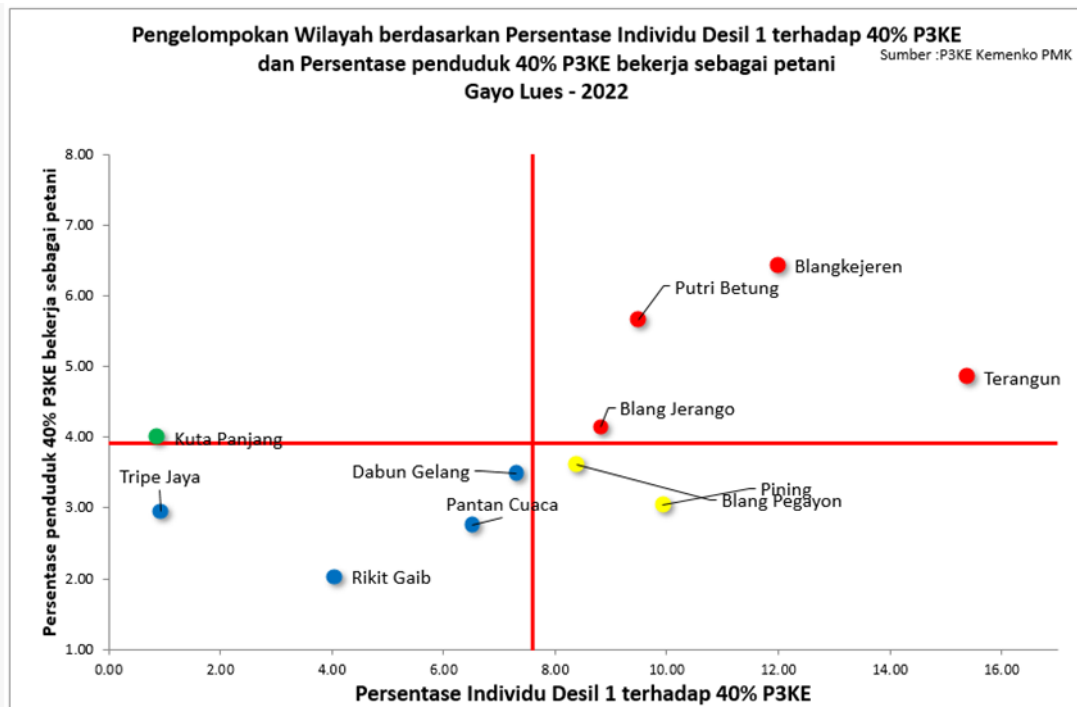
<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Terangun dan Kecamatan Putri Betung
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Pining dan Kecamatan BlangPegayon.
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Kuta Panjang
<b>Prioritas keempat</b>	Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Pantan Cuaca dan Kecamatan Rikit Gaib.

6. Wilayah Prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase penduduk usia 15-59 tahun tidak bekerja



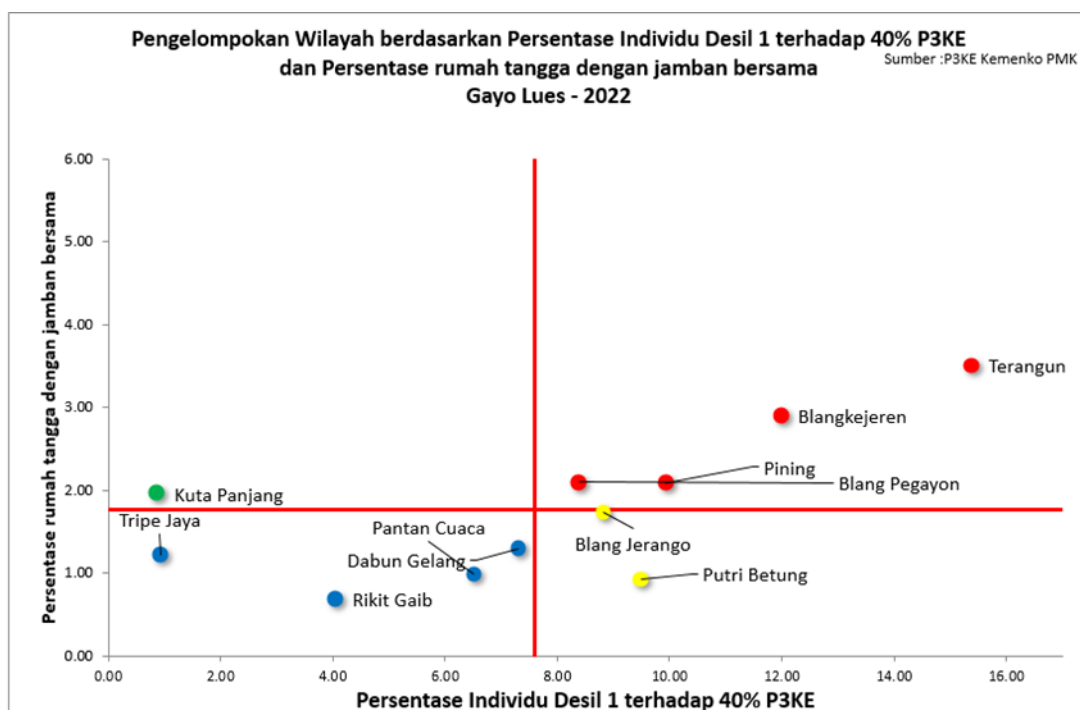
<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Terangun dan Kecamatan Putri Betung
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Pining, Kecamatan BlangPegayon dan Kecamatan BlangJerango
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Dabun Gelang

7. Wilayah prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase penduduk 40% P3KE bekerja sebagai petani/buruh tani



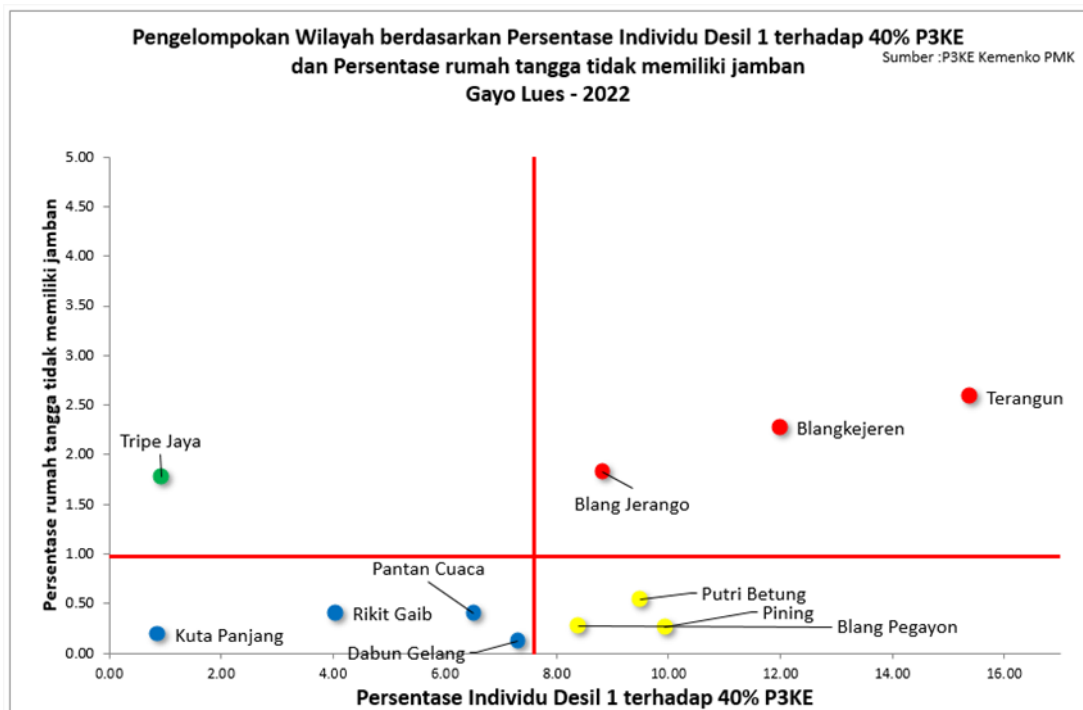
<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Terangun, Kecamatan Blangjerango dan Kecamatan Putri Betung
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Pining dan Kecamatan BlangPegayon.
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Kuta Panjang
<b>Prioritas keempat</b>	Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Dabun Gelang Kecamatan Pantan Cuaca dan Kecamatan Rikit Gaib.

8. Wilayah prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase rumah tangga dengan jamban bersama



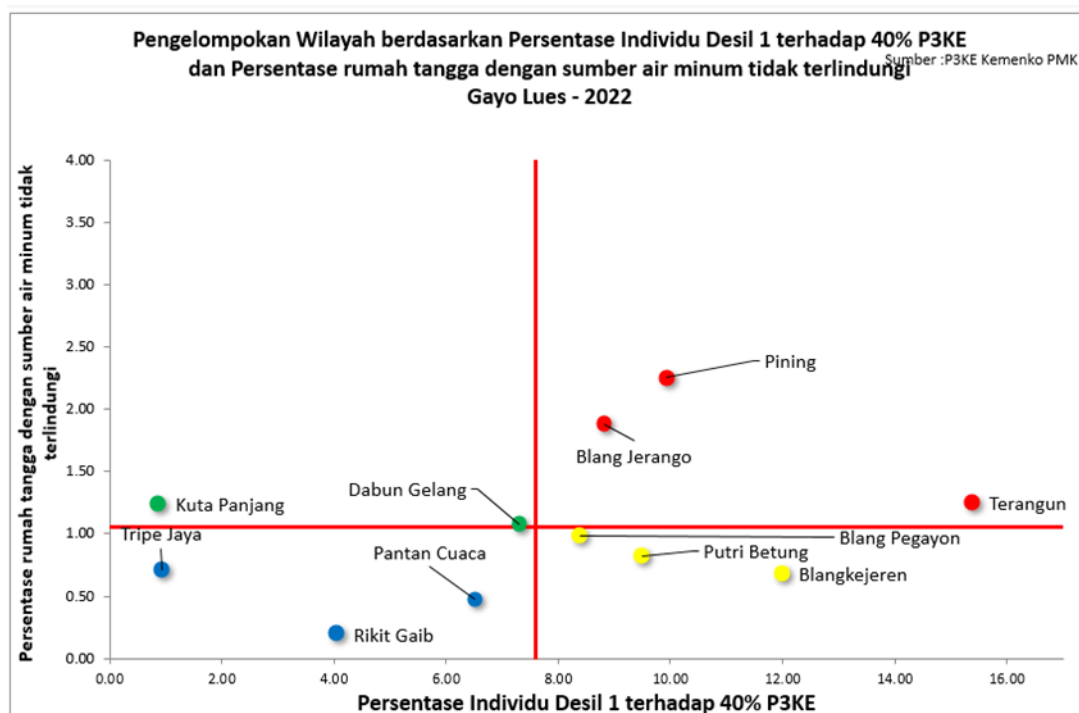
<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Terangun, Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Pining dan Kecamatan BlangPegayon
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Blangjerango dan Kecamatan Putri Betung
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Kuta Panjang
<b>Prioritas keempat</b>	Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Dabun Gelang Kecamatan Pantan Cuaca dan Kecamatan Rikit Gaib.

9. Wilayah prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3K dengan persentase rumah tangga tidak memiliki jamban



<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Terangun, Kecamatan Blangkejeren dan Kecamatan Blangjerango
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Pining dan Kecamatan Blangpegayon
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Tripe Jaya
<b>Prioritas keempat</b>	Kecamatan Dabun Gelang Kecamatan Pantan Cuaca Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Rikit Gaib.

10. Wilayah prioritas berdasarkan persentase penduduk Desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi Kabupaten Gayo Lues



<b>Prioritas pertama</b>	Kecamatan Terangun, Kecamatan Pining dan Kecamatan Blangjerango
<b>Prioritas kedua</b>	Kecamatan Blangpegayon, Kecamatan Putri Betung dan Kecamatan Blangkejeren
<b>Prioritas ketiga</b>	Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Kuta Panjang
<b>Prioritas keempat</b>	Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Tripe Jaya dan Kecamatan Rikit Gaib.

Tabel 5.1.  
Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
1	Pendidikan	Meningkatnya Penerapan Syariat Islam Di Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Bernuansa Islami	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	83,17	8.819.606.168	83,43	9.020.677.645	83,69	8.243.969.371	83,95	9.080.403.799	11 Kecamatan	APBK
2	Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Peningkatan Level Akreditasi Sekolah	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase penetapan tenaga pendidik honorer menjadi P3K	21	500.000.000	36	500.000.000	50	500.000.000	66	500.000.000	11 Kecamatan	APBK
3	Pendidikan	Meningkatnya Penerapan Syariat Islam di Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Bernuansa Islami	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	55	820.945.167	60	820.945.167	65	714.039.746	70	959.039.746	11 Kecamatan	APBK



No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
4	Kesehatan	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang meningkat akreditasinya	37,50	62.592.152.875	50	71.451.602.875	62,50	70.087.400.000	100	68.531.687.750	11 Kecamatan	APBK
5	Kesehatan	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standart Pelayanan Kesehatan	80	1.401.000.000	85	1.911.000.000	95	1.871.000.000	100	2.301.000.000	11 Kecamatan	APBK
6	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	62,50	1.264.989.817	65,63	1.379.918.012	68,91	1.700.000.000	72,35	1.006.586.374	11 Kecamatan	APBK
7	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja binaan yang ditempatkan	20	200.000.000			30	280.000.000	20	200.000.000	11 Kecamatan	APBK

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
8	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	12,90	450.000.000	12,90	300.000.000	12,90	450.000.000	12,90	300.000.000	11 Kecamatan	APBK
9	Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Dan Keindahan	Persentase Kondisi Darurat Yang Tertangani	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun	30,58	1.055.000.000	40,39	500.000.000	50,19	920.000.000	60	600.000.000	11 Kecamatan	APBK
10	Perumahan dan kawasan Permukiman	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman tertata	30,58	3.740.580.000	40,39	3.674.579.000	50,19	4.141.217.000	60	4.500.000.000	11 Kecamatan	APBK
11	Perumahan dan kawasan Permukiman	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan kumuh yang tertangani	2,86	200.000.000	3,57	200.000.000	4,28	200.000.000	5	200.000.000	11 Kecamatan	APBK

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
12	Perumahan dan kawasan Permukiman	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih, perkotaan dan perdesaaa	83,5	11.866.039.968	89	12.670.000.000	94,5	12.204.720.000	100	10.810.000.000	11 Kecamatan	APBK
13	Perumahan dan kawasan Permukiman	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Limbah Domestik	73,84	2.519.600.000	82,56	1.631.540.000	91,28	1.458.540.000	100	1.556.540.000	11 Kecamatan	APBK
14		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase sarana prasarana utilitas umum berfungsi baik	73,84	4.235.000.000	82,66	3.000.000.000	91,28	4.176.699.968	100	4.868.536.968	11 Kecamatan	APBK

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
15	Ddpmk			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Aktif	0,60	1.385.000.000	0,65	1.980.000.000	0,70	2.140.000.000	0,73	2.220.000.000	11 Kecamatan	APBK
16	PUPR			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase Daerah Irgasi (D.I) Fungsional	45	10.688.000.000	46	10.788.000.000	48	11.188.000.000	50	11.578.000.000	11 Kecamatan	APBK
17	DP3AP2KB			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	program pembinaan keluarga berencana (kb)	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Bimbingan KIE KB	60	2.373.428.000	70	2.704.736.970	75	2.634.736.970	80	2.839.296.000	11 Kecamatan	APBK

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
18	DP3AP2KB			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Persentase Pemberdayaan terhadap keluarga sejahtera	81	280.000.000	82	310.000.000	83	270.000.000	85	325.000.000		
19	Pangan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas kolam per hektar per Tahun	4	1.700.000.000	4,5	1.800.000.000	5	1.000.000.000	5	1.700.000.000	11 Kecamatan	APBK
20	Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	20,78	6.000.000.000	21,33	6.500.000.000	22,39	6.500.000.000	23,48	6.500.000.000	11 Kecamatan	APBK
21	Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan produktif yang dapat diakses Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Usaha Tani	15	8.985.000.000	22	9.685.000.000	38	9.685.000.000	45	9.685.000.000	11 Kecamatan	APBK

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
22	Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase hama penyakit yang ditangani per tahun	25	500.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	11 Kecamatan	APBK
23	Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase penyandang penyakit sosial yang dibina	100	2.199.236.540	100	2.199.236.540	100	2.199.236.540	100	2.100.000.000	11 Kecamatan	APBK
24	Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang penyakit sosial yang direhabilitasi	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.869.956.540	11 Kecamatan	APBK
25	Sosial	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Dan Keindahan	Persentase Kondisi Darurat Yang Tertangani	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	1.263.000.000	100	1.263.000.000	100	1.263.000.000	100	1.363.000.000	11 Kecamatan	APBK

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
26	Sosial			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	program perlindungan dan jaminan sosial	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	11 Kecamatan	APBK
27	Pariwisata			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	program pengembangan kesenian	Program pengembangan kesenian Tradisional	3	150.000.000	3	150.000.000	3	174.960.000	3	188.956.800	11 Kecamatan	APBK



No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
28	Perhubungan			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)	Persentase Sarana Prasarana LLAJ Berpungsi Baik	80	4.201.000.000	84	9.113.000.000	87	3.092.000.000	90	3.563.000.000	11 Kecamatan	APBK
29	Arpus			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	program pembinaan perpustakaan	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	0,002	247.000.000	0,002	425.000.000	0,002	790.000.000	0,002	820.000.000	11 Kecamatan	APBK

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
30	Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Pertumbuhan UMKM	2.7	1.000.000.000	3.6	500.000.000	4	350.000.000	5.8	300.000.000	11 Kecamatan	APBK
31	Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Mengurangi Angka Kemiskinan	1.48	1.190.000.000	0.98	1.281.455.087	1.49	1.181.341.614	1.46	1.281.341.614	11 Kecamatan	APBK
32	Perdagangan, Koperasi dan UKM			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	peningkatan fungsional pasar tradisional	15,29	2.107.080.836	15,99	2.586.000.000	16,71	3.100.000.000	17,47	2.501.658.386	11 Kecamatan	APBK

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator Program	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
33	Baitul Mal	Meningkatnya Penerapan Syariat Islam Di Masyarakat Dan Lembaga Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Bernuansa Islami	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Baitul Mal	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Waqaf dan Harta Agama Lainnya	100	3.257.236.328	100	3.260.336.328	100	3.657.935.699	100	3.327.243.843	11 Kecamatan	APBK
34	BPBD			Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100	416.000.000,00	100	508.000.000,00	100	508.000.000,00	100	443.000.000,00	11 Kecamatan	APBK

## **BAB VI PENUTUP**

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Guna lebih terarah dalam penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di daerah. RPKD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Gayo Lues dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Gayo Lues. Oleh karena itu RPKD perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues yaitu RPJM dan Renstra SKPK maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPK ataupun dalam Renja SKPK pada periode tahun 2023 – 2026. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan RPKD tersebut perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur DPRK, masyarakat maupun swasta.

Seluruh SKPK perlu merespon RPKD ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.